



KEMENPU
SUKSES MEMBANGUN NEGARI UNTUK RAKYAT

LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024



BALAI PERKERASAN DAN LINGKUNGAN JALAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM





KATA PENGANTAR



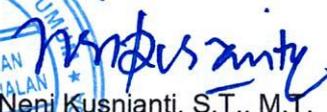
Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan Tahun Anggaran 2024 dapat kami selesaikan. Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka setiap Instansi Pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, diwajibkan untuk menyusun laporan kinerjanya. Laporan Kinerja merupakan salah satu dari enam komponen dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP).

LAKIN ini diharapkan memenuhi mekanisme akuntabilitas Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan dalam menyampaikan capaian kinerja serta menjadi perwujudan kewajiban Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan untuk periode 2024. LAKIN disusun merujuk kepada Rencana Strategis (Renstra) Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan 2020-2024 yang mengacu kepada Renstra Direktorat Jenderal Bina Marga dan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2020-2024 yang diimplementasikan dalam RKT Tahunan melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan LKIP Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan Tahun 2024 ini.

Bandung, 17 Januari 2025

Kepala Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan



Neni Kusnianti, S.T., M.T.
NIP. 19690123 199703 2 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan (BPLJ) sebagai Unit Eselon III di bawah Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR, memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) setiap akhir tahun anggaran. Laporan ini disusun sesuai dengan Permen PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 dan berisi ikhtisar pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK). LKIP memuat pencapaian tujuan organisasi, realisasi indikator kinerja, serta perbandingan antara capaian dengan target kinerja lima tahunan.

BPLJ memiliki peran strategis dalam mendukung Ditjen Bina Marga melalui pengembangan dan penerapan teknologi serta pemberian layanan teknis di bidang perkerasan jalan, lingkungan jalan, dan peralatan survei. Peran ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 16 Tahun 2020. BPLJ memprioritaskan kemantapan dan keselamatan jalan, perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan, Harmonisasi Norma Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK) dan pemanfaatan teknologi. Kemantapan jalan diukur melalui indikator teknis seperti *International Roughness Index* (IRI) dan daya dukung perkerasan, didukung sistem data drainase yang efisien. Keselamatan jalan difokuskan pada pengelolaan risiko di jalan, sejalan dengan kebijakan Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) untuk mengurangi kecelakaan dan biaya logistik. Perubahan iklim yang memengaruhi infrastruktur mendorong pembangunan tanggap iklim di IKN guna mendukung pembangunan berkelanjutan.

BPLJ juga memanfaatkan teknologi seperti aplikasi inspeksi drainase (Indrain) serta sistem e-Satker. Namun, tantangan pengadaan alat survei impor dan revisi DIPA berulang masih menjadi kendala. Dengan inovasi dan kebijakan strategis, BPLJ berupaya meningkatkan efisiensi layanan dan kualitas infrastruktur secara berkelanjutan.

BPLJ menyusun laporan kinerja untuk melaporkan pencapaian kinerja yang sudah dicapai selama tahun 2024 sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK). Pada PK 2024, Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan mendukung sasaran program:

1. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional dengan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) Rating Keselamatan Jalan Nasional melalui Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tingkat Pelayanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan dengan rincian output berupa Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan;
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya dengan IKSP Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR melalui IKK Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Jalan dengan rincian output berupa

kegiatan Layanan Perkantoran, kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Satker dan kegiatan Layanan Sarana Internal.

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari laporan kinerja BPLJ tahun anggaran 2024 ini adalah sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan e-monitoring PUPR, PAGU anggaran BPLJ Tahun 2024 adalah Rp 12.172.126.000, dengan realisasi sebesar Rp 12.095.138.000 atau 99,29%. Realisasi fisik mencapai 100%. Rincian kontribusi per kegiatan adalah maksimum dari Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan: Rp 7.217.254.000 (99,10%) dan minimum dari Layanan Sarana Internal: Rp 133.577.000 (100%).

2. Capaian Kinerja Output dan Outcome

Capaian kinerja output diperoleh dengan cara mengukur dan membandingkan rencana/target output yang ingin dihasilkan berdasarkan penetapan Perjanjian Kinerja BPLJ Tahun 2024 dengan realisasi output yang mampu dihasilkan dan diwujudkan pada akhir tahun 2024. Dari 4 (empat) Klasifikasi Rincian Output (KRO) yang telah diperjanjikan, Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan dapat memenuhi semua KRO.

Tabel Capaian Kerja Output BPLJ TA 2024

No	OUTPUT	SAT	2024		
			Target	Realisasi	Kinerja
1	Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100
2	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	1	1	100
3	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	100
4	Layanan Sarana Internal	Unit	1	1	100

Capaian kinerja outcome diperoleh dengan cara mengukur dan membandingkan hasil capaian kinerja dengan target capaian kinerja berdasarkan renstra BPLJ berupa persentase penyampaian teknologi bidang jalan dan jembatan yang dikembangkan dan persentase kepuasan pelanggan fasilitas pengujian laboratorium dan advis teknis berdasarkan penetapan SK Indikator Kinerja Utama BPLJ Tahun 2024. Dari kedua parameter yang ditetapkan, Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan mendapatkan capaian kinerja outcome diatas 100%.

Tabel Capaian Kerja Outcome BPLJ TA 2024

No	Parameter	Pengukuran Parameter	Target Rensta BPLJ (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja TA 2024 (%)
1	Teknologi bidang jalan dan jembatan yang dikembangkan	Persentase penyampaian teknologi bidang jalan dan jembatan yang dikembangkan	90	92,86	103,18
2	Tingkat fasilitasi pengujian laboratorium dan advis teknik	Persentase kepuasan pelanggan fasilitasi pengujian laboratorium dan advis teknik	90	96,12	106,80

Penjelasan dari setiap output dijelaskan sebagai berikut:

- Untuk kegiatan Layanan Keteknikan di Bidang Jalan dan Jembatan, pada Tahun 2024 untuk tingkat fasilitasi pengujian laboratorium dan advis teknis, BPLJ telah menerima 279 layanan teknis yang terdiri atas 213 kegiatan advis teknis dan 66 kegiatan layanan pengujian baik berupa layanan pengujian eksternal (PNBP) maupun layanan pengujian internal. Sedangkan untuk pengembangan dan penerapan teknologi telah menghasilkan 4 kajian, 1 prototipe, 2 aplikasi, 1 pedoman, dan 6 kegiatan internalisasi terkait dengan bidang keteknikan perkerasan dan lingkungan jalan.
- Untuk kegiatan Layanan Perkantoran, pada Tahun 2024 telah tercapai 1 layanan karena telah terpenuhinya kebutuhan operasional perkantoran, serta ketepatan dan kelancaran pembayaran gaji dan belanja lembur pegawai dalam menunjang kinerja balai, dan terpenuhinya sarana dan prasarana rumah tangga dan perkantoran yang berfungsi dengan baik, serta lancar dan nyaman bagi seluruh kegiatan perkantoran sesuai dengan anggaran selama periode waktu satu tahun untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi dari Balai perkerasan dan Lingkungan Jalan.
- Untuk kegiatan Layanan Sarana Internal, pada Tahun 2024 telah tercapai 1 unit karena telah terpenuhinya pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran untuk menunjang efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi dari Balai perkerasan dan Lingkungan Jalan.
- Untuk kegiatan Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal, pada Tahun 2024 telah tercapai 1 layanan karena telah terpenuhinya pelaksanaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, administrasi kepegawaian, pengelolaan dan pelaporan administrasi kepegawaian, pengelolaan dan pelaporan administrasi

keuangan, penerimaan negara bukan pajak dan barang milik negara di Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan.

3. Faktor Pendukung Keberhasilan dan Penyebab Kegagalan

Adapun berbagai faktor pendukung keberhasilan yang dihadapi Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan pada Tahun 2024 yang berdampak pada capaian kinerja Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan, diantaranya terkait peningkatan komitmen dan kualitas penerapan SAKIP, peranan kuat dan aktif dari pimpinan untuk mengarahkan dan kerjasama seluruh pegawai dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Identifikasi dan mitigasi risiko meningkatkan keberhasilan capain kinerja balai.

Adapun terdapat kendala dan hambatan yang menjadi faktor penyebab kegagalan capaian kinerja BPLJ Tahun 2024 seperti pemblokiran pagu paket meeting menjelang akhir tahun, peningkatan permintaan advis teknis yang mengurangi penyerapan uang makan, serta keterbatasan fasilitas dan peralatan survei yang menghambat pelaksanaan kegiatan pengujian.

Secara keseluruhan, BPLJ berhasil mencapai target kinerja tahun 2024 dengan tingkat capaian output dan outcome di atas 100%. Keberhasilan ini didukung oleh peningkatan penerapan SAKIP dan peran aktif pimpinan, meskipun masih terdapat beberapa kendala yang memerlukan perhatian untuk perbaikan di tahun mendatang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
RINGKASAN EKSEKUTIF	II
DAFTAR ISI.....	VI
DAFTAR TABEL	VIII
DAFTAR GAMBAR	IX
DAFTAR SINGKATAN	XI
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas dan Fungsi.....	2
1.3 Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia	3
1.3.1 Struktur Organisasi	3
1.3.2 Sumber Daya Manusia	4
1.4 Sarana dan Prasarana	10
1.4.1 Sarana dan Prasarana Fisik.....	10
1.4.2 Teknologi Informasi	11
1.5 Isu Strategis	12
1.5.1 Kemantapan dan Keselamatan Jalan	13
1.5.2 Perubahan Iklim dan Pembangunan Berkelanjutan	13
1.5.3 Harmonisasi Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK).....	14
1.5.4 Penggunaan Teknologi dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0	14
1.5.5 Penggunaan Produk dalam Negeri dan Efisiensi Anggaran.....	14
1.6 Sistematika Laporan.....	15
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA	16
2.1 Uraian Singkat Restra BPLJ	16
2.1.1 Penjabaran Visi dan Misi	16
2.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi BPLJ	18
2.1.3 Program dan Kegiatan BPLJ.....	19
2.2 Perjanjian Kinerja	22
2.2.1 Perbandingan PK Awal dan PK Revisi Tahun 2024	22
2.3 Metode Pengukuran	24
2.4 Target Kinerja Tahun Berjalan BPLJ	28
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	31
3.1 Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	31
3.2 Capaian Kinerja Organisasi	33

3.3	Perbandingan Kinerja Organisasi	64
3.4	Analisis Realisasi Anggaran	68
3.4.1	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)	68
3.4.2	Realisasi Anggaran TA 2024	71
3.4.3	Perbandingan Realisasi Anggaran TA. 2024 dengan Tahun sebelumnya.....	73
3.4.4	Isu Terkait Program dan Anggaran TA 2024	74
3.5	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	75
3.6	Pemanfaatan Laporan Kinerja	76
3.7	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) atas Penggunaan Layanan Publik	84
BAB 4 PENUTUP		86
4.1	Simpulan Umum.....	86
4.1.1	Faktor Pendukung Keberhasilan.....	86
4.1.2	Faktor Penyebab Kegagalan.....	87
4.2	Rekomendasi dan Tindak.....	87
LAMPIRAN.....		XIII



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rincian Aset BMN Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan	11
Tabel 2.1 Cascading Renstra BPLJ (2020-2024).....	20
Tabel 2.2 Output Indikator Kinerja BPLJ (2020-2024).....	20
Tabel 2.3 Perbandingan parameter IKP pada PK Awal dan PK Revisi Tahun 2024 (<i>Output</i>)	22
Tabel 2.4 Perbandingan Indikator Kinerja Kegiatan Pada PK Awal dan PK Revisi Tahun 2024 (<i>Output</i>)	23
Tabel 2.5 Pengukuran Indikator Kinerja BPLJ	26
Tabel 2.6 Sandingan Outcome dan Target pada Perjanjian Kinerja 2024 dengan Renstra 2024	28
Tabel 2.7 Sandingan Output dan Target pada Perjanjian Kinerja 2024 dengan Renstra 2024	28
Tabel 2.8 Indikator Kinerja Utama BPLJ (2020-2024).....	29
Tabel 3.1 Rekomendasi dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP BPLJ.....	32
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program TA.2024.....	34
Tabel 3.3 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	34
Tabel 3.4 Capaian Kinerja IKU BPLJ 2024	35
Tabel 3.5 Output Teknologi Bidang Jalan yang Dikembangkan	41
Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Outcome Kinerja Beberapa Tahun Terakhir	65
Tabel 3.7 Perbandingan Capaian Output Kinerja Beberapa Tahun Terakhir.....	65
Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Renstra.....	66
Tabel 3.9 Perbandingan Capaian Output Kinerja Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan dan Balai Bahan Jalan TA.2024.....	66
Tabel 3.10 Alokasi Anggaran DIPA Satker BPLJ TA 2024.....	68
Tabel 3.11 Kronologis Perubahan DIPA Satker BPLJ TA 2024	69
Tabel 3.12 Jumlah Anggaran Tahun 2020 s.d 2024	71
Tabel 3.13 Perbandingan Realisasi Anggaran dengan PAGU Anggaran Tahun 2024	71
Tabel 3.14 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya....	74
Tabel 3.15 Daftar Rincian Pegawai Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan	75
Tabel 3.16 Efisiensi Penggunaan Anggaran.....	76
Tabel 3.17 Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM,.....	85
Tabel 3.18 Indeks Kepuasan Masyarakat BPLJ 2024.....	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan.....	4
Gambar 1.2 SDM PNS Berdasarkan Gender	5
Gambar 1.3 SDM PNS Berdasarkan Golongan	6
Gambar 1.4 SDM PNS Berdasarkan Usia	6
Gambar 1.5 SDM PNS Berdasarkan Pendidikan.....	6
Gambar 1.6 SDM PNS Berdasarkan Jabatan.....	7
Gambar 1.7 SDM Non PNS Berdasarkan Gender	7
Gambar 1.8 SDM Non PNS Berdasarkan Usia.....	8
Gambar 1.9 SDM Non PNS Berdasarkan Pendidikan	8
Gambar 1.10 SDM Non PNS Berdasarkan Jabatan	8
Gambar 1.11 SDM PPPK Berdasarkan Gender	9
Gambar 1.12 SDM PPPK Berdasarkan Usia	9
Gambar 1.13 SDM PPPK Berdasarkan Pendidikan.....	10
Gambar 1.14 SDM PPPK Berdasarkan Jabatan.....	10
Gambar 1.15 Tangkapan Layar Aplikasi LACA UJI.....	11
Gambar 1.16 Tangkapan Layar Aplikasi e-Satker	12
Gambar 1.17 Tangkapan Layar Aplikasi InDrain	12
Gambar 2.1 Peta Strategi Renstra BPLJ	21
Gambar 2.2 Perjanjian Kinerja Awal BPLJ Tahun 2024.....	23
Gambar 2.3 Perjanjian Kinerja Revisi BPLJ Tahun 2024.....	24
Gambar 3.1 Dokumentasi diskusi pra penajaman anggaran, Rapat Monev bulanan, Reviu Renstra BPLJ, Pembahasan Laporan Kinerja TA 2024, Perjanjian Kinerja (PK) Revisi 2024, Penyusunan PK 2024, dan Penyusunan LAKIN BPLJ 2024.....	33
Gambar 3.2 Dokumentasi Layanan Teknis (1/2).....	37
Gambar 3.3 Dokumentasi Layanan Teknis (2/2).....	38
Gambar 3.4 Pemeliharaan Gedung Mudjitaba dan Gedung Layanan TA 2024	56
Gambar 3.5 Pengadaan Pendukung Perkantoran Tahun 2024	58
Gambar 3.6 Kurva S Realisasi dan Rencana Fisik TA 2024	73
Gambar 3.7 Kurva S Realisasi dan Rencana Keuangan TA 2024	73
Gambar 3.8 Hasil Kuesioner Kriteria 1	77
Gambar 3.9 Hasil Kuesioner Kriteria 2	78
Gambar 3.10 Hasil Kuesioner Kriteria 3.....	79
Gambar 3.11 Hasil Kuesioner Kriteria 4.....	80
Gambar 3.12 Hasil Kuesioner Kriteria 5.....	81



Gambar 3.13 Hasil Kuesioner Kriteria 6.....	82
Gambar 3.14 Hasil Kuesioner Kriteria 7.....	83
Gambar 3.15 Dokumentasi penyebaran Kuesioner	84

DAFTAR SINGKATAN

No	DAFTAR SINGKATAN	KETERANGAN
1	AKIP	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2	APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
3	ASN	Aparatur Sipil Negara
4	BA BUN	Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara
5	BBPJN	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional
6	BMN	Barang Milik Negara
7	BPJN	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional
8	DIPA	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
9	Dukman	Dukungan Manajemen
10	Duknis	Dukungan Teknis
11	FWD	Falling Weight Deflectometer
12	IJD	Inpres Jalan Daerah
13	IKK	Indikator Kinerja Kegiatan
14	IKN	Ibu Kota Nusantara
15	IKSP	Indikator Kinerja Sasaran Program
16	IKSS	Indikator Kinerja Sasaran Strategis
17	IKU	Indikator Kinerja Utama
18	INDRAIN	Inspeksi Drainase
19	Inpres	Instruksi Presiden
20	IRI	<i>International Roughness Index</i>
21	KEK	Kawasan Ekonomi Khusus
22	KI	Kawasan Industri
23	KPI	<i>Key Performance Indicator</i>
24	KRO	Klasifikasi Rincian Output
25	KSPN	Kawasan Strategis Pariwisata Nasional
26	LACAK UJI	Layanan Pencarian dan Kuesioner Pengujian
27	LAKIN	Laporan Kinerja
28	LWD	Light Weight Deflectometer
29	LMAN	Lembaga Manajemen Aset Negara
30	P2JN	Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional
31	PCI	<i>Pavement Condition Index</i>
32	PHLN	Pinjaman Hibah Luar Negeri
33	PJN	Pelaksanaan Jalan Nasional
34	PK	Perjanjian Kinerja
35	PKN	Pusat Kegiatan Nasional
36	PKW	Pusat Kegiatan Wilayah
37	PN	Prioritas Nasional
38	PNS	Pegawai Negeri Sipil

39	POK	Petunjuk Operasional Kegiatan
40	PPK	Pejabat Pembuat Komitmen
41	PPNPN	Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri
42	PPPK	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
43	Pro-PN	Proyek Prioritas Nasional
44	Rencum	Rencana Umum
45	Renstra	Rencana Strategis
46	RKA-KL	Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
47	RO	Rincian Output
48	RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
49	RPM	Rupiah Murni
50	RUNK	Rencana Umum Nasional Keselamatan
51	SAKIP	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
52	SDPJ	Software Desain Perkerasan Jalan
53	Satker	Satuan Kerja
54	SBSN	Surat Berharga Syariah Negara
55	SDM	Sumber Daya Manusia
56	SHT	Sisa Hasil Tender
57	SIPP	Sistem Informasi Pemantauan Proyek
58	SKPD-TP	Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan
59	TA	Tahun Anggaran
60	Unker	Unit Kerja
61	Unor	Unit Organisasi
62	UPT	Unit Pelaksana Teknis

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan kinerja adalah instrumen yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja yang digunakan oleh setiap unit kerja dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan visi dan misi organisasi. Penyelenggaraan Laporan kinerja mengacu kepada Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan laporan wajib yang harus disiapkan, disusun dan dilaporkan secara periodik dan melembaga.

Selain itu, dalam upaya memenuhi amanat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian PUPR bahwa sebagai upaya konkrit dalam mewujudkan akuntabilitas, transparansi dan produktivitas kinerja, Instansi Pemerintah diharuskan menyampaikan pelaporan kinerja. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan sebagai Unit Eselon III yang berkoordinasi dengan Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan dibawah Direktorat Jenderal Marga Kementerian PUPR berkewajiban membuat LKIP yang diterbitkan setiap berakhirnya tahun anggaran. Sesuai dengan Permen PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014, LKIP ini berisi tentang ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja (PK). Pencapaian sasaran tersebut menjelaskan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi indikator kinerja, penjelasan atas pencapaian kinerja, dan perbandingan capaian indikator kinerja sampai tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

LKIP Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi dengan mengacu kepada kinerja Renstra Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kebijakan dan sasaran menjadi acuan bagi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang kemudian dirumuskan kedalam Penetapan Kinerja (PK), serta Rencana Kinerja Tahunan (RKT). LKIP menjadi dokumen untuk



mengukur dan mengevaluasi indikator kinerja serta tolak ukur bagi organisasi dalam menjawab tantangan pembangunan bidang jalan dan jembatan.

1.2 Tugas dan Fungsi

Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan penerapan teknologi dan memberikan layanan teknis di bidang perkerasan jalan, lingkungan jalan dan peralatan survei melalui koordinasi dengan Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut sebagaimana tertuang dalam pasal 124 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2020, Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi di bidang struktur perkerasan dan lingkungan jalan;
- b. Pelaksanaan penyiapan kesiapterapan teknologi bidang struktur perkerasan dan lingkungan jalan;
- c. Pelaksanaan uji laboratorium lapangan, sertifikasi, inspeksi dan kliring teknologi bidang jalan dan jembatan;
- d. Pelaksanaan layanan teknis dan penyiapan penerbitan rekomendasi teknis di bidang struktur perkerasan dan lingkungan jalan;
- e. Pengembangan sistem monitoring bidang struktur dan perkerasan dan lingkungan jalan; dan
- f. Pelaksanaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtangan, administrasi kepegawaian, pengelolaan dan pelaporan administrasi keuangan, penerimaan negara bukan pajak dan barang milik negara.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Kepala Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan, Direktorat Jenderal Bina Marga didukung oleh unit-unit di bawahnya, yaitu sebagai berikut:

- 1) Sub Bagian Umum dan Tata Usaha;

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtangan, administrasi kepegawaian, pengelolaan dan pelaporan administrasi keuangan, penerimaan negara bukan pajak dan barang milik negara, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern balai.

- 2) Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.3 Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

1.3.1 Struktur Organisasi

Sebagai manifestasi dari Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat maka disusun: i) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; ii) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; iii) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Peraturan-peraturan tersebut menjadi dasar penjabaran struktur organisasi dan pelaksanaan tugas serta fungsi seluruh unit kerja di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, termasuk Direktorat Jenderal Bina Marga dan Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan sebagai unit kerja di bawahnya. Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, struktur organisasi Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan, Direktorat Jenderal Bina Marga dengan unit kerja yang berada dibawahnya terdiri atas:

1. Sub Bagian Tata Usaha; dan
2. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan, Direktorat Jenderal Bina Marga dapat dilihat dalam Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan

Dalam rangka mengoptimalkan evaluasi kinerja dalam menjalankan organisasi tersebut, Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan didukung oleh 3 (tiga) Ketua Tim. Ketua Tim adalah pejabat fungsional dan non fungsional yang memiliki tugas dan tanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dukungan penerapan teknologi, kegiatan layanan teknis, melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan dukungan penerapan teknologi dan kegiatan layanan teknis, yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, serta pengendalian dokumen atau *output*. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab ini selalu berkoordinasi dengan Ketua Kelompok Bidang Keahlian dalam upaya pencapaian output agar sesuai dengan perencanaan, tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran.

1.3.2 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. SDM merupakan faktor sentral dalam pengelolaan suatu organisasi. SDM menjadi penggerak roda organisasi dalam mencapai dan mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Oleh karena itu, produktivitas organisasi sangat ditentukan oleh produktivitas SDM yang bersangkutan.

Sumber daya manusia (SDM) di Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan dibagi ke dalam beberapa rumpun keahlian, yaitu:

- a. Kelompok Bidang Keahlian Perkerasan Jalan yang meliputi perkerasan lentur, perkerasan kaku, dan sistem manajemen perkerasan jalan;



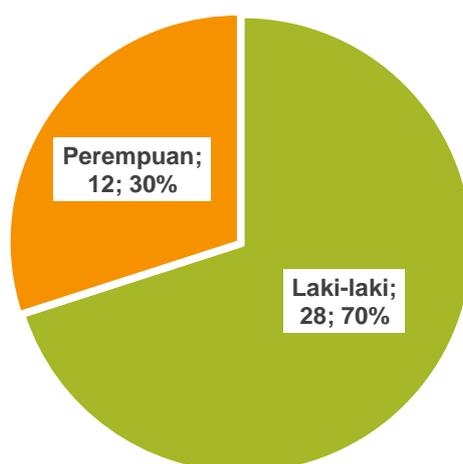
- b. Kelompok Bidang Keahlian Teknik Lalu Lintas yang meliputi geometri jalan, keselamatan, analisa beban lalu lintas, kapasitas jalan dan perlengkapan jalan;
- c. Kelompok Bidang Keahlian Lingkungan Jalan yang meliputi drainase jalan, lingkungan jalan, Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, serta jalan berkelanjutan;

Semua rumpun tersebut didukung oleh SDM di bidang instrumentasi sebagai upaya untuk pengembangan alat dan software yang dapat membantu penyelenggara jalan.

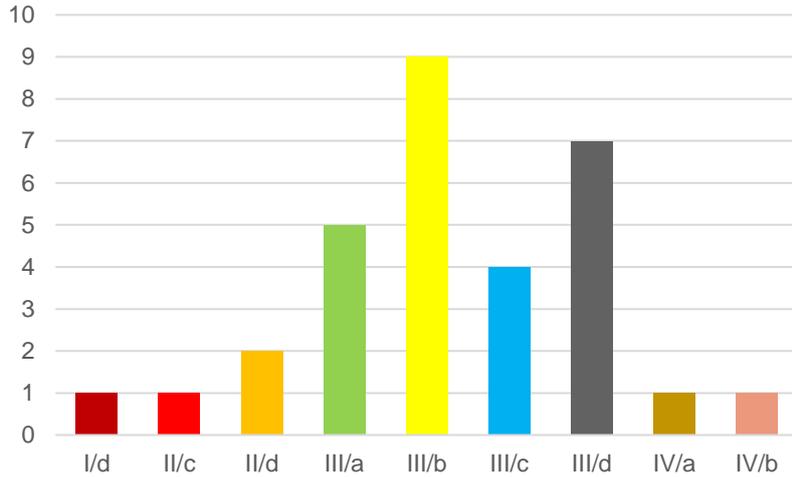
Secara keseluruhan jumlah Sumber daya manusia (SDM) di Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan adalah 58 orang yang terdiri atas 40 orang Pegawai Negeri Sipil, 6 Orang PPPK, 12 orang Non Pegawai Negeri Sipil.

1.3.2.1 Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Jumlah PNS Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan sampai akhir Tahun 2024 berjumlah 40 (empat puluh) orang yang terdiri atas 28 (dua puluh delapan) orang berjenis kelamin laki-laki dan 12 (dua belas) orang berjenis kelamin perempuan. Berdasarkan golongan pegawai, pegawai BPLJ didominasi oleh golongan III/b sejumlah 9 (sembilan) orang dan golongan III/d sejumlah 10 (sepuluh). Data tersebut beserta pengelompokan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.2 dan Gambar 1.3.

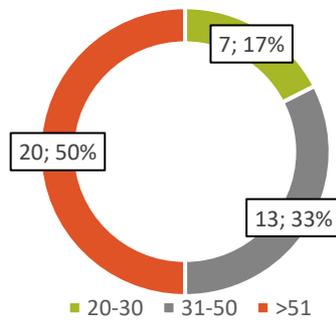


Gambar 1.2 SDM PNS Berdasarkan Gender

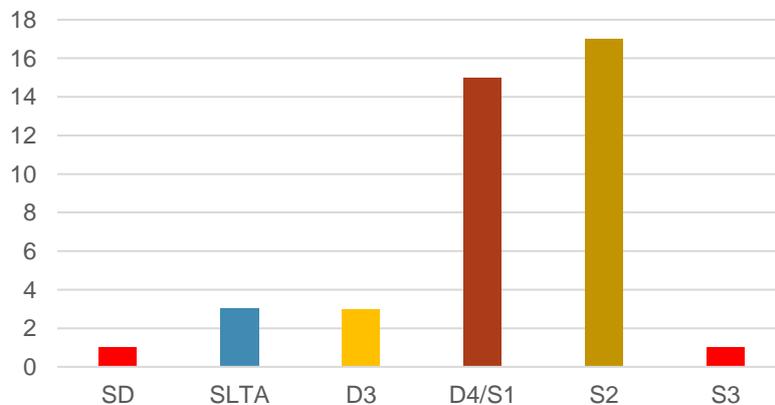


Gambar 1.3 SDM PNS Berdasarkan Golongan

Komposisi PNS berdasarkan kelompok usia dapat dilihat pada Gambar 1.4 SDM PNS Berdasarkan Usia. Sedangkan komposisi PNS Tahun 2024 berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada Gambar 1.5.

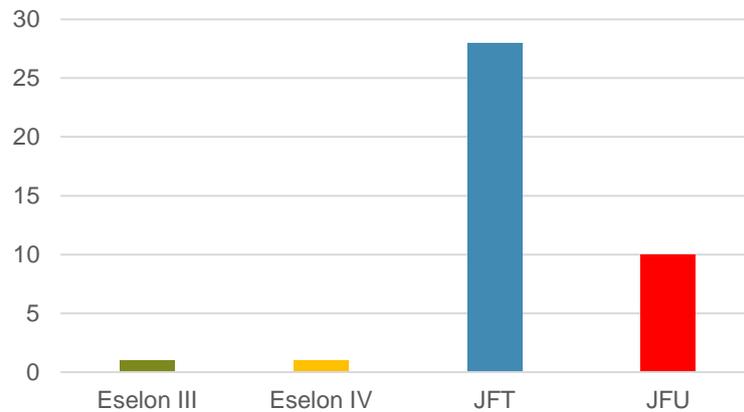


Gambar 1.4 SDM PNS Berdasarkan Usia



Gambar 1.5 SDM PNS Berdasarkan Pendidikan

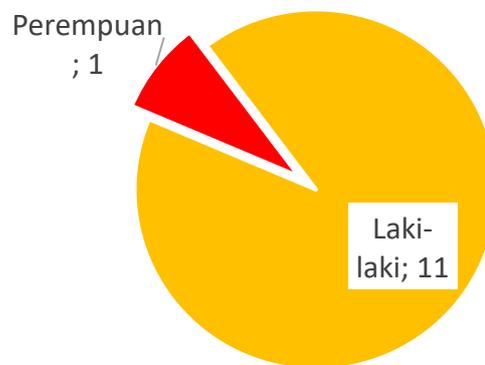
Pegawai Negeri Sipil (PNS) Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan terdiri dari satu eselon 3 yaitu Kepala Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan, satu eselon 4 yaitu Kepala Sub Bagian Umum dan Tata Usaha, serta 28 orang pegawai sebagai staf Jabatan Fungsional Teknis dan 10 orang pegawai sebagai staf Jabatan Fungsional Umum. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 1.6.



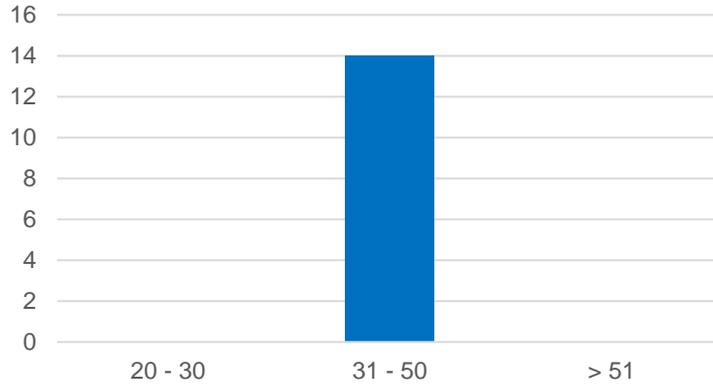
Gambar 1.6 SDM PNS Berdasarkan Jabatan

1.3.2.2 Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS)

Jumlah Pegawai Non-PNS Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan total berjumlah 12 orang yang terdiri dari 11 orang berjenis kelamin laki-laki dan 1 orang berjenis kelamin perempuan, yang dapat dilihat pada Gambar 1.7. Sedangkan komposisi Pegawai Non-PNS Tahun 2024 berdasarkan usia terdiri 12 orang berusia 31-50 tahun. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 1.8.

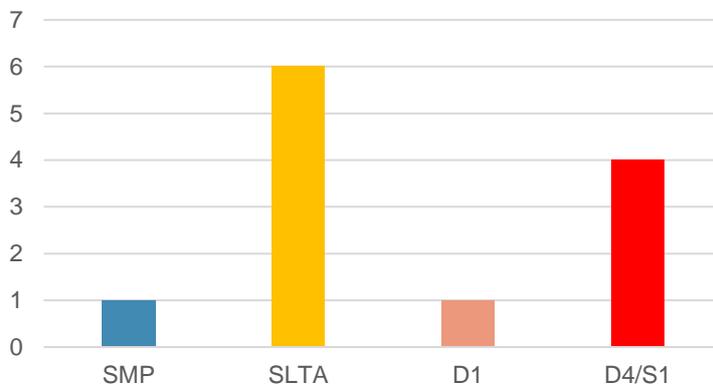


Gambar 1.7 SDM Non PNS Berdasarkan Gender

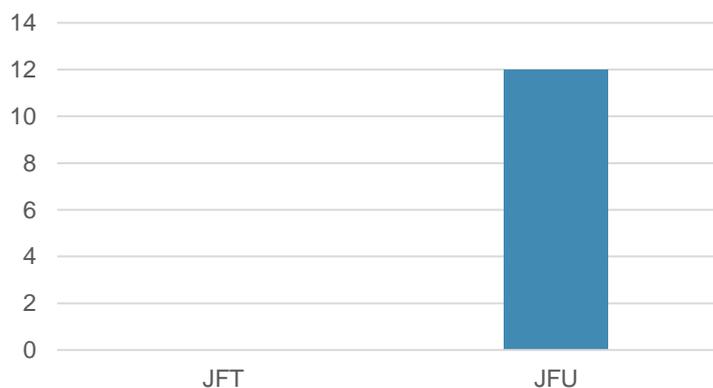


Gambar 1.8 SDM Non PNS Berdasarkan Usia

Komposisi Pegawai Non-PNS Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan Tahun 2024 berdasarkan tingkat pendidikan terdiri dari 1 orang tingkat SLTP, 6 orang tingkat SLTA, 1 orang tingkat D1, 4 orang tingkat S1/D4 yang dapat dilihat pada Gambar 1.9. Sedangkan Komposisi Pegawai Non-PNS berdasarkan jabatan dapat dilihat pada Gambar 1.10.



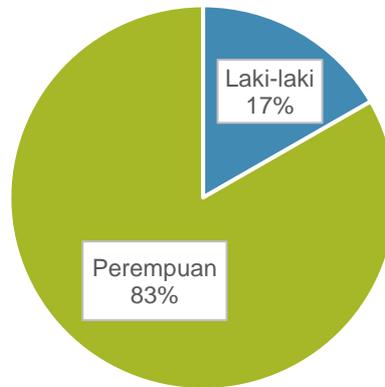
Gambar 1.9 SDM Non PNS Berdasarkan Pendidikan



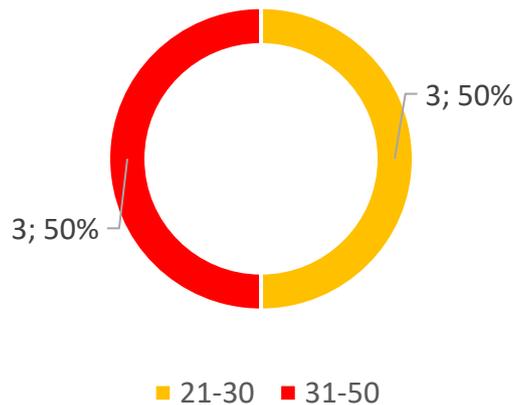
Gambar 1.10 SDM Non PNS Berdasarkan Jabatan

1.3.2.3 PPPK

Jumlah Pegawai PPPK Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan total berjumlah 6 (enam) orang yang terdiri dari 5 (lima) orang berjenis kelamin laki-laki dan 1 (satu) orang berjenis kelamin perempuan, yang dapat dilihat pada Gambar 1.11, sedangkan komposisi Pegawai PPPK Tahun 2024 berdasarkan usia terdiri dari 3 orang berusia 20 - 30 tahun (50%), dan 3 orang berusia 31-50 tahun (50%). Hal ini dapat dilihat pada Gambar 1.12.



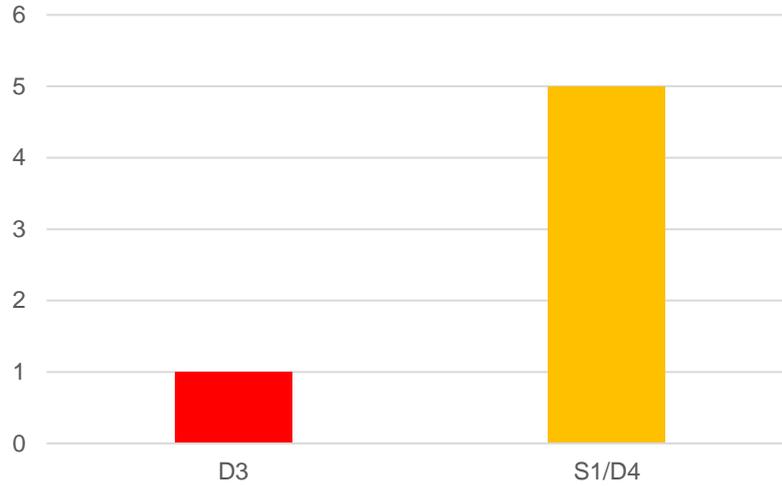
Gambar 1.11 SDM PPPK Berdasarkan Gender



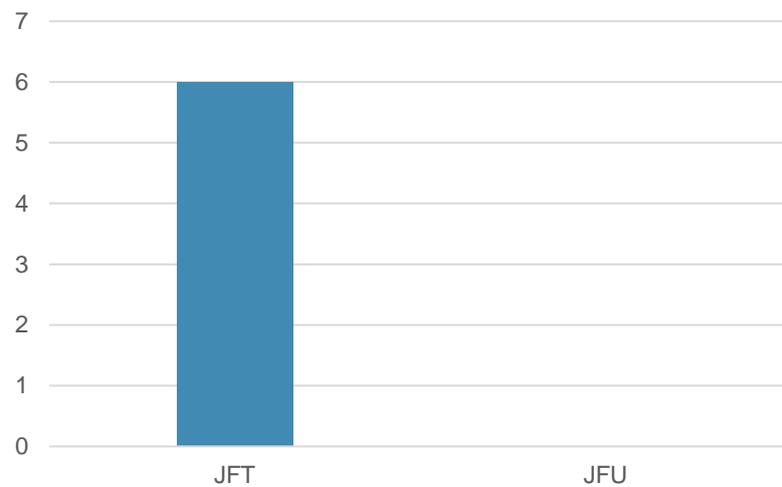
Gambar 1.12 SDM PPPK Berdasarkan Usia

Komposisi Pegawai PPPK Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan Tahun 2024 berdasarkan tingkat pendidikan terdiri dari 5 orang tingkat S1/D4 dan 1 orang tingkat D3 yang dapat dilihat pada Gambar 1.13. Sedangkan Komposisi Pegawai PPPK berdasarkan jabatan dapat dilihat pada Gambar 1.14.





Gambar 1.13 SDM PPPK Berdasarkan Pendidikan



Gambar 1.14 SDM PPPK Berdasarkan Jabatan

1.4 Sarana dan Prasarana

1.4.1 Sarana dan Prasarana Fisik

Aset BMN yang dimiliki Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan dari Bulan Januari 2024 – Desember 2024. Adapun data rincian aset BMN Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan per bulan Desember dapat dilihat berdasarkan Tabel 1.1.



Tabel 1.1 Rincian Aset BMN Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan

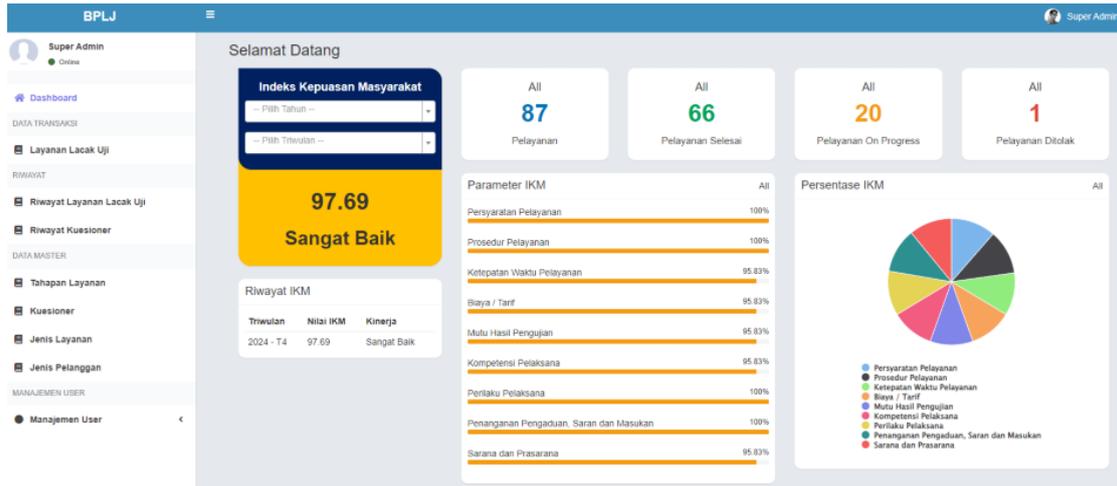
AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2024	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132111	Peralatan dan Mesin		535	3,947,487,215	84	53,645,945,914	1	2,967,000	618	57,590,466,129
30103	ALAT BANTU	-	4	10,718,540	2	5,934,000	1	2,967,000	5	13,685,540
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	1	38,792,784	11	3,585,169,233	0	0	12	3,623,962,017
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	-	1	1,429,680	0	0	0	0	1	1,429,680
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	-	9	26,873,100	0	0	0	0	9	26,873,100
30303	ALAT UKUR	-	9	183,484,050	2	332,034,800	0	0	11	515,518,850
30501	ALAT KANTOR	-	56	218,611,914	11	55,432,300	0	0	67	274,044,214
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	299	1,470,757,364	43	275,598,197	0	0	342	1,746,355,561
30601	ALAT STUDIO	-	11	171,078,350	4	3,848,361,334	0	0	15	4,019,439,684
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	20	75,717,100	1	9,747,000	0	0	21	85,464,100
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	-	3	17,281,000	8	45,488,817,050	0	0	11	45,506,098,050
31001	KOMPUTER UNIT	-	83	1,577,486,415	1	16,995,000	0	0	84	1,594,481,415
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	36	145,444,918	0	0	0	0	36	145,444,918
31101	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	-	2	4,972,000	0	0	0	0	2	4,972,000
31901	PERALATAN OLAH RAGA	-	1	4,840,000	1	27,857,000	0	0	2	32,697,000
TOTAL				3,947,487,215		53,645,945,914		2,967,000		57,590,466,129

1.4.2 Teknologi Informasi

Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan melakukan pembuatan sistem/ teknologi informasi yang menunjang kinerja di lingkungan Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan, diantaranya:

1. LACAK UJI (Layanan Pencarian dan Kuesioner Pengujian)

Merupakan aplikasi Layanan Pencarian dan Kuesioner Pengujian yang bermanfaat dalam memberikan transparansi proses layanan teknis (lihat Gambar 1.15).



Gambar 1.15 Tangkapan Layar Aplikasi LACAK UJI

2. e-Satker

Aplikasi yang digunakan untuk mempermudah pengajuan perjalanan dinas karena persetujuan pimpinan dapat dilakukan secara online (lihat Gambar 1.16).

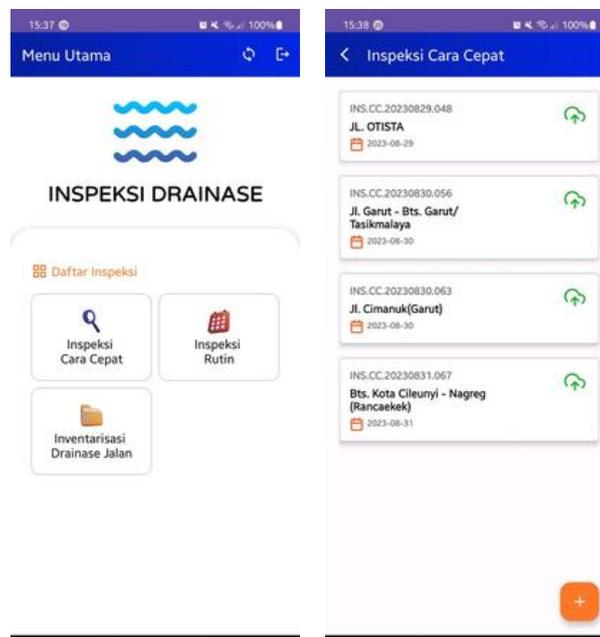




Gambar 1.16 Tangkapan Layar Aplikasi e-Satker

3. InDrain (Inspeksi Drainase)

Inspeksi drainase merupakan aplikasi web-based untuk memperoleh data penilaian cepat drainase jalan yang akurat dan telah tervalidasi sehingga penyusunan program pemeliharaan lebih tepat mutu dan tepat anggaran melalui pemutakhiran pedoman inspeksi cara cepat drainase jalan dan aplikasi InDrain untuk survei cara cepat drainase jalan (lihat Gambar 1.17).



Gambar 1.17 Tangkapan Layar Aplikasi InDrain

1.5 Isu Strategis

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020, BPLJ merupakan salah satu unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Bina Marga yang bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Marga melalui Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan. BPLJ berperan dalam penyediaan rekomendasi kebijakan dan layanan teknis kepada *stakeholders*, terutama unit-unit kerja di Direktorat Jenderal Bina



Marga seluruh Indonesia, dan yang terkait di bidang perkerasan jalan, lingkungan jalan, serta peralatan survei.

Dalam pemenuhan tugas dan fungsinya dalam mendukung konektivitas jalan nasional, sepanjang tahun anggaran 2024, BPLJ tentunya menghadapi beberapa isu strategis yang berpotensi mempengaruhi kinerja dan capaian. Isu strategis yang dihadapi BPLJ, antara lain:

1.5.1 Kemantapan dan Keselamatan Jalan

Kemantapan jalan masih menjadi fokus pada tahun anggaran 2024. Kemantapan jalan yang dimaksud adalah untuk mencapai kondisi jalan yang memenuhi standar layanan tertentu. Kemantapan jalan diukur dengan indikator teknis, salah satunya adalah nilai ketidakrataan permukaan jalan (International Roughness Index/IRI) sebagai syarat keberterimaan proyek jalan di Indonesia, serta parameter lainnya seperti daya dukung struktur perkerasan untuk memprediksi faktor-faktor pengaruh dan model penurunan kondisi perkerasan, serta keberfungsian, dan keandalan sistem pengumpulan data kondisi drainase untuk mendukung program penanganan dan biaya pemeliharaan yang efektif dan efisien.

Selain itu, keselamatan jalan juga menjadi perhatian khusus mengingat tantangan yang dihadapi terkait dengan banyaknya kondisi jalan dengan kemiringan curam dan panjang, yang meningkatkan potensi bahaya bagi pengguna kendaraan.

Masih berkaitan dengan upaya mencapai konektivitas jalan pada dan untuk memenuhi kemantapan dan keselamatan jalan, kebijakan *Zero Over Dimension Over Loading* (ODOL) juga menjadi permasalahan. Penertiban batas muatan dan dimensi kendaraan dimaksudkan untuk menurunkan jumlah dan fatalitas kecelakaan kendaraan, menurunkan waktu tempuh kendaraan, sehingga menurunkan biaya logistik dan meningkatkan daya saing perdagangan Indonesia.

1.5.2 Perubahan Iklim dan Pembangunan Berkelanjutan

Perubahan iklim merupakan salah satu tantangan terbesar dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Fenomena seperti peningkatan suhu global, penurunan muka air tanah, dan kenaikan permukaan laut telah memicu intensitas banjir rob, terutama di wilayah pesisir. Dampak ini tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga infrastruktur vital seperti jalan yang mengalami kerusakan dan gangguan aksesibilitas. Dalam konteks pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), adaptasi terhadap perubahan iklim menjadi prioritas strategis. Dengan langkah ini, pembangunan IKN tidak hanya tanggap terhadap perubahan iklim, tetapi juga mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya pada aspek infrastruktur tangguh dan aksi iklim.

1.5.3 Harmonisasi Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK)

NSPK di bidang jalan dan jembatan bertujuan memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun memiliki kualitas yang andal. Dengan banyak diterbitkannya pedoman baru yang menjadi acuan di bidang ini, diperlukan reviu dan evaluasi untuk menjamin integrasi antar NSPK dalam penerapannya di lapangan. Untuk menyediakan kepastian hukum dan pedoman yang jelas, harmonisasi NSPK menjadi langkah penting agar seluruh acuan saling terintegrasi dan dapat diterapkan tanpa menimbulkan perbedaan interpretasi atau pemahaman dalam satu kerangka hukum yang sama. Selain itu, muncul isu terhadap NSPK yang telah diterbitkan, sehingga diperlukan sosialisasi dan internalisasi yang lebih mendalam terhadap NSPK tersebut.

1.5.4 Penggunaan Teknologi dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0

Merespons fenomena otomatisasi, BPLJ terus melakukan inovasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Beberapa penggunaan teknologi yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran 2024, diantaranya untuk peningkatan dukungan penerapan teknis (Software Desain Perkerasan Jalan/SDPJ dan Aplikasi Inspeksi Drainase/Indrain), peningkatan pelayanan teknis (Media Informasi Kesiapan Alat/MIKA dan Layanan Pencarian dan Kuesioner Pengujian/Lacak Uji), serta peningkatan efisiensi dukungan manajemen (e-Satker) dan peralihan pemanfaatan Google Workspace menjadi Microsoft 365.

1.5.5 Penggunaan Produk dalam Negeri dan Efisiensi Anggaran

Permasalahan terkait kebijakan penggunaan produk dalam negeri dan penggunaan e-katalog masih menjadi tantangan pada pelaksanaan tugas dan fungsi BPLJ. Pengadaan barang dan jasa telah memerhatikan penggunaan produk dalam negeri dan e-katalog, namun pengadaan alat survei impor menjadi sulit untuk dilakukan. Tantangan untuk memperoleh kualitas yang distandarkan dihadapkan pada keterbatasan produk dalam negeri yang mampu mendukung kegiatan BPLJ. Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. PB.01.01-Mn/2775 perihal Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian PUPR, diperlukan izin untuk melakukan pengadaan barang impor.

Sementara pada penghujung periode RPJMN 2020-2024, adanya pergantian fokus kebijakan pemerintah dan perubahan prioritas dalam proses pelaksanaan anggaran yang menyebabkan perubahan kebijakan dalam hal efisiensi anggaran untuk alokasi anggaran. Revisi DIPA berulang kali masih menjadi isu yang dihadapi oleh BPLJ dalam hal perencanaan anggaran.

1.6 Sistematika Laporan

Dalam penyajian laporan kinerja Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan terdapat sistematika pelaporan meliputi:

Bab 1 Pendahuluan

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang penyusunan laporan kinerja, penjelasan umum organisasi meliputi tugas, fungsi dan struktur organisasi termasuk sumber daya manusia, sarana dan prasarana, aspek strategis dan isu/permasalahan utama yang sedang dihadapi oleh Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan

Bab 2 Perencanaan Kinerja

Pada bab ini dijelaskan mengenai visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, program/kegiatan dalam renstra dan ikhtisar perjanjian kinerja (PK) yang disajikan melalui uraian renstra Kementerian PUPR 2020-2024, Perjanjian Kinerja Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan 2024, metode pengukuran dan target kinerja BPLJ tahun 2024 menurut Renstra

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai upaya peningkatan Akuntabilitas Kinerja, capaian kinerja unit kerja/ UPT, analisis perbandingan kinerja unit kerja/ UPT, analisis realisasi anggaran, efisiensi penggunaan sumber daya, pemanfaatan laporan kinerja, paket diresmikan, survei kepuasan masyarakat (SKM) atas penggunaan layanan publik.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja, faktor pendukung keberhasilan, permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, serta rekomendasi dan langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk memperbaiki kondisi dan meningkatkan kinerja.

Lampiran

Lampiran memuat dokumen pendukung laporan kinerja, meliputi Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2024, Perjanjian Kinerja Revisi Tahun 2024, Data Catatan Kaki Laporan Kinerja, dan Dokumentasi kegiatan.



BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Uraian Singkat Restra BPLJ

2.1.1 Penjabaran Visi dan Misi

Visi Kementerian PUPR 2020-2024 yang disesuaikan dengan dukungan terhadap pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 dalam RPJMN 2020-2024, adalah sebagai berikut:

VISI (Kementerian PUPR)

Kementerian PUPR yang andal, responsif, inovatif dan profesional dalam pelayanan kepada presiden dan wakil presiden untuk mewujudkan visi dan misi presiden dan wakil presiden: “Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Misi Kementerian PUPR yang tercantum dalam Renstra Kementerian PUPR sebagai dukungan dalam melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden adalah sebagai berikut:

MISI (Kementerian PUPR)

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif yang responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan dan penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Menyelenggarakan pembangunan, pelayanan dan pengelolaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang andal dan terpadu dengan pengembangan wilayah serta memperhatikan kelestarian lingkungan.
3. Menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi yang berkualitas dan pengembangan inovasi penyelenggaraan pembangunan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
4. Meningkatkan profesionalisme SDM Aparatur, efisiensi dan efektivitas serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan pembangunan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Visi Kementerian PUPR kemudian diejawantahkan ke dalam bentuk tujuan dan sasaran strategis sebagai ukuran kinerjanya. Direktorat Jenderal Bina Marga sebagai salah satu unit organisasi di bawah Kementerian PUPR yang menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan mendapatkan amanah untuk meningkatkan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan



pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing dengan sasaran strategis meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional, dengan indikator kinerja waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (dalam jam per 100 km). Sehingga misi Direktorat Jenderal Bina Marga dirumuskan sebagai berikut:

Misi Direktorat Jenderal Bina Marga

M.1 Meningkatkan KONEKTIVITAS dan PELAYANAN jalan nasional;

M.2 Meningkatkan EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN jalan nasional;

Adapun penjabaran dari misi Direktorat Jenderal Bina Marga tahun 2020–2024 adalah:

1. Misi 1 (M.1) merupakan misi yang berkaitan dengan komitmen Direktorat Jenderal Bina Marga dalam menyediakan konektivitas dan pelayanan jalan nasional. Konektivitas merupakan mandat dari Presiden Republik Indonesia 2020–2024 yang melalui RPJMN 2020-2024 menginginkan terwujudnya konektivitas jalan nasional melalui indikator waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau menjadi minimal 1,9 jam per 100 km. Sedangkan pelayanan jalan merupakan pelaksanaan dari mandat pasal 37 (1) UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang menyatakan bahwa hasil penyelenggaraan jalan harus memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) yang meliputi: aksesibilitas, mobilitas, keselamatan, kondisi jalan dan kecepatan.
2. Misi 2 (M.2) merupakan misi internal (yang menjadi institution concern) berkaitan dengan upaya dari Direktorat Jenderal Bina Marga untuk meningkatkan kemampuannya (secara andal, profesional, inovatif, dan berintegritas) dalam melaksanakan program penyelenggaraan jalan nasional secara efektif dan efisien. Dimana cakupan kegiatan penyelenggaraan jalan yang sesuai dengan pasal 1 UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.

Tujuan Ditjen Bina Marga dalam menyelenggarakan jalan nasional pada periode 2020–2024 terdiri dari 4 (empat) butir sebagai berikut:

1. Mewujudkan konektivitas jalan nasional yang andal dan prima dalam mendukung perwujudan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong;
2. Meningkatkan standar pelayanan jalan nasional sesuai kebutuhan dan standar;
3. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan teknis dalam program penyelenggaraan jalan nasional; dan
4. Meningkatkan kualitas sumber daya dan kelembagaan di lingkungan Ditjen Bina Marga.

Adapun sasaran strategis Ditjen Bina Marga tahun 2020–2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional



- a. Peningkatan pelaksanaan preservasi dan tingkat kapasitas jalan nasional;
 - b. Pencapaian pengaturan, pengusahaan dan pengawasan jalan tol; dan
 - c. Peningkatan pengaturan dan pembinaan penyelenggaraan jalan dan jembatan.
2. Meningkatnya kualitas manajemen birokrasi yang profesional dan akuntabel, kebijakan dan strategi serta pelaksanaan tugas teknis lainnya.

2.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi BPLJ

BPLJ akan mendukung secara penuh strategi implementasi dari arah kebijakan Direktorat Jenderal Bina Marga untuk periode 2020 hingga 2024. Arah kebijakan dan strategi BPLJ adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan dan penerapan teknologi perkerasan dan lingkungan jalan
Pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi yang dilakukan untuk mendukung direktorat-direktorat di Ditjen Bina Marga di bidang perkerasan dan lingkungan jalan. Kegiatan pengembangan dan penerapan teknologi di BPLJ adalah:
 - 1) Peningkatan kompetensi SDM dalam pengembangan teknologi di bidang perkerasan dan lingkungan jalan
 - 2) Pemenuhan SDM dengan jabatan fungsional perekayasa untuk menunjang kegiatan keperekayasaan bidang perkerasan dan lingkungan jalan
 - 3) Peningkatan kerjasama dengan perusahaan, universitas, atau instansi lain yang bergerak di bidang iptek perkerasan dan lingkungan jalan
 - 4) Penyusunan kajian kebijakan untuk mendukung penyusunan NSPK di bidang perkerasan dan lingkungan jalan
 - 5) Pelaksanaan kajian kesiapterapan teknologi perkerasan dan lingkungan jalan untuk nya di Indonesia
 - 6) Pelaksanaan kliring teknologi untuk mendukung pengembangan teknologi di bidang perkerasan dan lingkungan jalan
- b. Pelaksanaan layanan teknis
Layanan teknis BPLJ meliputi penilaian kualitas konstruksi, pengkajian dan advis teknis untuk perencanaan teknis maupun pelaksanaan konstruksi, dan mitigasi bencana di bidang struktur perkerasan dan drainase jalan, analisis beban lalu lintas, lingkungan jalan, keselamatan jalan, dan instrumentasi dan peralatan survei atau inspeksi serta layanan pengujian laboratorium untuk mendukung balai pelaksana jalan. Kegiatan layanan teknis dijabarkan sebagai berikut:
 - 1) Penilaian kualitas konstruksi melalui penyediaan pengujian dan kalibrasi baik di laboratorium maupun di lapangan;
 - 2) Pelaksanaan advis teknis terkait permasalahan di lapangan di bidang perkerasan dan lingkungan jalan;

- 3) Penyusunan rekomendasi teknis untuk kajian permasalahan di lapangan yang mendalam di bidang perkerasan dan lingkungan jalan; dan
- 4) Pelaksanaan mitigasi bencana alam di bidang perkerasan dan lingkungan jalan.

c. Penerapan zona integritas

- 1) Pembentukan kelompok kerja (Pokja) zona integritas yang terdiri dari Manajemen Perubahan, Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penataan Tata Laksana, dan Sekretariat;
- 2) Pembentukan Agen Perubahan;
- 3) Pembaharuan website BPLJ;
- 4) Integrasi aplikasi LACAK UJI dengan website BPLJ;
- 5) Pelaksanaan sosialisasi kepada pegawai dan *stakeholder* terkait tentang Zona Integritas; dan
- 6) Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016.

2.1.3 Program dan Kegiatan BPLJ

Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan (BPLJ) memiliki peran yang strategis di dalam mendukung Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga untuk melaksanakan pengembangan dan penerapan teknologi dalam penyediaan rekomendasi kebijakan yang tidak hanya berdasarkan kaidah keilmiah tetapi juga implementatif serta memberikan layanan teknis di bidang perkerasan jalan, lingkungan jalan, dan peralatan survei.

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis Ditjen Bina Marga, pada tahun 2020–2024, program kegiatan di BPLJ disusun dengan bertujuan untuk:

1. Melakukan layanan keteknikan di bidang perkerasan dan lingkungan jalan dalam mengatur dan membina penyelenggaraan jalan dan jembatan berupa 5 (lima) dokumen teknologi bidang jalan dan jembatan yang dikembangkan dan 100% tingkat fasilitasi pengujian laboratorium dan advis teknik; serta
2. Melakukan peningkatan efektivitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan jalan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas manajemen birokrasi Ditjen Bina Marga.

Sasaran kegiatan BPLJ merupakan penjabaran dari tujuan sebagai ukuran tercapainya hasil (output) kegiatan dalam periode lima tahun ke depan (2020–2024). Untuk dapat memenuhi kebutuhan *stakeholders* dan pengguna layanan dari BPLJ maka dirumuskan sasaran kegiatan BPLJ tahun 2020–2024 adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya pengembangan teknologi bidang perkerasan dan lingkungan jalan dengan indikator kinerja dihitung dari jumlah teknologi yang dihasilkan; dan

2. Terlaksananya pengujian laboratorium dan advis teknik dengan indikator tingkat fasilitas 100%.

Sasaran dan indikator kinerja kegiatan BPLJ tahun 2020 sampai tahun 2024 dapat dilihat melalui *cascading* pada Tabel 2.1. Sedangkan untuk jumlah output dari indikator kinerja kegiatan dirangkum pada Tabel 2.2.

Tabel 2.1 Cascading Renstra BPLJ (2020-2024)

SS	IKSS	SP	IKSP	SK	IKK	Output Fisik	Output Non Fisik
Meningkatnya Konektivitas Jaringan Jalan Nasional	Waktu Tempuh pada jalan lintas utama pulau	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional (persentase pusat kegiatan dan simpul strategis nasional yang diakses jalan nasional)	Peningkatan Pengaturan dan Pembinaan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Teknologi bidang jalan dan jembatan yang dikembangkan	Jumlah dokumen pengembangan teknologi bidang Jalan dan Jembatan	Jumlah dokumen layanan pengujian laboratorium dan advis teknik
			Rating Kondisi Jalan Nasional (Nilai gabungan antara nilai IRI, PCI, umur struktur jalan, dan drainase jalan pada seluruh ruas jalan nasional)		Tingkat fasilitas pengujian laboratorium dan advis teknik		
			Rating keselamatan jalan nasional (Nilai gabungan antara angka kecelakaan per populasi dan dan jumlah titik blackspot per populasi)				
		Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Peningkatan efektivitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan jalan	Layanan Sarana dan Prasarana Internal			
						Layanan Dukungan Manajemen Satker	
						Layanan Perkantoran	

Keterangan:

SS	Sasaran Strategis
IKSS	Indikator Kinerja Sasaran Strategis
SP	Sasaran Program
IKSP	Indikator Kinerja Sasaran Program
SK	Sasaran Kegiatan
IKK	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan

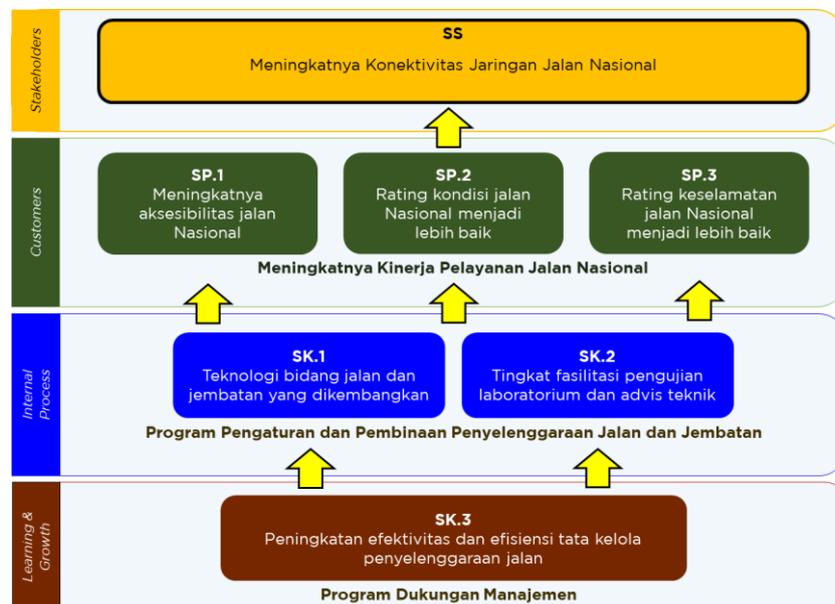
Tabel 2.2 Output Indikator Kinerja BPLJ (2020-2024)

Indikator Kinerja	Satuan	Target						
		2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	
UNIT PELAKSANA TEKNIS: BALAI PERKERASAN DAN LINGKUNGAN JALAN								
KEGIATAN: Pengaturan dan Pembinaan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan								
SASARAN KEGIATAN: Peningkatan Pengaturan dan Pembinaan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan								
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:								
1	Layanan keteknikan bidang jalan dan jembatan							
Parameter	Teknologi bidang jalan dan jembatan yang dikembangkan	Jumlah	1	1	1	1	1	5
Output	Jumlah dokumen pengembangan teknologi bidang Jalan dan Jembatan	Dokumen	1	1	1	1	1	5



Indikator Kinerja		Satuan	Target					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
<i>Parameter</i>	Tingkat fasilitasi pengujian laboratorium dan advis teknik	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
<i>Output</i>	Jumlah dokumen layanan pengujian laboratorium dan advis teknik	Dokumen	1	1	1	1	1	5
KEGIATAN: Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga								
SASARAN KEGIATAN: Peningkatan efektivitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan jalan								
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:								
1	Layanan Sarana dan Prasarana Internal							
	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	1	1	1	1	1	5
2	Layanan Dukungan Manajemen Satker							
	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	1	1	1	1	1	5
3	Layanan Perkantoran							
	Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5

Dalam melaksanakan kegiatan, BPLJ melakukan beberapa pendekatan prespektif dengan konsep *Balanced Scorecard* (BSC) dalam merumuskan sasaran. Sasaran kegiatan dibagi menjadi 4 perspektif, yaitu perspektif *stakeholders*, perspektif *customers*, perspektif *internal process* dan perspektif *learning and growth*. Deskripsi penerapan BSC tersebut diilustrasikan dalam bentuk peta strategi sebagaimana disampaikan pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Peta Strategi Renstra BPLJ



2.2 Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB No. 53 Tahun 2014, Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

2.2.1 Perbandingan PK Awal dan PK Revisi Tahun 2024

Perjanjian Kinerja (PK) BPLJ Tahun 2024 mengalami satu kali perubahan yaitu PK Awal dan PK Revisi. PK Awal ditetapkan pada bulan Januari 2024, sedangkan PK Revisi disusun pada bulan Desember 2024 setelah adanya perubahan revisi DIPA BPLJ revisi 9. Adapun Perbandingan PK Awal dan Revisi dapat dilihat pada Tabel 2.3 dan Tabel 2.4. Sedangkan dokumen PK Awal dan Revisi dapat dilihat pada Gambar 2.2 dan Gambar 2.3.

Tabel 2.3 Perbandingan parameter IKP pada PK Awal dan PK Revisi Tahun 2024 (*Output*)

NO	OUTPUT	SAT	TARGET		KET
			PK AWAL	PK REVISI	
Sasaran Program: Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional					
IKP 3: Rating Keselamatan Jalan Nasional					
Parameter	Tingkat fasilitasi pengujian laboratorium dan advis teknik	%	100	100	
Parameter	Teknologi bidang jalan dan jembatan yang dikembangkan	Dokumen	1	1	
Sasaran Program: Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya					
IKP: Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR					
Parameter	Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	%	100	100	
Total Anggaran		Rp 12.172.126.000,00			



Tabel 2.4 Perbandingan Indikator Kinerja Kegiatan Pada PK Awal dan PK Revisi Tahun 2024 (Output)

NO	OUTPUT	SAT	TARGET		KET
			PK AWAL	PK REVISI	
Sasaran Program: Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional					
IKP 3: Rating Keselamatan Jalan Nasional					
IKK: Tingkat Pelayanan Ketechnikan Bidang Jalan dan Jembatan		%	100	100	
1	ABF 001	Layanan Ketechnikan Bidang Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	1	1
Sasaran Program: Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya					
IKP: Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR					
IKK: Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola		%	100	100	
1	EBA 960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	1	1
2	EBA 994	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1
3	EBB 951	Layanan Sarana Internal	Unit	1	1

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PERKERASAN DAN LINGKUNGAN JALAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Baseline 2023	Target 2024
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	IKSP : Rating Keselamatan Jalan Nasional		
	IKK : Tingkat kualitas layanan ketechnikan bidang jalan dan jembatan	100 %	100.00 %
	Parameter <i>Tingkat fasilitas pengujian laboratorium dan advis teknik</i>	100.00 %	100.00 %
	Parameter <i>Teknologi bidang jalan dan jembatan yang dikembangkan</i>	1.00	1.00
	Rincian Output		
ABF 001	Layanan Ketechnikan Bidang Jalan dan Jembatan	1.00 Rekomendasi Kebijakan	1.00 Rekomendasi Kebijakan
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	IKSP : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR		
	IKK : Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Jalan	100 %	100.00 %
	Parameter <i>Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR</i>	100.00 %	100.00 %
	Rincian Output		
	EBA 960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.00 Layanan
EBA 994	Layanan Perkantoran	1.00 Layanan	1.00 Layanan
EBB 951	Layanan Sarana Internal	1.00 Unit	1.00 Unit

Kegiatan :
1. Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional
2. Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga
Total Anggaran

Anggaran
Rp 7,522,743,000
Rp 4,649,383,000
Rp 12,172,126,000

Bandung, 05 Januari 2024
Kepala Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan

Direktur Jenderal Bina Marga,
Direktorat Jenderal Bina Marga
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Kepala Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan

Gambar 2.2 Perjanjian Kinerja Awal BPLJ Tahun 2024



REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PERKERASAN DAN LINGKUNGAN JALAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	BASELINE 2023	TARGET 2024
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	IKSP : Rating Keselamatan Jalan Nasional		
	IKK : Tingkat kualitas layanan keteknikan bidang jalan dan jembatan	100 %	100,00 %
	Parameter : Tingkat fasilitas pengujian laboratorium dan advice teknik	100,00 %	100,00 %
	Parameter : Teknologi bidang jalan dan jembatan yang dikembangkan	1,00	1,00
	Rincian Output		
	ABF.001 Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan	1,00 Rekomendasi Kebijakan	1,00 Rekomendasi Kebijakan
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	IKSP : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR		
	IKK : Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Jalan	100 %	100,00 %
	Parameter : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	100,00 %	100,00 %
	Rincian Output		
	EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1,00 Layanan	1,00 Layanan
	EBA.904 Layanan Perkantoran	1,00 Layanan	1,00 Layanan
EBB.951 Layanan Sarana Internal	1,00 Unit	1,00 Unit	

Kegiatan :

1. Pengaturan dan Pembinaan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
2. Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga

Total Anggaran

Anggaran

Rp. 7.282.690.000

Rp. 4.999.041.000

Rp. 12.181.731.000

DIREKTOR JENDERAL BINA MARGA
RACHMAN ABIF DIENAPUTRA

BANDUNG, 11 DESEMBER 2024

KEPALA BALAI PERKERASAN DAN LINGKUNGAN JALAN
NENI KUSMANTI

Gambar 2.3 Perjanjian Kinerja Revisi BPLJ Tahun 2024

2.3 Metode Pengukuran

Dalam rangka memenuhi kebutuhan *stakeholders* dan pengguna layanan BPLJ maka sebagai salah satu persyaratan terciptanya kinerja yang terencana dan terukur, dibutuhkan pengukuran kinerja untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan pada setiap tahun anggaran sehingga dapat menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Capaian kinerja setiap indikator kinerja tersebut harus diukur dan dilaporkan dalam dokumen Lakin (Laporan Kinerja) pada tiap tahunnya. Pengukuran kinerja diperlukan selain untuk menginformasikan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan jalan, juga digunakan sebagai alat evaluasi tentang berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi jika terdapat hambatan dan ketidakberhasilan dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan sehingga dapat disusun kebijakan dan strategi penanganannya.

BPLJ menggunakan dua jenis indikator kinerja, yaitu indikator kinerja kegiatan yang sesuai Perjanjian Kinerja dan indikator kinerja utama yang berlaku internal sesuai dengan Renstra BPLJ. Pengukuran kinerja Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan dilakukan dengan cara sebagai berikut:



1. Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja Keseluruhan

Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja Keseluruhan dilakukan dengan cara menghitung realisasi output terhadap target capaian setiap indikator di tahun berjalan, serta mengubahnya ke dalam persentase untuk mengetahui tingkat pencapaian setiap output tersebut, kemudian dijumlahkan untuk seluruh indikator dan dirata-ratakan. Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja keseluruhan yang terdapat pada Renstra Dirjen Bina Marga 2020-2024 dihitung dari rerata persentase indikator:

- a. Teknologi bidang jalan dan jembatan yang dikembangkan (1 dokumen);
- b. Tingkat fasilitasi pengujian laboratorium dan advis teknik (100%);

Rumus untuk menghitung persentase capaian kinerja keseluruhan adalah sebagai berikut:

$$\sigma = \frac{a + b}{2}$$

Output dari parameter Teknologi Bidang Jalan dan jembatan yang dikembangkan adalah 1 (satu) dokumen setiap tahunnya yang berisi beberapa kajian kebijakan, rekomendasi teknis, dan pengembangan alat baik perangkat keras maupun perangkat lunak untuk survei atau inspeksi di bidang perkerasan dan lingkungan jalan sehingga teknologi-teknologi yang dibutuhkan oleh Balai Pelaksana Jalan siap untuk diterapkan guna mendukung tercapainya sasaran-sasaran strategis Direktorat Jenderal Bina Marga. Sedangkan untuk Parameter tingkat fasilitasi pengujian laboratorium dan advis teknik, output berupa 1 (satu) dokumen per tahun dengan rincian beberapa pengujian dan advis teknik yang difasilitasi. Tingkat fasilitasi pelayanan dengan presentase 100% yaitu dengan dasar penilaian adalah sebagai jumlah pengujian dan advis teknik yang direspon oleh BPLJ baik itu diterima maupun ditolak.

2. Pengukuran Kinerja Setiap Indikator Kinerja

Pengukuran kinerja setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dilakukan dengan melakukan perbandingan antara jumlah target dengan jumlah capaian Kinerja. Pengukuran kinerja terhadap output kegiatan dilakukan dengan membandingkan jumlah output yang dicapai pada tahun anggaran berjalan dengan target keseluruhan Renstra, kemudian diubah menjadi bentuk persentase. Perhitungan capaian output dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Output} = \frac{\text{Capaian Output Tahun Berjalan}}{\text{Target Jumlah Output Keseluruhan}} \times 100\%$$

Pengukuran pencapaian parameter indikator kinerja teknologi jalan dan jembatan yang dikembangkan disusun berupa pelaporan pengkajian kebijakan maupun teknologi bidang perkerasan dan lingkungan jalan yang dikembangkan yang disusun dalam bentuk dokumen Kajian Rekomendasi Kebijakan Bidang Perkerasan dan Lingkungan Jalan.

Sedangkan pencapaian parameter indikator kinerja tingkat fasilitasi pengujian laboratorium dan advis teknik diukur dengan membandingkan jumlah layanan teknis yang ditindaklanjuti (diterima/ditolak) dibandingkan terhadap jumlah permohonan layanan teknis.

$$\text{Tingkat Fasilitasi Layanan Teknis} = \frac{\text{Jumlah Layanan Teknis yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Permohonan Layanan Teknis}} \times 100\%$$

3. Pengukuran Kinerja Indikator Kinerja Internal

Agar didapat pengukuran kinerja yang sesuai dengan ketentuan SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-Bond*), BPLJ menyusun metode pengukuran kinerja internal yang didasarkan atas parameter indikator kinerja utama pada Renstra BPLJ. Metode perhitungan parameter untuk setiap indikator teknis pada tahun 2024 disesuaikan melalui SK Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 di Lingkungan Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan beserta Perubahannya yang dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5 Pengukuran Indikator Kinerja BPLJ

No	Parameter	Pengukuran Parameter	Penjelasan Pengukuran
1.	Teknologi bidang jalan dan jembatan yang dikembangkan	Persentase penyampaian teknologi bidang jalan dan jembatan yang dikembangkan	$\frac{\text{Jumlah diterapkannya kajian teknologi dan rekomendasi kebijakan}}{\text{Jumlah kajian teknologi dan rekomendasi kebijakan yang disampaikan}} \times 100$
2.	Tingkat fasilitasi pengujian laboratorium dan advis teknik	Persentase kepuasan pelanggan fasilitasi pengujian laboratorium dan advis teknik	Perhitungan persentase kepuasan pelanggan mengikuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik

Untuk selanjutnya pencapaian masing-masing parameter dibandingkan dengan target yang mengacu kepada Rencana Strategis Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan 2020-2024.

Perhitungan persentase output diperoleh dari membagi jumlah penerapan kajian dengan jumlah kajian yang disampaikan dalam satu tahun. Penerapan diukur melalui surat penyampaian ke *stakeholder* yang membutuhkan, pelatihan, sosialisasi yang berisi beberapa kajian teknologi, rekomendasi kebijakan, dan pengembangan alat baik perangkat keras maupun perangkat lunak untuk survei atau inspeksi di bidang perkerasan lingkungan jalan yang selanjutnya diterapkan sehingga teknologi-teknologi yang dibutuhkan oleh *stakeholder* terkait khususnya Direktorat Bina Teknik dan Balai Pelaksana Jalan telah diterapkan guna



mendukung tercapainya sasaran-sasaran strategis Direktorat Jenderal Bina Marga. Sedangkan untuk pelaksanaan pengujian, kliring teknologi, inspeksi, dan advis teknik, output diukur dari persentase kepuasan pelanggan yang menggunakan layanan BPLJ. Perhitungan persentase kepuasan pelanggan mengikuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik.

4. Penanggung jawab pengumpulan data dan pengukuran kinerja

Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan pada Tahun 2024, dilakukan oleh Tim Penyelenggara SAKIP BPLJ sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan Nomor: 09/KPTS/Bb.37/2024. Tim Penyelenggara SAKIP BPLJ tahun 2024 terdiri atas Penanggung Jawab, Pengawas, dan Tim Teknis.

Terkait dengan pengumpulan data dan pengukuran kinerja, masing-masing bagian Tim turut bekerjasama dalam pengumpulan data dan pengukuran kinerja, yang terdiri dari:

1. Penanggung Jawab, mempunyai tugas:
 - a. memberikan pengarahan umum kepada Tim Pelaksana untuk melakukan penyelenggaraan SAKIP di Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan Tahun 2024;
 - b. memfasilitasi tugas-tugas Tim Pelaksana.
2. Pengawas, mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan tugas sesuai dengan arahan dari penanggung jawab;
 - b. melaksanakan evaluasi AKIP pada satuan kerja di Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan;
 - c. memberikan rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil evaluasi AKIP pada Satuan Kerja di Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan; dan
 - d. melaksanakan pembahasan dan reviu terhadap rancangan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) sebelum akhirnya LHE ditandatangani oleh penanggung jawab evaluasi.
3. Tim Teknis, mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan tugas sesuai arahan Pengarah;
 - b. melaksanakan penyelenggaraan SAKIP Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan Tahun 2024;
 - c. menyusun Dokumen Rencana Aksi (RA) Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan Tahun 2024;
 - d. menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan Tahun 2024;

- e. menyusun Dokumen Laporan Monev Bulanan Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan Tahun 2024; dan
- f. menyusun Dokumen Laporan Kinerja (LAKIN) Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan Tahun 2024.

2.4 Target Kinerja Tahun Berjalan BPLJ

Penyusunan target kinerja tahun 2024 mengacu pada Rencana Strategis yang telah ditetapkan yaitu Renstra Bina Marga tahun 2020-2024 dan Renstra Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan tahun 2020-2024, adapun target kinerja Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan pada tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.6 dan Tabel 2.7.

Tabel 2.6 Sandingan Outcome dan Target pada Perjanjian Kinerja 2024 dengan Renstra 2024

NO	IKSP		SAT	TARGET			KET
				RENSTRA	PK AWAL	PK AKHIR	
Sasaran Program: Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional							
1	Rating Keselamatan Jalan Nasional						
	Parameter	Tingkat fasilitasi pengujian laboratorium dan advis teknik	%	100	100	100	
	Parameter	Teknologi bidang jalan dan jembatan yang dikembangkan	Dokumen	1	1	1	
Sasaran Program: Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya							
2	Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR						
	Parameter	Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	%	100	100	100	

Tabel 2.7 Sandingan Output dan Target pada Perjanjian Kinerja 2024 dengan Renstra 2024

NO	IKSP		SAT	TARGET			KET
				RENSTRA	PK AWAL	PK AKHIR	
Sasaran Program: Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional							
IKP 3: Rating Keselamatan Jalan Nasional							
1	ABF 001	Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	
Sasaran Program: Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya							
IKP: Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR							
2	EBA 960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	1	1	1	



NO	IKSP		SAT	TARGET			KET
				RENSTRA	PK AWAL	PK AKHIR	
2	EBA 994	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	
3	EBB 951	Layanan Sarana Internal	Unit	1	1	1	

Adapun indikator kinerja utama yang berlaku secara internal di BPLJ disusun sebagai upaya untuk mengukur keberhasilan dari sasaran kegiatan operasional sehingga memenuhi unsur SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time Bond*) disajikan dalam Tabel 2.8.

Tabel 2.8 Indikator Kinerja Utama BPLJ (2020-2024)

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target					
		2020	2021	2022	2023	2024	
UNIT PELAKSANA TEKNIS: BALAI PERKERASAN DAN LINGKUNGAN JALAN							
KEGIATAN: Pengaturan dan pembinaan penyelenggaraan jalan dan jembatan							
SASARAN KEGIATAN: Peningkatan pengaturan dan pembinaan penyelenggaraan jalan dan jembatan							
INDIKATOR KINERJA UTAMA: Tingkat Pelayanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan							
<i>Parameter</i>	Pelaksanaan kajian teknologi bidang jalan dan jembatan						
<i>Output</i>	Penyampaian kajian teknologi dan rekomendasi kebijakan	%	90	90	90	90	90
<i>Parameter</i>	Pelaksanaan pengujian, kliring teknologi, inspeksi, dan advis teknik						
<i>Output</i>	Kepuasan pelanggan	%	80	82	85	87	90

Output dari pelaksanaan kajian teknologi bidang perkerasan dan lingkungan jalan adalah persentase penyampaian kajian teknologi dan rekomendasi kebijakan ke direktorat-direktorat Ditjen Bina Marga, balai pelaksana jalan, dan instansi lain yang terkait dengan perkembangan teknologi di bidang perkerasan dan lingkungan jalan setiap tahunnya.

Output dari pelaksanaan pengujian, kliring teknologi, inspeksi, dan advis teknik adalah persentase kepuasan pelanggan yang layanannya diterima oleh balai perkerasan dan lingkungan jalan setiap tahunnya (rerata Indeks Kepuasan Masyarakat per triwulan dalam satu tahun).

Dalam menjamin terlaksananya efektivitas dan efisiensi di dalam proses internal balai untuk memenuhi harapan *stakeholders* dan *customers*, maka diperlukan upaya tata pengelolaan sumber daya melalui proses *learning and growth*, yang meliputi:



1. Peningkatan terhadap layanan sarana dan prasarana internal;
2. Peningkatan terhadap layanan
3. Peningkatan terhadap layanan umum; dan
4. Peningkatan terhadap layanan perkantoran

Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal adalah kegiatan pelayanan umum, pelayanan rumah tangga dan perlengkapan, termasuk pembangunan Zona Integritas dengan output 1 layanan. Layanan perkantoran terdiri dari kegiatan Gaji dan Tunjangan, Pemeliharaan Gedung Kantor, Sarana dan Prasarana, dan termasuk Operasional Perkantoran dengan output 1 layanan selama 12 bulan (1 tahun). Output dari layanan sarana dan prasarana internal adalah 1 unit.



BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Hasil evaluasi SAKIP Tahun Anggaran 2023 telah disampaikan berdasarkan Surat Nomor PW.0201-Bp/277 Perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan. Adapun pelaksanaan evaluasi SAKIP BPLJ Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta mengacu pada Peraturan Menteri PUPR No 09 /PRT/M/2018 tentang penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan SE Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 07/KPTS/Db/2023 tanggal 13 Januari 2023 tentang Tim Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Tahun 2023 di Direktorat Jenderal Bina Marga.

Fokus evaluasi SAKIP BPLJ meliputi evaluasi atas proses/penerapan SAKIP, evaluasi atas keluaran (*output*) dan evaluasi atas hasil (*outcome*) dengan cakupan evaluasi meliputi komponen: (1) Perencanaan Kerja, (2) Pengukuran Kinerja, (3) Pelaporan Kinerja, (4) Evaluasi Internal, dan (5) Pencapaian Sasaran/Kinerja. Berdasarkan penilaian komponen tersebut, maka implementasi atas SAKIP BPLJ Tahun Anggaran 2023 dikategorikan A (Memuaskan), akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal, dengan nilai angka 85,80%. Akan tetapi, terdapat beberapa catatan atas kelemahan yang masih ada, berikut adalah rekomendasi yang disampaikan oleh Tim Evaluasi sebagai bahan evaluasi BPLJ, sebagaimana tercantum pada Berita Acara Verifikasi Hasil Evaluasi SAKIP pada Tabel 3.1. Adapun dokumentasi kegiatan SAKIP BPLJ dapat dilihat pada Gambar 3.1.

Terhadap rekomendasi-rekomendasi tersebut, BPLJ telah menindaklanjuti beberapa rekomendasi. Berikut adalah beberapa catatan tindak lanjut atas rekomendasi-rekomendasi yang telah disampaikan:

a. Pada Perencanaan Kinerja:

- Poin a Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan telah menyusun Perjanjian Kinerja (PK) revisi 2024 pada tanggal 11 Desember 2024 yang sudah disesuaikan dengan perubahan pagu anggaran BPLJ.



Tabel 3.1 Rekomendasi dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP BPLJ

No.	Permasalahan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Bukti Dukung
1	Perencanaan Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> Melengkapi Laporan Kinerja tahun berjalan pada BAB IV dengan menyajikan perbandingan capaian kinerja dengan satuan kerja lain yang setara. Melakukan penyusunan dokumen perencanaan kinerja jangka pendek. Petunjuk Operasional Kegiatan disusun setiap tahun anggaran 	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Laporan Kinerja 2024 dengan melengkapi sub bab perbandingan capaian kinerja balai dengan satuan kerja lain yang setara Penyusunan Revisi Perjanjian Kinerja 2024 dan Perjanjian Kinerja 2025 sesuai dengan Renstra BPLJ 	
2.	Pengukuran Kinerja	Melengkapi dokumen terkait dengan pengukuran kinerja baik bukti dukung minimal sampai dengan bukti pendukung tambahan	Pengumpulan data usulan revisi anggaran kegiatan	
3.	Pelaporan Kinerja	Meningkatkan kegiatan-kegiatan yang melibatkan keikutsertaan pimpinan dalam pelaporan kinerja dan mendokumentasikannya untuk dapat menunjang pelaporan kinerja	Penyusunan bukti dukung money bulanan dan penilaian kinerja	<p>Laporan Monev Bulanan</p> 
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Rekomendasi atas evaluasi yang telah dilaksanakan untuk dapat ditindaklanjuti dalam rangka perbaikan dan peningkatan capaian kinerja pada tahun berikutnya.	Penyusunan Laporan Akhir kegiatan dan laporan kinerja tahunan	<p>Laporan LAKIN BPLJ 2024</p> 





Gambar 3.1 Dokumentasi diskusi pra penajaman anggaran, Rapat Moneyv bulanan, Reviu Renstra BPLJ, Pembahasan Laporan Kinerja TA 2024, Perjanjian Kinerja (PK) Revisi 2024, Penyusunan PK 2024, dan Penyusunan LAKIN BPLJ 2024

- Poin b Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan telah melengkapi bukti dukung penyempurnaan dokumen perencanaan untuk mewujudkan kondisi yang lebih baik. Pengumpulan dokumentasi revisi anggaran sesuai perubahan kebutuhan paket kegiatan untuk tahun anggaran 2024 telah dilaksanakan
- b. Pada Pengukuran Kinerja, dalam mempertahankan kinerja Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan melakukan diskusi dan pelaporan moneyv rutin bulanan.
- c. Pada Pelaporan Kinerja, telah disusun laporan monitoring dan evaluasi per bulan berisi uraian kegiatan dan hasil tindak lanjut terhadap bulan sebelumnya.
- d. Pada Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, telah disusun laporan laporan akhir kegiatan dan laporan kinerja tahunan akan dibandingkan evaluasi internal antara LKIP Tahun 2023 dan Tahun 2024.

3.2 Capaian Kinerja Organisasi

Dalam mengukur capaian kinerja, Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan telah menyusun rencana aksi yang dimonitoring melalui Laporan Monitoring dan Evaluasi sebagai bentuk monitoring terhadap pencapaian kinerja dan untuk meninjau hambatan-hambatan kinerja yang berpengaruh terhadap keberhasilan/kegagalan program. Selain itu agar didapat pengukuran capaian kinerja yang SMART Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan juga menyusun SK Indikator Kinerja Utama internal yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja sesuai dengan target internal Renstra BPLJ 2020-2024. Oleh karena itu, diharapkan sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dapat sepenuhnya tercapai. Capaian Kinerja Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan 2024 didapatkan dengan membandingkan antara realisasi yang dicapai/diterbitkan/disampaikan dengan target sesuai indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Balai

Perkerasan dan Lingkungan Jalan. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik dan semakin rendah menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk. Capaian kinerja Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan TA 2024 ditunjukkan pada Tabel 3.2 dan Tabel 3.3. Sedangkan berdasarkan pengukuran kinerja internal BPLJ berdasarkan SK IKU BPLJ 2024 didapat hasil pengukuran kinerja yang ditunjukkan pada Tabel 3.4.

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program TA.2024

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM		SAT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KET
Sasaran Program: Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional							
1	Rating Keselamatan Jalan Nasional						
	Parameter	Tingkat fasilitasi pengujian laboratorium dan advis teknik	%	100	100	100	
	Parameter	Teknologi bidang jalan dan jembatan yang dikembangkan	Dok	1	1	100	
Sasaran Program: Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya							
2	Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR		%	100	100	100	

Tabel 3.3 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	OUTPUT	SAT	TARGET		REALISASI	CAPAIAN(%)		KET
			AWAL (PK REVISI)	REVISI AKHIR		THD TARGET AWAL	THD TARGET REVISI AKHIR	
Sasaran Program: Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional								
IKP 3: Rating Keselamatan Jalan Nasional								
Indikator Kinerja Kegiatan								
1	ABF 001 Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	100	100	Tercapai
Sasaran Program: Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya								
IKP: Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR								
Indikator Kinerja Kegiatan								
2	EBA 960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	1	1	1	100	100	Tercapai



No	OUTPUT	SAT	TARGET		REALISASI	CAPAIAN(%)		KET
			AWAL (PK REVISI)	REVISI AKHIR		THD TARGET AWAL	THD TARGET REVISI AKHIR	
2	EBA 994 Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	100	100	Tercapai
3	EBB 951 Layanan Sarana Internal	Unit	1	1	1	100	100	Tercapai

Tabel 3.4 Capaian Kinerja IKU BPLJ 2024

No	Parameter	Pengukuran Parameter	Target Rensta BPLJ (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja TA 2024 (%)
1	Teknologi bidang jalan dan jembatan yang dikembangkan	Persentase penyampaian teknologi bidang jalan dan jembatan yang dikembangkan	90	92,86	103,18
2	Tingkat fasilitasi pengujian laboratorium dan advis teknik	Persentase kepuasan pelanggan fasilitasi pengujian laboratorium dan advis teknik	90	96,12	106,80

Pada subbab ini dijelaskan mengenai hasil pengukuran kinerja tahun anggaran 2024 serta perbandingannya antara target revisi akhir dengan realisasi. Adapun rincian dari pencapaian Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan untuk TA. 2024 adalah sebagai berikut:

A. Indikator Kinerja Kegiatan: Tingkat Pelayanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan

Indikator kinerja output yang dilakukan untuk mencapai indikator kinerja kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Fasilitasi Pengujian Laboratorium dan Advis Teknik

Sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan, BPLJ melaksanakan kegiatan layanan keteknikan di bidang perkerasan dan lingkungan jalan melalui kegiatan advis teknis, pendampingan teknis, dukungan survei kondisi jalan dan jembatan, kliring teknologi, layanan PNBK, serta layanan lainnya seperti narasumber maupun pembicara/instruktur.

Berdasarkan rekapitulasi yang dilakukan, pada tahun 2024 BPLJ menerima permintaan layanan teknis sejumlah 279 layanan. Terdapat 213 layanan teknis berupa kegiatan advis teknis meliputi advis teknis diskusi, advis teknis tinjauan lapangan, dan permohonan tenaga



ahli/narasumber. Advis teknis yang dilakukan umumnya berupa pemberian rekomendasi teknis atau saran terkait kerusakan atau keselamatan jalan, reviu desain jalan, penanganan kecelakaan lalu lintas, dan lingkungan jalan. Beberapa dokumentasi kegiatan advis teknis dapat dilihat pada Gambar 3.2. Sedangkan untuk kegiatan layanan pengujian pada tahun 2024 adalah sebanyak 66 layanan (PNBP dan Non PNBP) dimana sebanyak 37 layanan PNBP dan 29 layanan non PNBP. Dari 37 layanan PNBP yang terdiri dari 29 layanan diterima dan dilaksanakan, 2 layanan dibatalkan pelanggan, dan 6 layanan ditolak dikarenakan keterbatasan SDM. Sampai dengan akhir Desember total nilai PNBP BPLJ sebesar Rp 814.460.060,- dimana nilai tersebut telah mencapai target dari rencana Rp. 100.000.000,-. Pengujian yang dilakukan antara lain pengujian kekesatan jalan, ketidakrataan jalan, tekstur permukaan jalan, lendutan dengan menggunakan FWD atau LWD, Pengujian luminansi dan illuminansi lampu penerangan jalan, Pengukuran beban sumbu kendaraan menggunakan alat *Weight In Motion* (WIM), kalibrasi dan validasi LWD, dan validasi alat survey kondisi jalan. Sebagian dokumentasi kegiatan pengujian pada tahun 2024 dapat dilihat pada Gambar 3.3.

Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan (BPLJ) telah melakukan berbagai upaya peningkatan kualitas layanan berkelanjutan, untuk memastikan kualitas layanan telah memenuhi ekspektasi para pelanggan. Pemeliharaan alat menjadi salah satu prioritas utama, dengan tujuan menjaga agar semua peralatan berfungsi dengan baik dan sesuai standar. Hal ini dilakukan untuk mendukung kelancaran pengujian dan memastikan akurasi hasil yang diperoleh. Selain itu, pemeliharaan gedung juga dilakukan secara rutin guna menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman bagi pelanggan. Melalui pemeliharaan berkala dan renovasi gedung pelayanan, BPLJ berusaha menciptakan suasana yang mendukung produktivitas dan kenyamanan bagi semua pihak.

Selain pemeliharaan, BPLJ juga melakukan pembelian alat baru sebagai pengganti alat lama yang sudah tidak efektif atau mengalami penurunan performa. Dengan adanya alat baru yang lebih canggih dan modern, BPLJ dapat memperluas kapasitas dan kemampuannya dalam memberikan layanan yang lebih cepat dan akurat. Pembelian alat pengganti ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi proses pengujian serta memenuhi kebutuhan pelanggan yang semakin berkembang dan meningkat. Upaya tersebut menunjukkan komitmen BPLJ untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik dalam rangka mendukung berbagai sektor yang membutuhkan layanan pengujian di bidang perkerasan, geometrik, volume dan beban lalu lintas, dan perlengkapan jalan.



Advis Teknis Tinjauan Lapangan Sumbu Kebangsaan IKN



Advis Teknis Tinjauan Lapangan Kerusakan Jalan di Parung Panjang Kab. Bogor



Pendampingan Teknis Paket Pekerjaan di KIPP IKN



Internalisasi Manual Desain Perkerasan Jalan 2024



Verifikasi Dokumen Berita Acara RTA



Verifikasi Dokumen Berita Acara RTA

Gambar 3.2 Dokumentasi Layanan Teknis (1/2)





Pengujian Lendutan dengan *Falling Weight Deflectometer* di Jalan Tol Kayu Agung Palembang



Pengujian Ketidakrataan Jalan dengan Alat Kelas 1 Manual



Pengujian Lendutan dengan *Light Weight Deflectometer*



Pengujian Kekesatan Jalan



Pengujian Luminansi dan Illuminansi PJU



Kalibrasi dan Validasi Alat Kelas 1 Otomatis dengan Alat Kelas 1 Manual

Gambar 3.3 Dokumentasi Layanan Teknis (2/2)





Manfaat Kegiatan:

- Membantu menyelesaikan permasalahan bidang Perkerasan dan Lingkungan Jalan di BB/BPJN seluruh Indonesia baik pada tahapan perencanaan, pelaksanaan konstruksi maupun saat jalan tersebut telah beroperasi, sehingga dampaknya secara teknis jalan tersebut dapat melayani pengguna dengan baik.
- Membantu pihak terkait dalam melakukan survei /pengujian dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol sebagaimana yang dipersyaratkan dalam peraturan Menteri PU yang berlaku.
- Membantu pihak terkait dalam melakukan survei/pengujian di bidang perkerasan, geometrik, volume dan beban lalu lintas, dan perlengkapan jalan.

Kendala Kegiatan:

- Beberapa komponen alat sudah mencapai umur layannya.
- Pemohon belum bisa memenuhi prasyarat sebelum pengujian sebagaimana diminta oleh tim pelaksana (Balai).
- Banyaknya undangan pembahasan *online* dibandingkan dengan ketersediaan SDM dan waktu pelaksanaan.
- Ketersediaan data dukung layanan terutama notulensi rapat tidak tersedia secara lengkap.
- Banyaknya jumlah Berita Acara Rencana Teknis Akhir (RTA) Jalan Tol yang perlu diverifikasi dibanding SDM dan kegiatan internal.
- Keterlambatan output layanan teknis dari standar waktu yang ditetapkan.

Alternatif Solusi/Pemecahan Masalah/Langkah Antisipatif:

- Mengadakan program pelatihan atau sertifikasi peningkatan kompetensi teknis SDM BPLJ melalui pelaksanaan *In house training* substansi teknis bidang perkerasan dan lingkungan jalan.
- Pembelian komponen alat-alat uji dan melakukan pemeliharaan secara berkala sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
- Melakukan edukasi kepada pelanggan tentang pentingnya melakukan pengecekan lokasi pengujian terlebih dahulu sebelum menyampaikan permohonan pengujian.
- Menyusun jadwal prioritas untuk rapat-rapat yang memang sangat penting, dengan mempertimbangkan kapasitas SDM dan ketersediaan waktu disesuaikan dengan tuisi dari BPLJ dan arahan dari pimpinan.



- Mengingatkan secara berkala pentingnya penyusunan notulensi pada setiap agenda rapat yang diikuti.
- Melakukan penyederhanaan format laporan layanan advis teknis dan pengujian.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan, Peningkatan/Penurunan Kerja:

- Dalam pelaksanaan *in house training* tidak semua pegawai mengikuti kegiatan tersebut, sebagian pegawai yang dapat memahami/menyerap materi yang disampaikan dan sebagian lainnya masih belum optimal dalam menyerap materi.
- Adanya keterbatasan SDM dan beberapa penugasan pimpinan (kecenderungan *overload*), sehingga terjadi keterbatasan dalam tingkat kecepatan waktu layanan.
- Pemeliharaan alat yang tidak tepat waktu/ tidak berkala sehingga alat akan cepat rusak dan tidak berfungsi dengan baik.
- Penggunaan format laporan yang disederhanakan dapat mempercepat penyelesaian output layanan teknis.
- Keterlibatan tim yang berpengalaman dan memahami substansi dalam pemeriksaan RTA dapat mempercepat proses pemeriksaan.

Rekomendasi untuk Perbaikan Tahun Selanjutnya:

- Penyusunan program pengembangan SDM yang berkelanjutan, terstruktur dan tepat sasaran untuk meningkatkan kompetensi SDM.
- Dilakukan pemeliharaan preventif dengan membuat jadwal pemeliharaan yang lebih ketat dan terorganisir.
- Menyusun jadwal prioritas rapat agar lebih efisien.
- Melakukan manajemen waktu dan pengelolaan sumber daya yang lebih baik agar laporan dapat diselesaikan tepat waktu.
- Melakukan perbaikan berkelanjutan mengenai prosedur pemeriksaan output layanan teknis untuk efisiensi waktu dan pemenuhan standar mutu waktu.



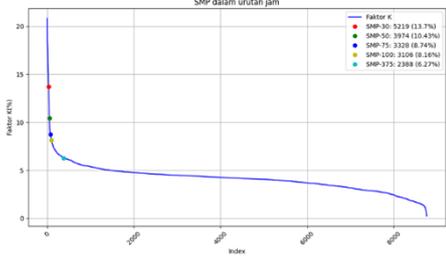
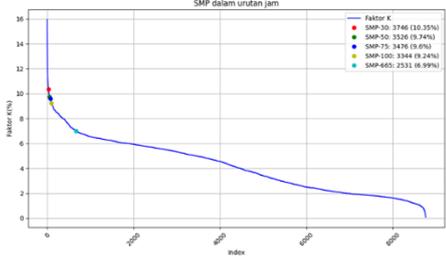
2. Teknologi Bidang Jalan dan Jembatan yang Dikembangkan

Teknologi Bidang Jalan dan Jembatan yang dikembangkan di lingkungan BPLJ dilakukan melalui kegiatan Paket kerja Kajian Rekomendasi Kebijakan Bidang Perkerasan dan Lingkungan Jalan (PA) yang terdiri dari Subpaket kerja Kelompok Bidang Keahlian Perkerasan, Kelompok bidang keahlian Teknik lalu lintas, Kelompok Bidang Keahlian lingkungan berupa kegiatan-kegiatan pengembangan teknologi, penyusunan pedoman, serta kajian-kajian terkait dengan bidang keteknikan perkerasan dan lingkungan jalan. Output Teknologi Bidang Jalan dan Jembatan yang dikembangkan di BPLJ TA. 2024 yang dikeluarkan dapat dilihat pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5 Output Teknologi Bidang Jalan yang Dikembangkan

No	Sub Paket Kerja	Output
1	<p>Kelompok Bidang Keahlian Lingkungan</p>    	<p>Aplikasi inDRAIN siap digunakan untuk survei cepat drainase jalan oleh pengelola jalan khususnya di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga dalam hal ini BBPJJN/BPJJN diseluruh Indonesia.</p> <ol style="list-style-type: none"> Suplemen Pedoman Inspeksi Cara Cepat Drainase Jalan Validasi aplikasi Indrain Sosialisasi, Pelatihan (Quality Assurance dan Quality Control) dan Bimbingan Teknis Monitoring dan evaluasi implementasi penggunaan aplikasi Indrain untuk inspeksi cara cepat drainase jalan
		<p>Internalisasi implementasi pelaksanaan konstruksi berkelanjutan di lingkungan Bina Marga.</p> <ol style="list-style-type: none"> Internalisasi Direktorat Kompetensi Sosialisasi Konstruksi Berkelanjutan bagi seluruh perwakilan Balai Pelaksana Jalan

No	Sub Paket Kerja	Output
		<p>dan Subdit di Lingkungan Ditjen Bina Marga</p>
		<p>Pedoman penanaman pohon pada sistem jaringan jalan yang telah sesuai dengan kondisi dan peraturan saat ini.</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyesuaian parameter geometrik jalan Penyesuaian jenis tanaman jalan <i>Focus Group Discussion</i> (FGD)
		<p>Internalisasi Pedoman Pembangunan Jalan dan Bangunan Mitigasi di Kawasan Hutan kepada pihak-pihak stakeholder terkait.</p> <ol style="list-style-type: none"> Materi untuk Internalisasi Pedoman Pelaksanaan Internalisasi Pedoman kerjasama dengan Subdit Jafung Bintek
2	Kelompok bidang keahlian Teknik lalu lintas	Hasil analisis Faktor pengaruh volume lalu lintas

No	Sub Paket Kerja	Output
	   <p style="text-align: center;">Faktor-k Pos Losarang</p>  <p style="text-align: center;">Faktor-k Pos Balonggandu</p>	<p>a. Lintas harian rata-rata tahunan (LHRT), faktor-k, Proporsi Bulanan Terhadap Tahunan untuk pos Losarang</p> <p>b. Lintas harian rata-rata tahunan (LHRT), faktor-k, Proporsi Bulanan Terhadap Tahunan untuk pos Balonggandu</p>
	 <p style="text-align: center;">Purwarupa Jalur Penghentian Darurat Sepeda Motor</p>	<p>Purwarupa Jalur Penyelamat Darurat Sepeda Motor</p> <p>peningkatan kondisi Jaring Pengaman yang telah dibuat oleh masyarakat karena kondisi bagian-bagian jaring pengaman sudah rusak dan dapat menimbulkan potensi risiko bagi pengendara sepeda motor lepas kendali</p>

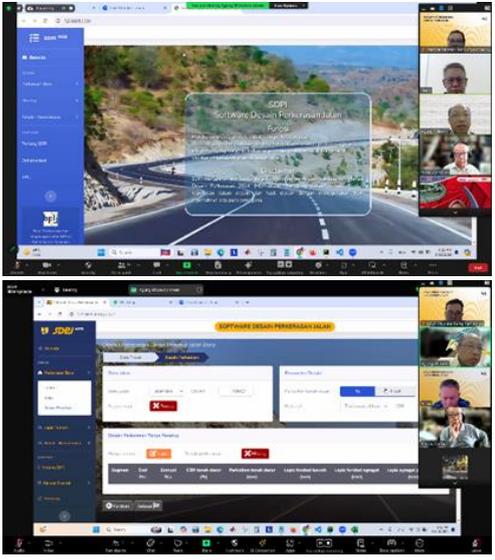


No	Sub Paket Kerja	Output
	 <p>Hasil review kondis eksisting jalur penghentian darurat</p>	<p>Review Jalur Penyelamat Darurat Eksisting Jalan Nasional Non Tol</p> <p>Review beberapa jalur penghentian darurat eksisting memperlihatkan masih terdapat risiko yang mungkin timbul akibat kondisi dan dimensi bagian dari JPD kurang sesuai dengan persyaratan dalam Pedoman Jalur Penghentian Darurat. Kondisi JPD eksisting secara umum.</p>
		<p>Internalisasi Pedoman Survei Volume Lalu Lintas kepada pihak-pihak stakeholder terkait.</p> <ol style="list-style-type: none"> Materi untuk Internalisasi Pedoman Pelaksanaan Internalisasi Pedoman kerjasama dengan Subdit Jafung Bintek
		<p>Internalisasi Pedoman Perencanaan Jalur Penghentian Darurat kepada pihak-pihak stakeholder terkait.</p> <ol style="list-style-type: none"> Materi untuk Internalisasi Pedoman Pelaksanaan Internalisasi Pedoman kerjasama dengan Subdit Jafung Bintek



No	Sub Paket Kerja	Output
		<p>Internalisasi pedoman Perencanaan Teknik Geometrik Simpang kepada pihak-pihak stakeholder terkait.</p> <ol style="list-style-type: none"> Materi untuk Internalisasi Pedoman Pelaksanaan Internalisasi Pedoman kerjasama dengan Subdit Jafung Bintek
3	<p>Kelompok Bidang Keahlian Perkerasan</p>  	<p>Penyusunan Naskah Akademik Sebagai Syarat Keberterimaan Konstruksi Jalan</p> <p>sebagai salah satu kegiatan yang mendukung kegiatan harmonisasi spesifikasi umum bidang jalan dan jembatan.</p> <ol style="list-style-type: none"> Rekomendasi initial IRI jangka pendek untuk Jalan Bebas Hambatan dan Jalan Nasional/Jalan IJD (Jalan Raya/Jalan Sedang/Jalan Kecil) Strategi pencapaian nilai IRI yang di syaratkan



No	Sub Paket Kerja	Output
		<p>Internalisasi Manual Desain Perkerasan Jalan 2024</p> <p>Internalisasi untuk menyampaikan pembaruan yang terdapat dalam MDP 2024 kepada pihak-pihak stakeholder terkait.</p> <ol style="list-style-type: none"> Materi untuk Internalisasi MDP 2024 Pelaksanaan Internalisasi MDP 2024 kerjasama dengan Subdit Jafung Bintek
		<p>Pengembangan Software Desain Perkerasan Jalan (SDPJ 2.0) Versi Website</p> <p>Sasaran menghasilkan Desain Perkerasan Jalan (SDPJ) versi Website, manual panduan pengoperasian SDPJ versi Website.</p>
		<p>Pengujian Accelerated Pavement Test</p> <p>menghasilkan output kegiatan berupa laporan kegiatan pengujian perkerasan menggunakan APT</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengukuran alur menggunakan laser profilometer

No	Sub Paket Kerja	Output
		b. Pengukuran Rolling Surface Deflectometer (RSD) c. Pengujian Falling Weight Deflectometer (FWD)

Manfaat Kegiatan:

Kegiatan Teknologi Bidang Jalan dan Jembatan yang dikembangkan oleh BPLJ bermanfaat untuk menjawab isu-isu dalam bidang perkerasan dan lingkungan jalan terutama yang telah tertuang dalam Renstra Ditjen Bina Marga 2019-2024. Berikut manfaat kegiatan yang dilaksanakan BPLJ pada TA. 2024.

- Kelompok Bidang Keahlian Lingkungan
 - a. Validasi Aplikasi Indrain untuk Survei Cepat Drainase Jalan menjadi masukan bagi perencanaan dan penganggaran dalam penanganan drainase jalan yang lebih efisien dan efektif.
 - b. Terinternalisasinya Pedoman Konstruksi Berkelanjutan Bidang Jalan dan terintegrasinya kriteria dan sub kriteria konstruksi berkelanjutan pada setiap tahap kegiatan pembangunan dan perservasi jalan.
 - c. Terinternalisasinya Pedoman Pembangunan Jalan dan Bangunan Mitigasi di Kawasan Hutan.
 - d. Reviu Pedoman Penanaman Pohon pada Sistem Jaringan Jalan menjadi acuan bagi para perencana dan penyelenggara jalan serta para pelaksana di dinas terkait, dalam melakukan penerapan dan penataan tanaman pada jalan yang berkeselamatan sesuai dengan kebutuhan fungsi yang diperlukan.
- Kelompok bidang keahlian Teknik lalu lintas
 - a. Mendukung terwujudnya peningkatan keselamatan pengguna jalan dan pemograman jalan yang efektif dan efisien
 - b. Tersedianya nilai faktor volume lalu lintas untuk analisis pemograman jalan
 - c. Tersusunnya rekomendasi teknis dari hasil kajian untuk peningkatan keselamatan pengguna jalan melalui konsep dan purwarupa perlengkapan jalan.
 - d. Terinternalisasinya pedoman survei volume lalu lintas, pedoman perencanaan Jalur Penghentian Darurat, dan Pedoman Perencanaan Teknik Geometrik Simpang



- Kelompok Bidang Keahlian Perkerasan
 - a. Penyusunan Naskah Akademik mengenai ketidakrataan sebagai syarat keberterimaan konstruksi jalan bermanfaat untuk menciptakan jalan yang lebih berkualitas, aman, dan efisien, serta memberikan dampak positif terhadap ekonomi, lingkungan, dan keselamatan masyarakat, kegiatan ini juga untuk mendukung harmonisasi spesifikasi umum bina marga.
 - b. Melalui Internalisasi Manual Desain Perkerasan Jalan yang mencakup beberapa aspek penting Internalisasi ini membantu perencana memahami metode dan spesifikasi terbaru dalam desain jalan, yang akan meningkatkan kualitas desain konstruksi perkerasan jalan sesuai dengan standar terkini. Selain itu, Internalisasi ini juga berperan dalam memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan, sehingga dapat mengurangi risiko kesalahan dalam desain perkerasan jalan.
 - c. Pengujian *Accelerated Pavement Test* bertujuan untuk menghasilkan kalibrasi, verifikasi, dan validasi dari metode perencanaan yang ada. Hasil pengujian ini dapat dijadikan masukan bagi para stakeholder terkait, dengan tujuan memperbaiki prediksi kinerja perkerasan yang lebih baik, sesuai dengan kondisi lalu lintas, iklim, dan material yang ada di Indonesia.
 - d. Pengembangan software desain perkerasan jalan versi website memberikan kemudahan bagi perencana dalam melakukan desain, serta memastikan kepastian hasil yang akurat sebagai validator dari desain perkerasan yang dilakukan.
 - e. Membantu Satker P2JN dan Konsultan Perencana dalam desain perkerasan jalan agar lebih mudah dan akurat, yaitu dengan menyediakan 1 (satu) Aplikasi Desain Perkerasan Jalan (SDPJ) 2.0.

Kendala Kegiatan

- Kelompok Bidang Keahlian Lingkungan
 - a. Perpindahan server ke PDN mengalami masalah dalam penyimpanan (sinkronisasi) data sehingga data hasil survei tidak dapat disimpan maupun diunggah ke server
 - b. Storage server Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan tidak menyediakan *storage* yang memadai untuk penyimpanan data mengakibatkan beberapa data tidak tersimpan di server. Server Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan tidak bisa memprediksi kebutuhan *storage* data karena keterbatasan anggaran.
 - c. Keterbatasan anggota tim dan narasumber.
 - d. Adanya perubahan dan turunan peraturan, serta kebijakan yang baru terbit di TA. 2023.



- e. Terdapat beberapa nomor pembayaran tambahan di divisi 2 drainase draf pedoman harmonisasi yang mengacu pada gambar standar drainase jalan tol.
- Kelompok Bidang Keahlian Teknik lalu lintas
 - a. Keterbatasan kemampuan dalam analisis substansi yang bukan bagian dari tugas dan fungsi seperti analisis statistik basis data kompleks dan analisis elemen
 - b. Keterbatasan personil dan alokasi waktu pelaksanaan dikarenakan hampir seluruh anggota tim pelaksana juga memiliki tanggung jawab sebagai bagian dari satuan kerja atau memiliki jabatan lain selain fungsional.
- Kelompok Bidang Keahlian Perkerasan
 - a. Waktu yang terbatas untuk mengumpulkan data lapangan, seperti pengujian ketidakrataan IRI di berbagai lokasi seluruh Indonesia. Tindak lanjut menggunakan alat pengukuran ketidakrataan kelas I yang lebih cepat dan efisien untuk mempercepat proses pengumpulan data dan analisis.
 - b. Terjadi perubahan tanggal dan waktu dari rencana untuk kegiatan internalisasi MDP 2024, hal ini berdampak pada penyesuaian jadwal narasumber dan kegiatan di Internal BPLJ. Tindak lanjut yang dilakukan yaitu penyesuaian jadwal narasumber dan kegiatan internal BPLJ untuk terlaksananya kegiatan internalisasi MDP 2024 di Surabaya.
 - c. Pengembangan SDPJ awalnya menggunakan server milik tenaga ahli pengembang, namun memiliki kapasitas yang terbatas, tindak lanjutnya yaitu menggunakan server milik DPSI Bintek.
 - d. Pengembangan software seringkali terhambat karena adanya target lain yang harus diselesaikan secara bersamaan, sehingga fokus pengembangan terbagi. Tindak lanjutnya yaitu manajemen waktu dan prioritas pengembangan SDP Versi Website berdasarkan kepentingan dan deadline.
 - e. Belum terbentuknya tim khusus yang menangani Alat APT terutama pada saat akan dilakukan pengoperasian 24 jam. Tindak lanjut diperlukan pembentukan tim khusus yang terlatih untuk memastikan pengoperasian APT selama 24 jam berjalan efektif dan efisien.

Alternatif Solusi/Pemecahan Masalah/Langkah Antisipatif

- Kelompok Bidang Keahlian Lingkungan
 - a. Perpindahan server ke server milik Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan dengan GCP (*Google Cloud Portal*).
 - b. Penambahan storage server secara berkala sesuai kebutuhan penyimpanan data dan revisi anggaran untuk penyediaan storage server (oleh Subdit. DPSI).

- c. Mengoptimalkan anggota tim yang ada dengan melakukan diskusi intensif.
- d. Pengaturan kesediaan waktu dari narasumber.
- e. Melakukan penelusuran dan diskusi dengan instansi terkait.
- f. Kesepakatan penggunaan istilah untuk keseragaman pemahaman.
- Kelompok Bidang Keahlian Teknik Lalu Lintas
 - a. Tim mengajukan tenaga penunjang atau konsultan individu untuk membantu dalam inventarisasi dan pengolahan data sekunder.
 - b. Untuk penentuan nilai faktor volume lalu lintas dengan pendekatan statistik dan kecerdasan buatan (AI) dibantu oleh narasumber.
- Kelompok Bidang Keahlian Perkerasan
 - a. Waktu yang terbatas untuk mengumpulkan data lapangan yaitu dengan menggunakan alat pengukuran ketidakrataan kelas I yang lebih cepat dan efisien untuk mempercepat proses pengumpulan data dan analisis.
 - b. Penyusunan jadwal skala prioritas perlu dilakukan agar kegiatan-kegiatan terlaksananya sesuai dengan target.
 - c. Dalam pengembangan SDPJ versi *website* perlu koordinasi dengan berbagai stakeholder terkait.
 - d. Perlunya pembentukan tim khusus yang terlatih untuk memastikan pengoperasian APT selama 24 jam berjalan efektif dan efisien.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan, Peningkatan/Penurunan Kerja:

- Kelompok Bidang Keahlian Lingkungan Jalan
 - a. Data bisa diinput secara online dan offline pada aplikasi Indrain menggunakan *device* (smartphone) yang digunakan tidak hang/panas, atau aplikasi force close (aplikasi keluar secara tiba-tiba), data bisa disimpan di server, dan data hasil survei sama dengan data yg diinput secara manual, artinya algoritma aplikasi tidak bermasalah sehingga data yang dihasilkan sama.
 - b. Ketidakmampuan mendistribusikan penyusunan pedoman menjadi hal utama dalam penyelesaian penyusunan draf pedoman. Masing-masing anggota tim mendapat penugasan yang lain sehingga sulit mendistribusikan dalam penyusunan draf pedoman.
- Kelompok Bidang Keahlian Teknik Lalu Lintas
 - a. Mendapatkan nilai faktor yang sesuai dengan varian karakteristik jalan yang ada diperlukan pengumpulan dan analisis terhadap berbagai karakteristik jalan.



- b. Isu kegagalan sistem rem pengguna sepeda motor tidak hanya terjadi di lokasi penempatan purwarupa JPD Motor.
 - c. Kegagalan sistem rem sepeda motor banyak terjadi pada lokasi-lokasi dengan kelandaian tinggi dan panjang. Desain JPD motor perlu dikembangkan pada lokasi lain untuk meningkatkan tingkat keselamatan pengguna sepeda motor dengan karakteristik lokasi yang beragam.
- Kelompok Bidang Keahlian Perkerasan Jalan
 - a. Pemilihan alat ukur yang cepat dan efisien, khususnya alat ukur kelas I, untuk mempercepat proses pengujian lapangan.
 - b. Langkah alternatif solusi kedepannya yang dapat diambil adalah dapat memaksimalkan fungsi narasumber BPLJ untuk dapat menginternalisasi MDP 2024 lebih luas lagi.
 - c. Diperlukan pembentukan tim khusus yang terlatih untuk memastikan pengoperasian APT selama 24 jam berjalan efektif dan efisien.

Rekomendasi untuk Perbaikan Tahun Selanjutnya

- Kelompok Bidang Keahlian Lingkungan
 - a. Diperlukan bimbingan teknis secara berkala bagi surveyor untuk bisa menilai kondisi drainase jalan dengan meningkatkan pemahaman dan pengalaman dalam melaksanakan survei lapangan di lokasi dengan kondisi dan karakteristik saluran drainase yang berbeda-beda.
 - b. Diperlukan monitoring dan evaluasi implementasi aplikasi Indrain di BBPJN/BPJN.
 - c. Sejalan dengan perubahan PP dan rancangan Peraturan Menteri terbaru terkait konstruksi berkelanjutan, maka diperlukan bimbingan teknis konstruksi berkelanjutan bidang jalan, serta revisi persyaratan dan kriteria/subkriteria konstruksi berkelanjutan bidang jalan pada tahun depan.
 - d. Kajian dukungan penerapan teknis untuk ke depan perlu memberi perhatian pada:
 - Kajian dampak perubahan iklim (Misal. gas rumah kaca dan dampaknya).
 - Kajian rekayasa lingkungan bidang jalan terkait kriteria dan sub kriteria konstruksi berkelanjutan.
 - Kajian pendalaman terkait substansi teknis jalan di kawasan adat, kawasan hutan, kawasan pertanian berkelanjutan.
- Kelompok bidang keahlian Teknik lalu lintas
Penyesuaian JPD terbangun terhadap pedoman yang berlaku perlu dievaluasi dengan melihat efektivitas keberadaan JPD dalam upaya peningkatan keselamatan jalan. Selain



desain yang perlu diperbaiki, penempatan titik JPD pada area rawan kegagalan sistem rem juga perlu dikaji melihat kecenderungan titik kecelakaan kendaraan akibat kegagalan sistem rem tersebar dalam beberapa titik dalam satu ruas jalan.

- Kelompok Bidang Keahlian Perkerasan Jalan
 - a. Penyusunan naskah akademik dalam waktu yang terbatas sebaiknya dilakukan dengan membagi porsi pekerjaan secara merata, agar naskah akademik dapat segera diselesaikan. Selain itu, perlu lebih banyak SDM yang mampu mengoperasikan alat pengukur ketidakrataan.
 - b. Dalam rangka memaksimalkan penyebaran pemahaman konsep desain MDP 2024, kedepannya dapat menggunakan konsep narasumber BPLJ pada beberapa kegiatan yang terdapat internalisasi MDP 2024.
 - c. Perlu dilakukan koordinasi dengan DPSI untuk proses *hosting* di server Pusat Data Nasional. Selain itu penjadwalan dan pengawasan yang ketat menjadi perhatian yang perlu dilakukan untuk tahun selanjutnya.
 - d. Pada pengujian APT memperbaiki kondisi yang ada maka untuk kedepannya diperlukan hal-hal sebagai berikut:
 1. Diperlukan pembentukan tim khusus yang terlatih untuk memastikan pengoperasian APT selama 24 jam berjalan efektif dan efisien.
 2. Penggantian ban/roda yang telah berusia lebih dari 10 tahun diperlukan untuk meningkatkan kecepatan lintasan hingga mencapai target yang diharapkan.
 3. Perlu kajian peningkatan beban pengujian untuk meningkatkan nilai ESAL perlintasan guna percepatan pengujian.

B. Indikator Kinerja Kegiatan: Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR

1. EBA 994- Layanan Perkantoran

Layanan Perkantoran di Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan mencakup Gaji dan Tunjangan (PH), dan Operasional dan Pemeliharaan Kantor yang terdiri dari Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor, Sarana dan Prasarana (PI) dan Operasional Perkantoran (PJ) untuk melayani kebutuhan balai dalam rangka menunjang tugas dan fungsi balai. Target output Layanan Perkantoran pada TA 2024 adalah (satu) 1 layanan dalam satu tahun anggaran.

Realisasi pencapaian kegiatan Layanan Perkantoran pada TA 2024 telah tercapai 1 (satu) layanan, karena telah terpenuhinya kebutuhan operasional perkantoran, serta ketepatan dan kelancaran pembayaran gaji dan belanja lembur pegawai dalam menunjang kinerja balai, dan terpenuhinya sarana dan prasarana rumah tangga dan perkantoran yang berfungsi dengan baik, serta lancar dan nyaman bagi seluruh kegiatan perkantoran sesuai dengan anggaran

selama periode waktu satu tahun untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi dari Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan.

Adapun Kegiatan Layanan Perkantoran terdiri dari:

1. Gaji dan Tunjangan, diantaranya:
 - a. Pembayaran uang makan PNS bulan Januari-Oktober 2024
 - b. Pembayaran uang makan PPPK bulan Januari-Oktober 2024
 - c. Pembayaran lembur PNS bulan Februari-Agustus 2024
 - d. Pembayaran lembur PPPK bulan September 2024
 - e. Menyusun berita acara hasil kegiatan pembayaran tunjangan kinerja PNS di aplikasi website gaji dan rekonsiliasi data pegawai tugas belajar
 - f. *Updating* perubahan data pegawai di aplikasi website gaji
2. Operasional Perkantoran, diantaranya:
 - a. Belanja Keperluan Perkantoran, meliputi belanja sehari-hari perkantoran seperti kebutuhan air minum mineral, jamuan rapat, hidangan tamu, dan lain-lain.
 - b. Belanja Honor Operasional Satuan Kerja, meliputi pembayaran honorarium KPA, PPK, SPM, Bendahara, dan Pengelola Keuangan.
 - c. Belanja Barang Operasional Lainnya, meliputi pembayaran honorarium lembur PPNPN.
 - d. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi, meliputi pengadaan belanja barang berupa Alat Tulis Kantor (ATK).
3. Pemeliharaan Gedung Kantor, Sarana dan Prasarana, diantaranya:
 - a. Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor, Sarana dan Prasarana, telah diakomodasi oleh penyedia jasa untuk dilakukan perbaikan, pekerjaan tersebut meliputi perbaikan konstruksi struktur Gedung Mudjitaba, pemeliharaan interior ruang rapat dan dapur, pemeliharaan ruang kerja Gedung Layanan, pekerjaan elektrikal gedung layanan dan renovasi *railing ramp* Gedung Mudjitaba. Dokumentasi perbaikan gedung dapat dilihat pada Gambar 3.4.
 - b. Belanja barang persediaan Pemeliharaan Gedung Kantor, Sarana dan Prasarana, meliputi Pemeliharaan instalasi kelistrikan, instalasi air bersih, dan penggantian *handle* pintu pada Gedung Manajemen dan Gedung Layanan.
 - c. Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, meliputi belanja pemeliharaan kendaraan dinas, peralatan survei, peralatan pendukung pengujian dan lain-lain yang terdaftar dalam barang milik negara (BMN).

Manfaat Kegiatan:

- Gaji dan Tunjangan bermanfaat sebagai penunjang kinerja pegawai agar seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan sesuai dengan Peraturan Menteri

Pekerjaan Umum No 16/PRT/M/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.05/2010 tentang Pemberian dan Tata Cara Pembayaran Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil, serta mengapresiasi pegawai yang telah bekerja melebihi jam kerja pegawai dengan membayarkan uang lembur sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 125/PMK.05/2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil.

- Operasional Perkantoran bermanfaat untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari perkantoran dalam menunjang kinerja Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan.
- Pemeliharaan Gedung Kantor, Sarana dan Prasarana bermanfaat untuk menjamin kelancaran fungsi dan operasional sarana prasarana perkantoran, sehingga tercipta lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif yang diharapkan mampu meningkatkan produktivitas kerja dan membantu pencapaian kualitas output yang tinggi; serta menjamin mobilisasi pegawai terjamin aman, layak, dan nyaman.

Kendala Kegiatan:

Kendala pada Layanan Perkantoran mencakup kendala pada kegiatan Gaji dan Tunjangan, diantaranya:

- Terdapat pegawai yang melakukan kegiatan perjalanan dinas, namun masih melakukan absensi, sehingga absensi tercatat di aplikasi Bravo.
- Terdapat pegawai yang melakukan kegiatan perjalanan dinas namun tetap melakukan absensi dan kelebihan jam kerja sehingga terhitung lembur
- Terdapat pegawai tidak melakukan absen dilokasi kantor sehingga waktu pelaksanaan lembur pegawai PPNP tidak akurat.

Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Kegiatan Operasional Perkantoran adalah Keterbatasan limit kartu kredit pemerintah (KKP). Sementara kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pemeliharaan Gedung Kantor, Sarana dan Prasarana, diantaranya:

- Pengecekan dan pemeliharaan rutin kerusakan tidak tersusun dengan baik.
- Akhir tahun memasuki musim penghujan di beberapa titik mengalami kebocoran atap yang disebabkan oleh penyumbatan sampah pada saluran pembuangan air dan perlu dilakukan penambahan saluran pembuangan air.
- Kerusakan lantai dan retakan tembok akibat perubahan cuaca dan penurunan tanah.

Alternatif Solusi/Pemecahan Masalah/Langkah Antisipatif:



Berdasarkan kendala yang dihadapi pada Layanan Perkantoran pada kegiatan Gaji dan Tunjangan, diantaranya:

- Masing-masing pegawai mengunggah kegiatan perjalanan dinas pada aplikasi Bravo atau melaporkan kegiatan perjalanan dinas kepada petugas absensi/admin aplikasi Bravo.
- Admin aplikasi Bravo melakukan *updating* aplikasi Bravo secara berkala setiap minggunya.
- Admin satker melakukan *updating* rekapitulasi perjalanan dinas secara berkala.
- Perlunya kesadaran pegawai untuk lebih disiplin dalam hal waktu, dan mengajukan permintaan untuk memperkecil radius absensi.
- Pembuatan satu pintu surat tugas perjalanan dinas yang menggunakan pagu balai ataupun bukan dibiayai balai oleh admin satker.

Berdasarkan kendala yang dihadapi dalam Operasional Perkantoran, diperlukan beberapa alternatif solusi, yaitu Mengganti KKP dengan uang persediaan (GUP) dari bendahara. Sementara berdasarkan kendala yang dihadapi dalam Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor, Sarana dan Prasarana, diperlukan beberapa alternatif solusi, diantaranya:

- Pembuatan *google form* dan grup Whatsapp untuk koordinasi, sehingga semua penanggung jawab gedung bisa langsung melaporkan apabila terjadi kerusakan gedung.
- Dilakukan pembersihan atap dan dak lantai bagian luar secara rutin.
- Pembuatan saluran pembuangan tambahan pada atap dak Gedung Mudjitaba.
- Renovasi atau perkuatan struktur gedung, perbaikan keretakan pada dinding, dan perbaikan struktur lantai Gedung Mudjitaba.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan, Peningkatan/Penurunan Kerja:

- Perubahan cuaca yang menyebabkan terjadinya perubahan rencana kegiatan pemeliharaan dan/atau perbaikan dengan realisasi, sehingga untuk pemeliharaan bangunan gedung kantor masih berlanjut di TA 2025.
- Perbaikan bangunan Gedung Mudjitaba tertunda perubahan cuaca yang menyebabkan penurunan pada lantai ruang kerja, ruangan Kepala Balai, ruangan Kasubbag Umum dan Tata Usaha dan ruangan para Ketua Tim pada TA 2024 masih dilakukan renovasi Tahap I (hanya pada lantai ruang kerja, pada bagian ruang kerja, ruangan Kasubbag Umum dan Tata Usaha dan ruangan para Ketua Tim), sehingga renovasi selanjutnya pada ruangan Kepala balai akan dilakukan di TA 2025.

Rekomendasi untuk Perbaikan Tahun Selanjutnya:

Berikut beberapa rekomendasi yang dibutuhkan untuk perbaikan pada Kegiatan Layanan Perkantoran, diantaranya diperlukan:

- Optimalisasi proses administrasi yang tepat diantaranya diperlukan pemeriksaan ulang setiap pergantian skema pembayaran, atau pun perubahan berkas yang tidak dilanjutkan. Pemeriksaan tersebut minimal dilakukan disetiap awal bulan sebagai bagian dari evaluasi. Kegiatan gaji dan tunjangan diharapkan ditahun-tahun berikutnya dalam pelaksanaan pembayaran uang makan dan lembur pegawai menjadi lebih baik, akurat dan tepat waktu, sehingga pembayaran maksimal dibayarkan untuk uang makan dan lembur pegawai di minggu kedua pada bulan berikutnya.
- Perencanaan yang lebih terperinci dari awal tahun, baik teknis maupun anggaran dengan diskusi, koordinasi dan kontrak kerjasama sedini mungkin walaupun kegiatan dilakukan jauh setelahnya. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi ketidaksesuaian rencana dari sisi teknis yang masih berpotensi terjadi.



Gambar 3.4 Pemeliharaan Gedung Mudjitaba dan Gedung Layanan TA 2024

2. EBB-951 Layanan Sarana Internal

Output Layanan Sarana Internal mencakup Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran (PG). Target Output Layanan Sarana Internal pada Tahun 2024 adalah 1 (satu) layanan dalam satu tahun anggaran. Realisasi pencapaian output Layanan Sarana Internal Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan Tahun 2024 tercapai 1 (satu) layanan dalam 1 (satu) tahun anggaran karena telah terpenuhinya pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran untuk menunjang efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi dari Balai perkerasan dan Lingkungan Jalan. Kegiatan Layanan Sarana Internal hanya pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin. Dokumentasi pengadaan pendukung perkantoran dapat dilihat pada Gambar 3.5.

Manfaat Kegiatan:

Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran bermanfaat untuk menunjang tugas dan fungsi dari balai itu sendiri dengan menyediakan peralatan dan prasarana gedung yang

diperlukan agar seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 16/PRT/M/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Kendala Kegiatan:

Kegiatan Pengadaan barang yang berhubungan dengan proses pengadaan secara umum tidak mengalami kendala. Kebijakan terkait pembelanjaan anggaran yang memerlukan syarat nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) menjadi kendala untuk memenuhi beberapa peralatan yang diperlukan oleh Balai Perkerasan dan lingkungan Jalan yang mengharuskan menggunakan alat impor (Non TKDN) karena selama ini beberapa barang terkendala dengan ketersediaan barang/produsen. Kemudian masih jarang toko/penyedia yang menyediakan layanan transaksi menggunakan Kartu Kredit Pemerintah

Alternatif Solusi/Pemecahan Masalah/Langkah Antisipatif:

Berdasarkan kendala yang dihadapi, maka untuk tahun anggaran selanjutnya sebaiknya dicarikan pengganti barang yg diinginkan ke TKDN atau PDN, dengan mencari alat produksi lokal atau merupakan produk dalam negeri atau yang bisa memenuhi syarat dari nilai TKDN dengan fungsi sebanding. Untuk transaksi yang menggunakan Kartu Kredit Pemerintah masih diperlukan penjajakan dimana hanya beberapa penyedia/Toko yang bisa melakukan transaksi tersebut.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan, Peningkatan/Penurunan Kerja:

Penyebab terkendalanya Kegiatan Pengadaan Kantor dan Laboratorium adalah tender lelang pengadaan alat survei belum dapat dilakukan dikarenakan alat yang dibeli merupakan barang impor. Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. PB.01.01-Mn/2775 perihal Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian PUPR, diperlukan izin untuk melakukan pengadaan barang impor.

Rekomendasi untuk perbaikan tahun selanjutnya:

Beberapa saran yang dibutuhkan untuk proses pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk proses pengadaan yang berkaitan dengan kebutuhan alat khusus yang memerlukan impor atau nilai dari TKDN yang belum memenuhi sementara alat tersebut menunjang tugas dan fungsi Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan, maka sebaiknya dilakukan pembuatan Justifikasi Teknis mengenai kebutuhan tersebut. Untuk transaksi Pengadaan bisa dilakukan dengan metoda transaksi menggunakan DIGIPay, dimana penyedia local bisa diarahkan/disarankan untuk melakukan registrasi terhadap produk yang dimiliki pada aplikasi DIGIPay milik Kementerian Keuangan.



Gambar 3.5 Pengadaan Pendukung Perkantoran Tahun 2024

3. EBA 960-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal

Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal di Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan mencakup Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan (PM) dan Pembangunan Zona Integritas. Target *output* Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal pada tahun anggaran 2024 adalah (satu) 1 layanan dalam satu tahun anggaran. Realisasi *output* Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal adalah 1 (satu) Layanan, karena telah terpenuhinya pelaksanaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtangaan, administrasi kepegawaian, pengelolaan dan pelaporan administrasi kepegawaian, pengelolaan dan pelaporan administrasi keuangan, penerimaan negara bukan pajak dan barang milik negara di Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan.

Kegiatan pelayanan umum, pelayanan rumah tangga dan perlengkapan terdiri dari 5 (lima) Sub Kegiatan, yaitu Pelayanan Umum Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN), Pelayanan Umum Kepegawaian, Pelayanan Umum Kearsipan, Pelayanan Umum Komunikasi Publik, dan Pelayanan Umum Pelaporan.

Manfaat Kegiatan:

Dengan adanya Kegiatan Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal ini bermanfaat untuk menunjang salah satu tugas dan fungsi Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan agar seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana

Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu pelaksanaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, administrasi kepegawaian, pengelolaan dan pelaporan administrasi kepegawaian, pengelolaan dan pelaporan administrasi keuangan, penerimaan negara bukan pajak dan barang milik negara di Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan

Manfaat kegiatan Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal ini adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya pengelolaan keuangan yang baik dan tertib administrasi, serta memastikan aset BMN dan barang persediaan terdata secara akurat.
2. Terlaksananya administrasi kepegawaian dan kearsipan yang tertata dan terkelola tepat waktu, serta mendukung peningkatan kualitas SDM dan organisasi.
3. Terlaksananya komunikasi publik yang efektif melalui kanal media sosial dan *website* dan memastikan informasi strategis tersampaikan dengan cepat dan akurat.
4. Terlaksananya administrasi dan terpenuhinya penilaian pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi di lingkungan BPLJ.
5. Pembentukan kelompok kerja (Pokja) zona integritas yang terdiri dari Manajemen Perubahan, Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penataan Tata Laksana, Sekretariat, dan pembentukan agen perubahan.
6. Pembaharuan website BPLJ, Integrasi aplikasi LACAK UJI dengan website BPLJ, Pelaksanaan sosialisasi kepada pegawai dan *stakeholder* terkait tentang Zona Integritas; dan Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyipuan ISO 37001:2016
7. Terlaksananya pelaporan yang komprehensif terkait manajemen risiko yang tersampaikan tepat waktu.

Kendala Kegiatan:

Kendala dari kegiatan Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan, meliputi:

1. Pelayanan Umum Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN)
 - a. Perubahan SK Kesatkeran, sehingga personil yang ditunjuk merupakan personil baru yang masih membutuhkan pelatihan baik dalam hal teori dan praktik mengenai pelaksanaan administrasi keuangan, pengelolaan aset BMN dan barang persediaan.
 - b. Belum optimalnya history pencatatan aset BMN secara menyeluruh.
 - c. Adanya beberapa aset BMN yang merupakan hasil pembelian dari instansi terdahulu sehingga memiliki nomor dan pencatatan yang berbeda dengan aset BMN hasil perolehan BPLJ saat ini.
2. Pelayanan Umum Kepegawaian



- a. Untuk kegiatan pengembangan kompetensi pegawai masih dilakukan secara *distance learning*, sehingga kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan (diklat) masih dirasakan kurang optimal untuk setiap pegawai.
- b. *Updating* perubahan data pegawai pada aplikasi E-HRM belum terlaksana secara berkala dan periodik.
3. Pelayanan Umum Kearsipan
 - a. Ruang penyimpanan arsip yang terbatas.
 - b. Sarana pendukung yang masih belum sesuai dengan peraturan kearsipan.
4. Pelayanan Umum Komunikasi Publik
 - a. Monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan konten media sosial sudah terlaksana, namun belum dilakukan secara konsisten dan berkala.
 - b. Telah ada penunjang khusus terkait pengelola masing-masing kanal media sosial, tetapi belum berjalan secara optimal.
 - c. Telah dilakukan penataan aset-aset barang di lemari khusus komunikasi publik, namun monitoring penggunaan belum dilakukan secara berkala.
 - d. Pendampingan dokumentasi kegiatan penting balai masih sering terlewat.
 - e. Penataan arsip dan *back up file* komunikasi publik masih belum rapih dan belum dilaksanakan secara rutin.
5. Pembangunan Zona Integritas
 - a. Penyusunan beberapa dokumen bukti dukung LKE masih terlambat dari jadwal yang ditentukan karena kesibukan personil dalam melaksanakan tugas proses bisnis BPLJ utama.
 - b. Integrasi aplikasi LACAK Uji dengan website BPLJ terkendala karena terdapat permasalahan migrasi server dan akses ke database Kementerian PU.
 - c. Penyusunan SOP turunan di BPLJ yang sesuai dengan format ISO ditunda sampai tahun 2025.
6. Pelayanan Umum Pelaporan
 - a. Belum Optimalnya Inventarisasi profil risiko di balai perlu yang dilakukan secara menyeluruh terhadap semua kemungkinan risiko yang ada, serta perlu melibatkan semua unsur pegawai.
 - b. Belum optimalnya penggunaan dasar *Loss Event Database* atau kejadian yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi balai dalam menilai kemungkinan (K) dan dampak (D) dalam penentuan level risiko.

Alternatif Solusi/Pemecahan Masalah/Langkah Antisipatif:

Alternatif solusi/pemecahan masalah/langkah antisipatif dari kegiatan Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan, meliputi:

1. Pelayanan Umum Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN)



- a. Diperlukan pelatihan, baik dalam hal teori maupun praktik terkait pelaksanaan administrasi keuangan, serta pengelolaan aset BMN dan barang persediaan.
 - b. Pendataan kembali seluruh aset.
 - c. Dilakukan pendataan kembali secara menyeluruh terhadap seluruh aset yang ada di BPLJ baik BMN hasil perolehan saat ini maupun perolehan dari instansi sebelumnya.
2. Pelayanan Umum Kepegawaian
 - a. Menjadwalkan pengembangan kompetensi pegawai dengan skema jadwal *blended learning* dari BPSDM, maupun *in house training*.
 - b. Melakukan updating data pegawai pada aplikasi E-HRM secara berkala dan periodik.
 3. Pelayanan Umum Kearsipan
 - a. Pengecekan terhadap berkas arsip.
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana penataan arsip harus sesuai kebutuhan dan penyimpanan arsip.
 4. Pelayanan Umum Komunikasi Publik
 - a. Penyesuaian terhadap waktu pengisian perencanaan konten dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan media sosial yang disepakati kembali.
 - b. Pembagian daftar prioritas pekerjaan terhadap pengelola masing-masing kanal media sosial pada saat pelaksanaan monitoring dan evaluasi, termasuk monitoring pengecekan terhadap penggunaan aset-aset barang komunikasi publik.
 - c. Koordinasi dan pengaturan untuk disposisi pendampingan dokumentasi kegiatan rutin dan terutama pendampingan dokumentasi kegiatan penting berdasarkan ketersediaan waktu dan kemampuan anggota tim komunikasi publik.
 5. Pembangunan Zona Integritas
 - a. Perlu dilakukan peningkatan sumber daya manusia (SDM) dalam pemenuhan beberapa dokumen bukti dukung LKE
 - b. Koordinasi migrasi server dan akses ke database Kementerian PU.
 6. Pelayanan Umum Pelaporan
 - a. Diperlukan kesiapan dan waktu lebih untuk pemenuhan dokumen pendukung penilaian maturitas SPIP dan penyusunan dokumen manajemen risiko balai secara komprehensif.
 - b. Dalam pelaksanaan Manajemen Risiko perlu adanya optimalisasi terkait Inventarisasi profil risiko di balai yang dilakukan secara menyeluruh terhadap semua kemungkinan risiko yang ada, serta perlu melibatkan semua unsur pegawai. *Loss Event Database* atau kejadian yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi harus dijadikan dasar balai dalam menilai kemungkinan (K) dan dampak (D) dalam penentuan level risiko.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan, Peningkatan/Penurunan Kinerja:



Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, peningkatan/penurunan kinerja dari kegiatan kegiatan Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan, meliputi:

1. Pelayanan Umum Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN)
 - a. SK Kesatkeran yang berubah-ubah yang tidak diimbangi dengan pembekalan pelatihan, baik dalam hal teori maupun praktik sebelum penunjukan personil yang melaksanakan kegiatan administrasi keuangan, serta personil yang mengelola aset BMN dan barang persediaan.
 - b. Sering terjadinya perubahan tata letak ruangan kerja maupun ruang rapat yang mengakibatkan terjadinya perpindahan aset, sehingga petugas harus menginventarisasi kembali daftar barang ruangan.
2. Pelayanan Umum Kepegawaian
 - a. Absensi pegawai sudah terekam semua dalam aplikasi Bravo
Absensi menjadi faktor utama dibayarkannya uang makan dan uang lembur ini. Dalam pemenuhan absensi pegawai wajib menginput absen kehadiran, dinas, cuti, dan/atau lupa absennya.
 - b. Koordinasi antar user
Dalam pencairan uang makan ini menggunakan webgaji dari Kementerian keuangan, yang mana dalam satu balai terdiri dari tiga user, yaitu PPABP, Bendahara, dan PPK. Ketiga user ini harus saling berkoordinasi agar pencairan tidak terhambat.
 - c. Kelancaran sistem
Dalam proses pencairan uang makan dan uang lembur diharuskan melalui sistem web "SAKTI" yang mana web ini terkadang mengalami gangguan teknis seperti server down sehingga proses terhambat.
3. Pelayanan Umum Kearsipan
 - a. Sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengelolaan arsip.
 - b. Sumber daya manusia yang mendukung kegiatan pengelolaan arsip.
4. Pelayanan Umum Komunikasi Publik
 - a. Belum meratanya kemampuan tim komunikasi publik dalam melaksanakan tugasnya.
 - b. Beberapa pelatihan/*workshop* untuk peningkatan kinerja anggota tim komunikasi publik terselenggara, namun anggota tim yang diikutkan untuk mengikuti pelatihan/*workshop* tersebut terbatas.
 - c. Kurangnya informasi dan keterbatasan waktu, serta kemampuan anggota tim komunikasi publik dikarenakan kelebihan kapasitas (*excess capacity*) anggota tim komunikasi publik.
5. Pembangunan Zona Integritas
 - a. Penunjukkan satu pegawai per pokja ternyata memunculkan permasalahan ketika beberapa bukti dukung belum menjadi tugas keseharian di BPLJ, sehingga pokja

terkait harus menyusun sendiri dari bukti yang ada. Ketika workload pegawai tersebut meningkat maka pembuatan bukti dukung akan mengalami keterlambatan.

- b. Integrasi aplikasi LACAK UJI dengan website BPLJ telah berhasil dilakukan melalui koordinasi dengan Pusdatin dan dibantu oleh narasumber IT.
 - c. Penundaan penyusunan SOP dilakukan karena adanya perubahan nomenklatur kementerian yang dikhawatirkan akan mengubah tupoksi balai.
6. Pelayanan Umum Pelaporan
- Kurangnya peningkatan partisipasi pegawai dalam penyusunan profil risiko.

Rekomendasi untuk Perbaikan Tahun Selanjutnya:

Beberapa rekomendasi yang dibutuhkan untuk perbaikan tahun selanjutnya dari kegiatan Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan, meliputi:

diantaranya:

1. Pelayanan Umum Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN)
 - a. Perlunya kehati-hatian dalam memenuhi indikator penilaian, sehingga target dapat tercapai.
 - b. Pendataan seluruh aset diperlukan satu penyimpanan khusus terkait dokumen BMN sehingga apabila terjadi perubahan personil, dokumen sudah tersedia di penyimpanan data tersebut.
 - c. Perlu pula dibuatkan format pencatatan (*prototype*) agar siapapun personilnya dapat mengisi format yang ditentukan tidak perlu mencatat ulang dari awal.
 - d. Perlunya pelatihan/peningkatan kapasitas terkait pengelolaan gudang dan persediaan dikarenakan SDM yang saat ini belum mendapatkan pelatihan atau kopetensi dalam pengelolaan terkait persediaan baik secara langsung maupun menggunakan aplikasi sakti persediaan.
 - e. Perlu juga SDM yang fokus mengelola barang persediaan agar dapat berjalan lebih baik lagi.
2. Pelayanan Umum Kepegawaian

Untuk meningkatkan efektivitas kegiatan kepegawaian, balai harus fokus pada sosialisasi kebijakan terkait proses administrasi pegawai, pengembangan kompetensi pegawai melalui pelatihan, *coaching*, dan mentoring.
3. Pelayanan Umum Kearsipan
 - a. Penyediaan sarana dan prasarana yang sesuai kebutuhan serta peraturan yang berlaku;
 - b. Adanya peningkatan kompetensi bagi SDM yang mengelola arsip.
4. Pelayanan Umum Komunikasi Publik



- a. Perlu adanya surat keputusan yang disahkan terkait pengelola setiap kanal media sosial yang memuat tugas dan tanggung jawab dari masing-masing pengelola kanal media sosial dan aset-aset komunikasi publik.
 - b. Perlu adanya jadwal yang disepakati terhadap monitoring dan evaluasi secara rutin dan berkala, termasuk monitoring terhadap penggunaan aset-aset barang komunikasi publik.
 - c. Pengikutsertaan anggota komunikasi publik dalam kegiatan pelatihan/*workshop*, maupun *transfer of knowledge* antar anggota terkait komunikasi publik yang diikutkan dalam pelatihan/*workshop*.
 - d. Perlu adanya disposisi terhadap petugas dokumentasi terkait kegiatan penting balai, namun apabila tidak ada anggota tim komunikasi publik yang bertugas, dilakukan koordinasi dengan tim yang bertugas dalam kegiatan penting balai tersebut.
5. Pembangunan Zona Integritas
- Jumlah personil untuk pokja dengan bukti dukung yang tidak terdapat pada tugas keseharian BPLJ perlu ditambah menjadi 2 orang sehingga dapat meringankan penyusunan bukti dukung terutama ketika beban kerja tinggi.
6. Pelayanan Umum Pelaporan
- Dalam penyusunan daftar risiko balai untuk tahun berjalan yang akan datang akan lebih bersinergi dengan Unit Kepatuhan Internal (UKI) Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan dalam hal inventarisasi profil risiko serta meningkatkan partisipasi aktif seluruh pegawai BPLJ dalam hal ide atau gagasan terkait risiko di balai.

3.3 Perbandingan Kinerja Organisasi

Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi dari masing-masing instansi pemerintah. Proses pengukuran kinerja Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran dari Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, output (keluaran) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. Sementara itu, yang dimaksud dengan *outcome* (hasil) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Dalam mengukur kinerja berbasis *outcome*, Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan menyusun SK IKU, perbandingan capaian kinerja internal berbasis outcome berdasarkan SK IKU BPLJ dalam beberapa tahun terakhir ditunjukkan pada Tabel 3.6. Capaian *outcome* Balai

Perkerasan dan Lingkungan Jalan dapat melebihi target yang ditentukan dan setiap tahun selalu meningkat, ini membuktikan bahwa output yang dihasilkan oleh Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan banyak digunakan oleh internal maupun eksternal Kementerian PUPR.

Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Outcome Kinerja Beberapa Tahun Terakhir

INDIKATOR KINERJA UTAMA BPLJ	SAT	2020			2021			2022			2023			2024			
		Target	Realisasi	Kinerja													
Tingkat Pelayanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan																	
Parameter	Teknologi bidang jalan dan jembatan yang dikembangkan	%	90	-	-	90	91,67	100	90	92,86	100	90	93,33	100	90	92,86	103.18
Parameter	Tingkat fasilitasi pengujian laboratorium dan advis teknik	%	80	-	-	82	88,86	100	85	91,87	100	87	94,48	100	90	96,12	106.80

Tabel 3.7 Perbandingan Capaian Output Kinerja Beberapa Tahun Terakhir

No	OUTPUT	SAT	2020			2021			2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Kinerja												
1	Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100	1	1	100	1	1	100	1	1	100	1	1	100
2	Pembinaan Teknik Bidang Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100	1	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	100	1	1	100	1	1	100	1	1	100	1	1	100
4	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	1	1	100	1	1	100	-	-	-	1	1	100	-	-	-
5	Layanan Sarana Internal	Unit	1	1	100	1	1	100	1	1	100	1	1	100	1	1	100
6	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	-	-	-	-	-	-	1	1	100	1	1	100	1	1	100

Perbandingan capaian output kinerja dalam beberapa tahun terakhir, dapat dilihat di Tabel 3.7

Tabel 3.7. Selama empat tahun terakhir, rincian capaian output mengalami perubahan, pada tahun 2024 output layanan dukungan manajemen satker atau layanan umum disederhanakan dengan melebur ke output layanan perkantoran.



Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Renstra

No	OUTPUT	SAT	Target Renstra 2020-2024	2020	2021	2022	2023			2024			Capaian Kumulatif
				Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target Renstra	Target PK	Realisasi	Target Renstra	Target PK	Realisasi	
1	Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100
2	Pembinaan Teknik Bidang Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	100
3	Layanan Perkantoran	Layanan	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100
4	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	100
5	Layanan Sarana Internal	Unit	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100
6	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	3	-	-	1	1	1	1	1	1	1	100

Perbandingan antara realisasi kinerja setiap tahun dengan target renstra ditunjukkan pada Tabel 3.8. Sedangkan perbandingan capaian output kinerja dengan unit kerja lain sejenis ditunjukkan pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9 Perbandingan Capaian Output Kinerja Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan dan Balai Bahan Jalan TA.2024

NO	OUTPUT	SAT	Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan			Balai Bahan Jalan		
			Target	Realisasi	Kinerja (%)	Target	Realisasi	Kinerja (%)
1	ABF 001 Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	1,00	1,00	100	1,00	1,00	100,00
2	ABF 007 Pembinaan Teknik Bidang Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	1,00	1,00	100,00
3	EBA 960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	1,00	1,00	100	1,00	1,00	100,00
4	EBA 962 Layanan Umum	Layanan	-	-	-	1,00	1,00	100,00
5	EBA 994 Layanan Perkantoran	Layanan	1,00	1,00	100	1,00	1,00	100,00
6	EBB 951 Layanan Sarana Internal	Unit	1,00	1,00	100	1,00	1,00	100,00



Berdasarkan Permen PUPR Nomor 16 Tahun 2020, Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan penerapan teknologi dan memberikan layanan teknis di bidang perkerasan jalan, lingkungan jalan, dan peralatan survei melalui koordinasi dengan Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan.

Pada Tahun Anggaran 2020 Laporan Kinerja Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan masih bergabung dalam LKIP Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan. Kondisi pandemi Covid-19 cukup berpengaruh pada pelaksanaan anggaran di tahun 2020 – 2021, sehingga kegiatan yang dilakukan belum optimal. Pada Tahun 2022, BPLJ sudah dapat beradaptasi dengan kondisi pandemik Covid-19 sehingga kegiatan di lingkungan BPLJ dapat dioptimalkan. Disisi lain, terdapat kebijakan TKDN sehingga sebagian pengadaan barang di lingkungan BPLJ tidak dapat dilakukan yang mengakibatkan kinerja BPLJ menjadi kurang optimal. Untuk efektivitas pelaksanaan kegiatan balai, BPLJ menyusun tiga Kelompok Bidang Keahlian sebagai struktur organisasi kelompok jabatan fungsional, sehingga kegiatan-kegiatan kajian kebijakan serta pelayanan teknis di bidang perkerasan dan lingkungan jalan lebih terkendali.

Pada Tahun 2022 terdapat perubahan Perjanjian Kinerja, dalam hal ini Output Pembinaan Teknik Bidang Jalan dan Jembatan dihilangkan menyesuaikan target perjanjian kinerja yang ada pada Renstra Bina Marga 2020 – 2024 dan penyesuaian kembali output pada indikator kinerja Dukungan Manajemen Kementerian. Tahun 2022, BPLJ berusaha untuk meningkatkan kinerjanya khususnya untuk kegiatan pelayanan teknis. Pada tahun 2022, BPLJ melakukan kegiatan-kegiatan sejumlah 4 kajian teknis, 10 penyusunan standar pedoman, serta menerima 216 layanan teknis yang terdiri atas setidaknya 40 kegiatan advis teknis, 18 kegiatan layanan pengujian baik berupa layanan pengujian eksternal (PNBP) maupun layanan pengujian internal, serta pendampingan teknis berupa rapat maupun sebagai narasumber untuk memberikan rekomendasi penanganan atas permasalahan yang ditinjau. Dalam hal ini, terjadi peningkatan kinerja di BPLJ dari yang sebelumnya kegiatan kajian pengembangan dan penerapan teknologi sejumlah 4 kegiatan pada tahun 2020 dan 12 kegiatan pada tahun 2021, serta peningkatan pada jumlah pelayanan teknis dari sebelumnya 123 kegiatan layanan teknis pada tahun 2021.

Pada tahun 2023, kegiatan yang dilakukan oleh Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan terdapat peningkatan, dimana untuk kegiatan Layanan Keteknikan di Bidang Jalan dan Jembatan, untuk kegiatan layanan teknis BPLJ telah menerima 249 layanan yang terdiri atas 171 kegiatan advis teknis, 78 kegiatan layanan pengujian baik berupa layanan pengujian eksternal (PNBP) maupun layanan pengujian internal. Sedangkan untuk pengembangan dan penerapan teknologi telah menghasilkan 3 kajian teknis, 2 aplikasi, 1 *basic design*, 23 pedoman terkait dengan bidang keteknikan perkerasan dan lingkungan jalan.

Pada tahun 2024, kegiatan yang dilakukan oleh Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan terdapat peningkatan, dimana untuk kegiatan Layanan Keteknikan di Bidang Jalan dan Jembatan, untuk kegiatan layanan teknis BPLJ telah menerima 279 layanan yang terdiri atas 213 kegiatan advis teknis, 66 kegiatan layanan pengujian baik berupa layanan pengujian eksternal (PNBP) maupun layanan pengujian internal. Sedangkan untuk pengembangan dan penerapan teknologi telah menghasilkan 4 kajian, 1 prototipe, 2 aplikasi, 1 pedoman, dan 6 kegiatan internalisasi terkait dengan bidang keteknikan perkerasan dan lingkungan jalan.

3.4 Analisis Realisasi Anggaran

3.4.1 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Selama Tahun Anggaran 2024, terdapat 9 kali revisi anggaran. DIPA Awal tahun 2024 disahkan pada tanggal 24 November 2023, yang merupakan DIPA awal pada Satuan Kerja (Satker) Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan. Komposisi DIPA Awal TA.2024 diantaranya RPM sebesar Rp. 12.172.126.000,00 . Pagu terakhir Satuan Kerja (Satker) Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan sebesar Rp. 12.181.731.000,00 dengan komposisi seluruhnya RPM dapat dilihat pada Tabel 3.10.

Kronologis perubahan DIPA Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan TA.2024 dapat dilihat pada Tabel 3.11. Perubahan DIPA selama Tahun 2024 secara garis besar dilakukan berdasarkan kebutuhan kegiatan dimana adanya kendala pemindahan alokasi PPNPN pegawai pemerintah non pegawai negeri dari Bina Teknik ke Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan. Selain itu perubahan alokasi anggaran dikarenakan pagu alokasi uang makan yang berlebih menyebabkan capaian progres realisasi menjadi turun sehingga dilakukan perubahan revisi anggaran.

Tabel 3.10 Alokasi Anggaran DIPA Satker BPLJ TA 2024

NO	UNIT KERJA	SUMBER DIPA			
		RPM	PHLN	SBSN	TOTAL
1	Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan	12.172.126.000	0	0	Rp 12.172.126.000
JUMLAH		12.172.126.000	0	0	Rp 12.172.126.000



Tabel 3.11 Kronologis Perubahan DIPA Satker BPLJ TA 2024

NO	DIPA AWAL/ REVISI	NILAI DIPA AWAL/ SEMULA	JENIS REVISI				Kenaikan/ Penurunan	NILAI DIPA AKHIR/ MENJADI	ALASAN/PENYEBAB REVISI
			DJA	KANWIL	DIGITAL STAMP	TANGGAL PENGESAHAN			
1.	DIPA Awal		V		1480-4703-0134-7547	24 November 2023		Rp. 12.172.126.000,-	DIPA Awal
2.	Revisi-1	Rp. 12.172.126.000,-		V	1480-4703-0134-7547	20 Februari 2024		Rp. 12.172.126.000,-	<ul style="list-style-type: none"> • Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA • Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK
3.	Revisi-2	Rp. 12.172.126.000,-		V	1480-4703-0134-7547	23 April 2024		Rp. 12.172.126.000,-	<ul style="list-style-type: none"> • Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA • Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK
4.	Revisi-3	Rp. 12.172.126.000,-		V	1480-4703-0134-7547	03 Juni 2024		Rp. 12.172.126.000,-	<ul style="list-style-type: none"> • Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA • Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK
5.	Revisi-4	Rp. 12.172.126.000,-		V	9014-3417-1318-6205	13 Juni 2024	(+) Rp. 413.254.000,-	Rp. 12.585.380.000,-	Pemenuhan Gaji Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri dari Dit Bintek Jalan dan Jembatan
6.	Revisi-5	Rp. 12.585.380.000,-		V	9014-3417-1318-6205	15 Juli 2024		Rp. 12.585.380.000,-	<ul style="list-style-type: none"> • Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA • Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK
7.	Revisi-6	Rp. 12.585.380.000,-	V		5667-4200-1374-0749	15 Oktober 2024	(-) Rp. 240.053.000,-	Rp. 12.345.327.000,-	Optimalisasi anggaran Direktorat Jenderal Binamarga untuk pemenuhan kegiatan prioritas
8.	Revisi-7	Rp. 12.345.327.000,-	V		1004-7128-2140-6312	11 November 2024	(-) Rp. 163.596.000,-	Rp. 12.181.731.000,-	Optimalisasi anggaran Direktorat Jenderal Binamarga untuk pemenuhan kegiatan prioritas



NO	DIPA AWAL/ REVISI	NILAI DIPA AWAL/ SEMULA	JENIS REVISI				Kenaikan/ Penurunan	NILAI DIPA AKHIR/ MENJADI	ALASAN/PENYEBAB REVISI
			DJA	KANWIL	DIGITAL STAMP	TANGGAL PENGESAHAN			
9.	Revisi-8	Rp. 12.181.731.000,-		V	8010-4324-8448-7700	18 November 2024		Rp. 12.181.731.000,-	<ul style="list-style-type: none"> • Menindaklanjuti Surat Menteri Keuangan Nomor: S-1023/MK.02/2024 tanggal 7 November 2024 Hal: Langkah – Langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga TA 2024. • Pencantuman catatan Halaman IV. (Blokir Pagu Perjalanan Dinas) • Pemutahiran data hasil revisi POK
10	Revisi-9	Rp. 12.181.731.000,-		V	8010-4324-8448-7700	31 Desember 2024		Rp. 12.181.731.000,-	Pemutahiran data hasil revisi POK

Tabel 3.12 Jumlah Anggaran Tahun 2020 s.d 2024

Tahun Anggaran	PAGU	Sumber Dana	Realisasi Anggaran	Rata - Rata Capaian Kinerja (%)
2020*	-	RPM	-	100%
2021	9.460.457.000	RPM	9.391.455.000	100%
2022	11.179.184.000	RPM	10.849.205.000	99,63%
2023	11.755.966.000	RPM	11.443.520.000	99,21%
2024	12.172.126.000	RPM	12.095.138.000	100%

*Pada tahun 2020, BPLJ baru terbentuk sehingga anggaran balai masih mengacu ke anggaran Dit. Binteckjatan

Perbandingan jumlah anggaran BPLJ dari tahun 2020 sampai dengan 2024 ditunjukkan pada Tabel 3.12. Setiap tahun jumlah anggaran BPLJ selalu meningkat dengan sumber dana anggaran BPLJ sejak tahun 2020 sampai 2024 berasal dari RPM.

3.4.2 Realisasi Anggaran TA 2024

Berdasarkan ie-monitoring PUPR, Pagu Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp 12.181.731, dengan realisasi sebesar Rp 12.095.138 atau menyerap anggaran sebesar 99,29%, sedangkan realisasi fisik sampai akhir tahun anggaran 2024 sudah mencapai nilai 100%. Perbandingan realisasi anggaran dengan PAGU Anggaran Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.13, sedangkan kurva S capaian fisik dan keuangan dapat dilihat pada Gambar 3.6 dan Gambar 3.7.

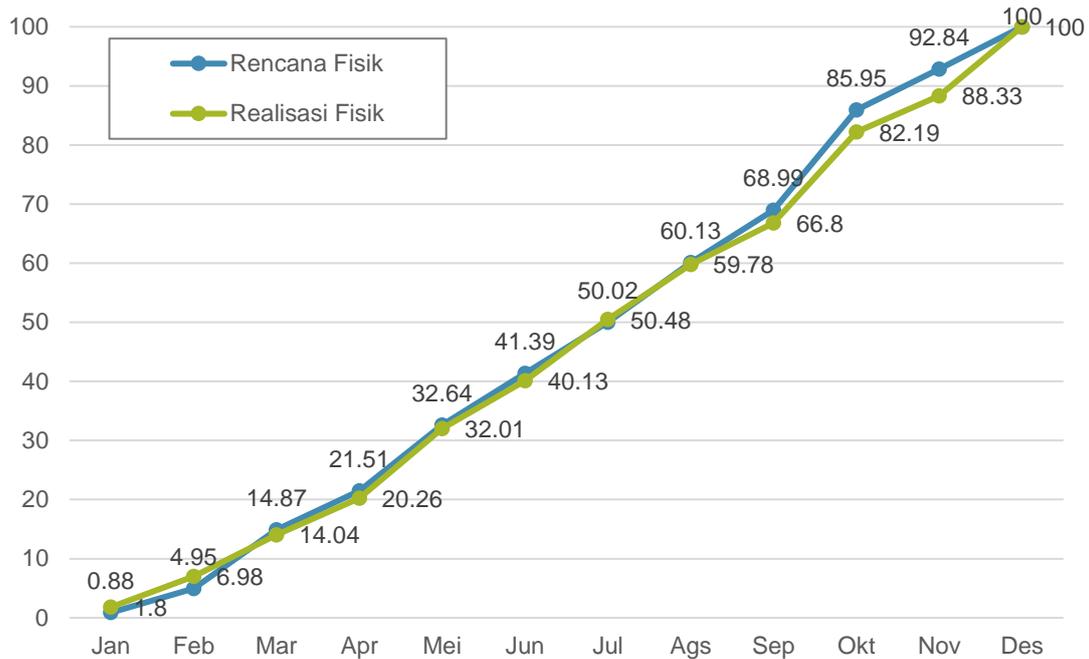
Tabel 3.13 Perbandingan Realisasi Anggaran dengan PAGU Anggaran Tahun 2024

NO	OUTPUT	PAGU ANGGARAN (Rp Ribu)		REALISASI (Rp Ribu)	CAPAIAN (%)		KET
		AWAL (PK Revisi)	REVISI AKHIR		THD TARGET AWAL	THD TARGET REVISI AKHIR	
	BALAI PERKERASAN DAN LINGKUNGAN JALAN	12.181.731	12.181.731	11.650.746	95,64	95,64	
	Sasaran Program: Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional						
	IKP 3: Rating Keselamatan Jalan Nasional	7.282.690	7.282.690	7.038.102	96,64	96,64	
	Indikator Kinerja Kegiatan: Tingkat Pelayanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan						
	ABF 001 Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan	7.282.690	7.282.690	7.038.102	96,64	96,64	
	Kajian Rekomendasi	2.670.410	2.566.264	2.463.821	92,26	96,01	

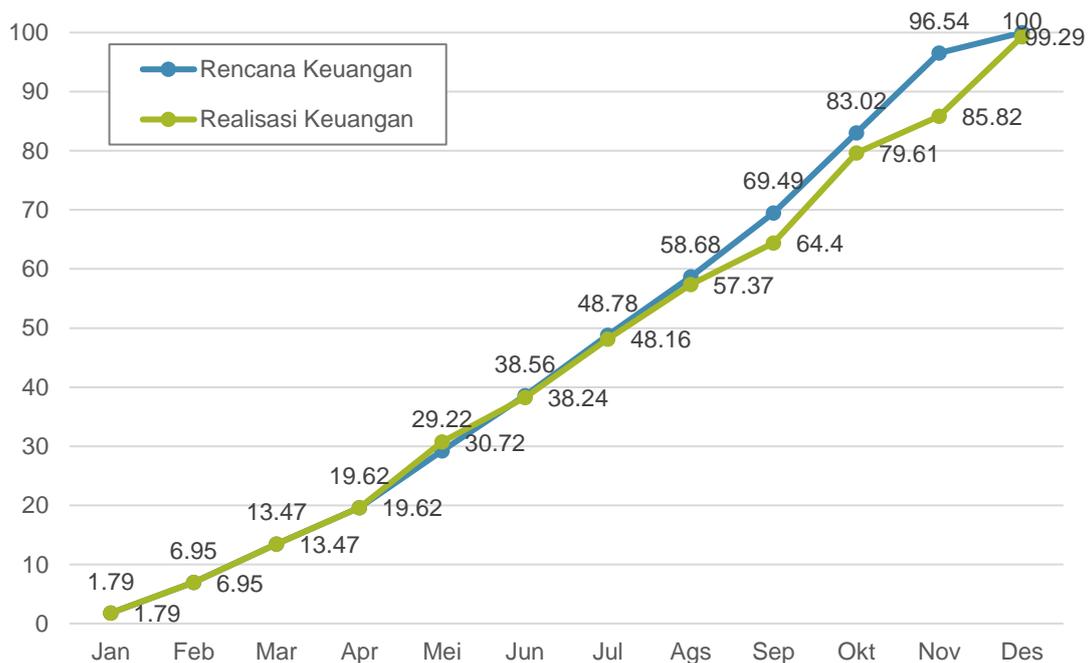


NO	OUTPUT	PAGU ANGGARAN (Rp Ribu)		REALISASI (Rp Ribu)	CAPAIAN (%)		KET
		AWAL (PK Revisi)	REVISI AKHIR		THD TARGET AWAL	THD TARGET REVISI AKHIR	
	Kebijakan Bidang Perkerasan dan Lingkungan Jalan						
	Layanan Teknis Bidang Perkerasan dan Lingkungan Jalan	4.612.280	4.716.426	4.574.281	99,18	96,99	
Sasaran Program: Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya							
IKP: Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR		4.899.041	4.899.041	4.612.644	94,15	94,15	
Indikator Kinerja Kegiatan: Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Jalan							
EBA 960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	2.289.599	2.289.599	2.256.203	98,54	98,54	
	Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan	2.011.489	2.014.388	1.984.572	98,66	98,52	
	Pembangunan Zona Intregitas	278.110	275.211	271.631	97,67	98,70	
EBA 994	Layanan Perkantoran	2.475.864	2.475.864	2.222.864	89,78	89,78	
	Gaji dan Tunjangan	299.326	299.326	268.046	89,55	89,55	
	Pemeliharaan Gedung Kantor, Sarana dan Prasarana	905.161	919.841	712.211	78,68	77,43	
	Operasional Perkantoran	1.271.377	1.256.697	1.242.607	97,74	98,88	
EBB 951	Layanan Sarana Internal	133.578	133.578	133.577	100,00	100,00	
	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	133.578	133.578	133.577	100,00	100,00	





Gambar 3.6 Kurva S Realisasi dan Rencana Fisik TA 2024



Gambar 3.7 Kurva S Realisasi dan Rencana Keuangan TA 2024

3.4.3 Perbandingan Realisasi Anggaran TA. 2024 dengan Tahun sebelumnya

Sebagai perbandingan pagu dan realiasi anggaran terkait outcome dari Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan dapat dilihat pada Tabel 3.14 berikut:



Tabel 3.14 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun Anggaran 2023 (Rp Ribu)		Tahun Anggaran 2024 (Rp Ribu)		
	PAGU	Realisasi	PAGU	Realisasi	
IKSP : Rating Keselamatan Jalan Nasional					
IKK : Tingkat kualitas layanan keteknikan bidang jalan dan jembatan					
Parameter <i>Tingkat fasilitasi pengujian laboratorium dan advis teknik</i>					
Parameter <i>Teknologi bidang jalan dan jembatan yang dikembangkan</i>					
Rincian Output					
ABF 001	Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan	7.383.263	7.155.006	7.282.690	7.217.254
IKSP : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR					
IKK : Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Jalan					
Parameter <i>Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR</i>					
Rincian Output					
EBA 960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.669.833	1.701.214	2.289.599	2.284.563
EBA 962	Layanan Umum	556.801	525.420	-	-
EBA 994	Layanan Perkantoran	1.654.037	1.643.654	2.475.864	2.459.744
EBB 951	Layanan Sarana Internal	492.032	487.132	133.578	133.577

3.4.4 Isu Terkait Program dan Anggaran TA 2024

Terkait program yang dijalankan, Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan telah menyusun Naskah Akademik sebagai syarat keberterimaan konstruksi jalan. Penyusunan naskah akademik ini merupakan salah satu kegiatan strategis yang mendukung proses harmonisasi spesifikasi umum pada bidang jalan dan jembatan.

Dalam hal pengelolaan anggaran, sepanjang tahun anggaran berlangsung telah dilakukan beberapa kali perubahan alokasi. Pada pertengahan tahun, dialokasikan dana sebesar Rp413.254.000 untuk memenuhi kebutuhan gaji Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri (PPNPN) dari Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan, meskipun sempat menghadapi kendala teknis dalam prosesnya.

Selanjutnya, optimalisasi anggaran oleh Direktorat Jenderal Bina Marga untuk mendukung kegiatan prioritas dilakukan perubahan anggaran pada bulan Oktober dengan alokasi sebesar Rp240.053.000, dan pada bulan November sebesar Rp163.596.000. Namun, menjelang akhir tahun, penyerapan anggaran menghadapi hambatan akibat adanya pagu blokir untuk paket meeting, yang mengakibatkan proses pelaksanaan anggaran menjadi terkendala.



3.5 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan mempunyai berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Bina Marga melalui Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan, dan Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan jalan dipimpin oleh seorang Kepala Balai. Jumlah pegawai di Balai Bahan Jalan pada tahun 2024 sebanyak 58 orang pegawai dengan rincian ditampilkan pada Tabel 3.15.

Tabel 3.15 Daftar Rincian Pegawai Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan	1 Orang
2	Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha	1 Orang
3	Ketua Tim Dukungan Penerapan Teknologi	1 Orang
4	Ketua Tim Layanan Teknis	1 Orang
5	Ketua Tim Kepegawaian dan Umum	1 Orang
6	Staf ASN	41 Orang
7	Non PNS Substantif dan Pendukung	12 Orang

Dari jumlah tersebut sebanyak 58 adalah pegawai yang ditugaskan guna mendukung kegiatan manajemen (ketatausahaan dan kesatkeran), Advis dan Layanan Teknis serta Pengembangan dan Penerapan Teknologi Bidang Perkerasan dan Lingkungan Jalan.

Pada tahun 2024 capaian kinerja Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan tercapai sebesar 100%, hal ini menunjukkan bahwa Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan dapat melaksanakan setiap kegiatan diatas sesuai dengan permintaan yang masuk dan dapat diselesaikan. Untuk meningkatkan kinerja yang lebih optimal pada tahun berikutnya beberapa upaya akan dilakukan sebagai berikut:

1. Adanya komitmen dan integritas yang tinggi para pegawai di Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan dalam mencapai kinerja sesuai target yang telah ditetapkan.
2. Pemantauan dan Evaluasi kinerja setiap pegawai
3. Memberikan pelatihan berkala untuk meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial, serta mendorong sertifikasi bagi SDM sesuai dengan kebutuhan organisasi.



Tabel 3.16 Efisiensi Penggunaan Anggaran

Tahun Anggaran	Jumlah SDM	PAGU	Realisasi Anggaran	Rata - Rata Capaian Kinerja (%)
2020*	56	-	-	100%
2021	67	9.460.457.000	9.391.455.000	100%
2022	66	11.179.184.000	10.849.205.000	99,63%
2023	68	11.755.966.000	11.443.520.000	99,21%
2024	58	12.172.126.000	12.095.138.000	100%

Efisiensi dalam pengelolaan anggaran (Tabel 3.16) merujuk pada kemampuan untuk mencapai tujuan atau hasil yang diharapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal. Efisiensi tidak hanya berarti menghemat anggaran, tetapi juga mencakup penggunaan anggaran secara strategis untuk menghasilkan dampak yang maksimal. Pada tahun anggaran 2024, Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan mengelola pagu anggaran sebesar Rp.12.172.126.000 dengan realisasi serapan anggaran sebesar Rp.12.095.138.000, di mana target yang telah direncanakan berhasil tercapai.

Efisiensi dalam pemanfaatan sarana dan prasarana dilakukan dengan mengoptimalkan penggunaan gedung, halaman kantor, dan ruang rapat untuk berbagai kegiatan di Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan Selain itu, efisiensi juga diwujudkan melalui pemeliharaan rutin terhadap aset yang dimiliki, seperti kendaraan operasional, alat laboratorium, gedung, serta halaman kantor.

3.6 Pemanfaatan Laporan Kinerja

Pemanfaatan laporan kinerja merupakan salah satu komponen baru dalam penilaian laporan kinerja 2024. Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disampaikan mengenai pengaturan terbaru terhadap pembobotan penilaian pelaporan kinerja. Adapun kriteria-kriteria dalam komponen baru meliputi apakah informasi dalam laporan kinerja telah menjadi perhatian pimpinan dan seluruh pegawai serta telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas, penyesuaian anggaran, evaluasi, perencanaan kinerja tahun berikutnya, dan dalam mempengaruhi budaya kerja.

Selanjutnya, untuk menindaklanjuti hal tersebut Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan telah melakukan penyampaian dan pengisian kuesioner kepada seluruh Pimpinan Unit Kerja di lingkungannya serta jajarannya. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan bukti dukung pemanfaatan laporan kinerja sebagaimana disampaikan sebelumnya.

Pada kuesioner yang disampaikan, secara garis besar terdapat 7 (tujuh) poin utama, sesuai dengan kriteria dari PANRB, yang ditanyakan kepada responden. Kemudian, responden

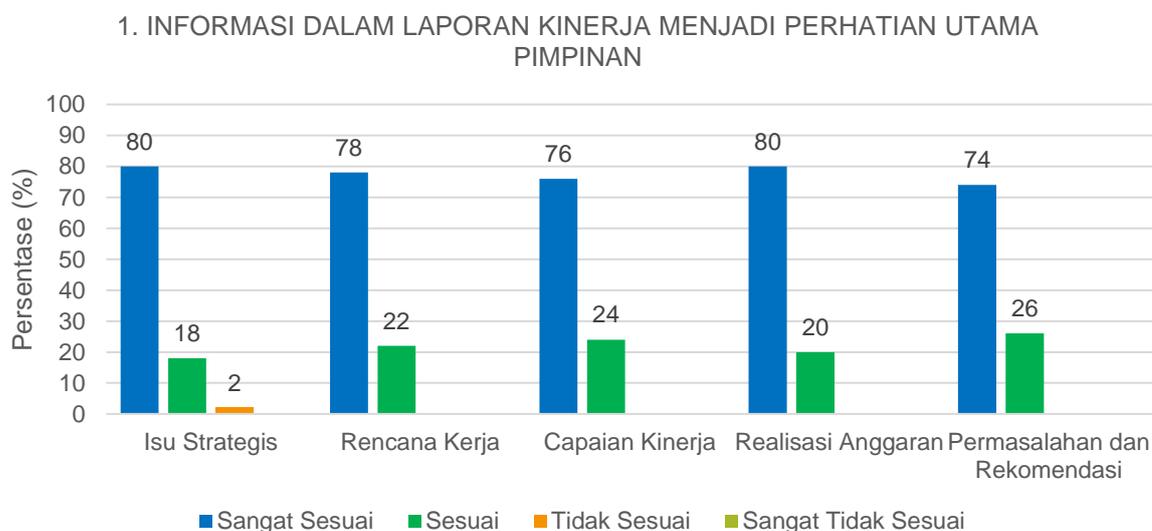


diberikan 4 (empat) pilihan jawaban terhadap kebermanfaatan laporan kinerja mulai dari sangat sesuai, sesuai, tidak sesuai, dan sangat tidak sesuai. Berdasarkan hasil kuesioner yang dilakukan dapat diketahui bahwa laporan kinerja telah memberikan manfaat dan menjadi acuan dalam melakukan evaluasi untuk penyusunan pemrograman kegiatan unit kerja/balai tahun berikutnya.

Adapun hasil dari kuesioner tersebut khususnya di lingkungan Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan dari jumlah 50 (lima puluh) responden pegawai, untuk setiap kriterianya dapat dilihat sebagai berikut.

1. Kriteria 1, informasi dalam laporan kinerja menjadi perhatian utama pimpinan, yang mencakup hal berikut:
 - a. Informasi isu strategis dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja tahun 2024 dibahas oleh pimpinan unit organisasi/unit kerja.
 - b. Informasi rencana kerja dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja tahun 2024 dibahas oleh pimpinan unit organisasi/unit kerja.
 - c. Informasi capaian kinerja dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja tahun 2024 dibahas oleh pimpinan unit organisasi/unit kerja.
 - d. Informasi realisasi anggaran dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja tahun 2024 dibahas oleh pimpinan unit organisasi/unit kerja.
 - e. Informasi permasalahan dan rekomendasi dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja tahun 2024 dibahas oleh pimpinan unit organisasi/unit kerja.

Hasil kuesioner (Gambar 3.8) menunjukkan rata-rata 77,60% responden menyatakan sangat sesuai, 22,00 % responden menyatakan sesuai, dan 0,40% responden menyatakan tidak sesuai.

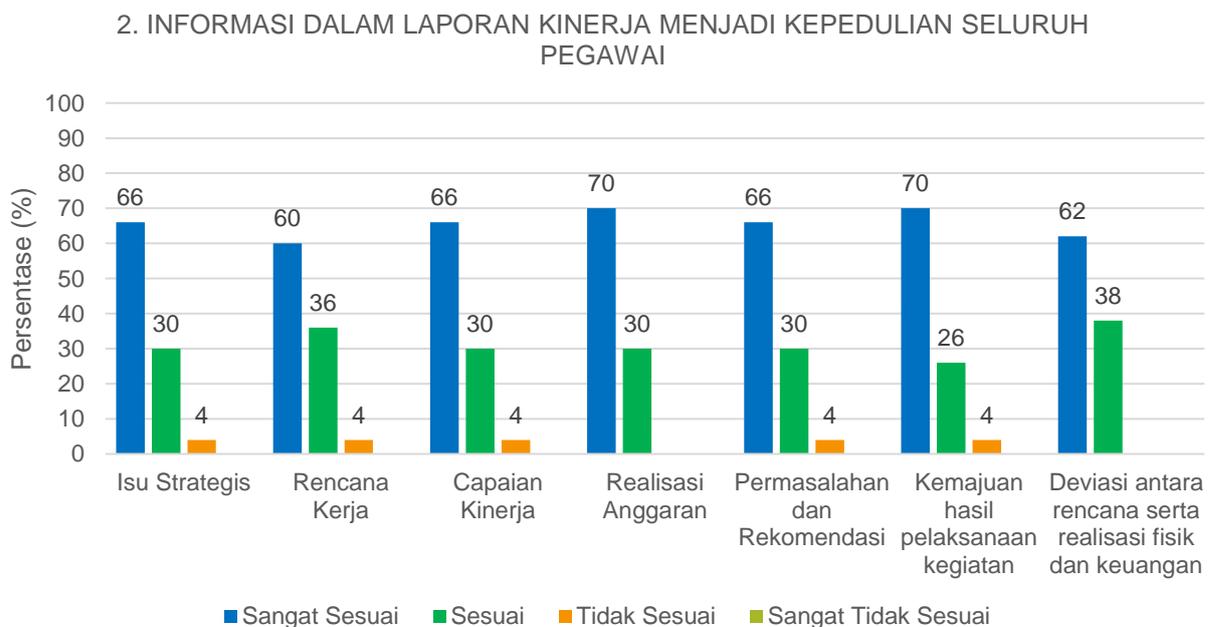


Gambar 3.8 Hasil Kuesioner Kriteria 1



2. Kriteria 2, informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai, yang mencakup hal berikut:
- Saya mengetahui informasi isu strategis unit organisasi/unit kerja dalam laporan kinerja tahun 2024.
 - Saya mengetahui informasi rencana kerja unit organisasi/unit kerja dalam laporan kinerja tahun 2024.
 - Saya mengetahui informasi capaian kinerja unit organisasi/unit kerja dalam laporan kinerja tahun 2024.
 - Saya mengetahui informasi realisasi anggaran unit organisasi/unit kerja dalam laporan kinerja tahun 2024.
 - Saya mengetahui informasi permasalahan dan rekomendasi unit organisasi/unit kerja dalam laporan kinerja tahun 2024.
 - Saya mengetahui informasi kemajuan hasil pelaksanaan kegiatan dalam laporan kinerja tahun 2024.
 - Saya mengetahui informasi deviasi antara rencana serta realisasi fisik dan keuangan dalam laporan kinerja tahun 2024.

Hasil kuesioner (Gambar 3.9) menunjukkan rata-rata 65,71% responden menyatakan sangat sesuai, 31,43% responden menyatakan sesuai, dan 2,86% responden menyatakan tidak sesuai.

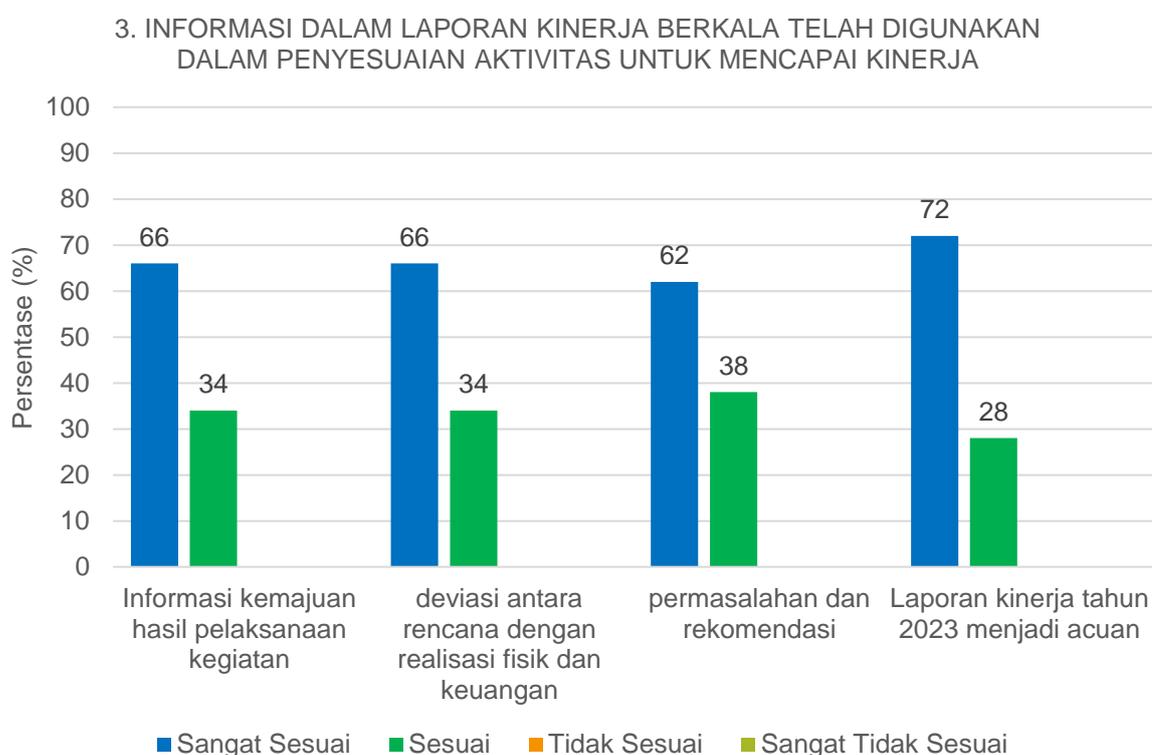


Gambar 3.9 Hasil Kuesioner Kriteria 2



3. Kriteria 3, informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja, yang mencakup hal berikut:
 - a. Informasi kemajuan hasil pelaksanaan kegiatan dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.
 - b. Informasi deviasi antara rencana dengan realisasi fisik dan keuangan dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.
 - c. Informasi permasalahan dan rekomendasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.
 - d. Laporan kinerja tahun 2023 menjadi acuan untuk penyusunan laporan kinerja tahun 2024.

Hasil kuesioner (Gambar 3.10) menunjukkan rata-rata 66,50% responden menyatakan sangat sesuai dan 33,50% responden menyatakan sesuai.



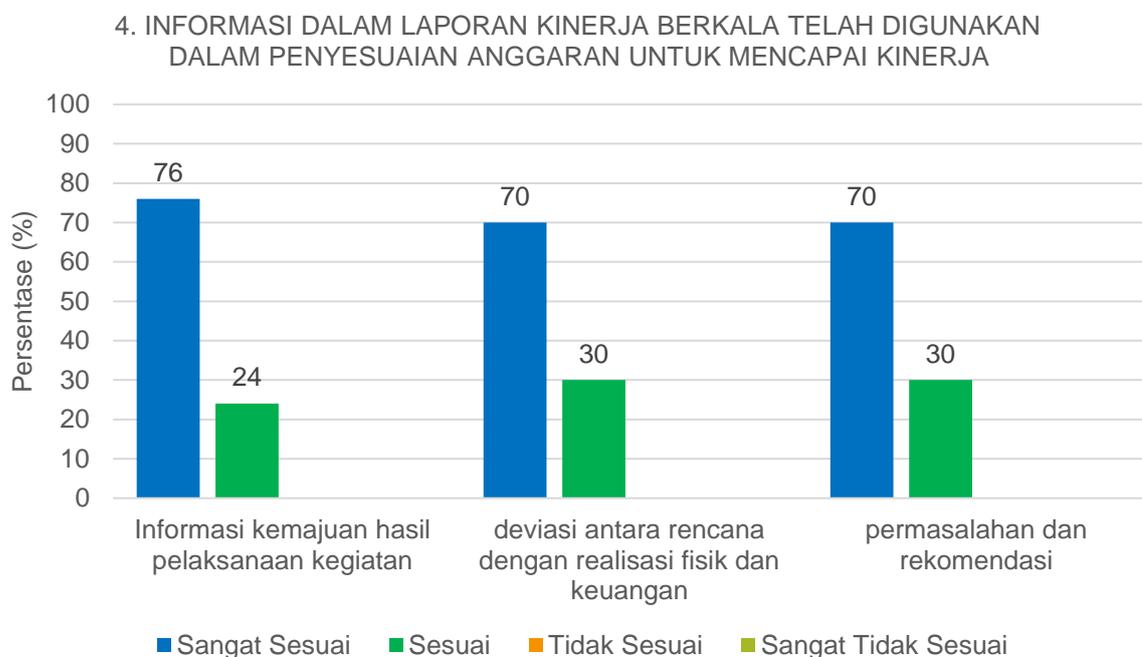
Gambar 3.10 Hasil Kuesioner Kriteria 3

4. Kriteria 4, informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian anggaran untuk mencapai kinerja, mencakup hal berikut:
 - a. Informasi kemajuan hasil pelaksanaan kegiatan dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian anggaran untuk mencapai kinerja.
 - b. Informasi deviasi antara rencana serta realisasi fisik dan keuangan dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian anggaran untuk mencapai kinerja.



- c. Informasi permasalahan dan rekomendasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian anggaran untuk mencapai kinerja.

Hasil kuesioner (Gambar 3.11) menunjukkan rata-rata 72,00% responden menyatakan sangat sesuai dan 28,00% responden menyatakan sesuai.



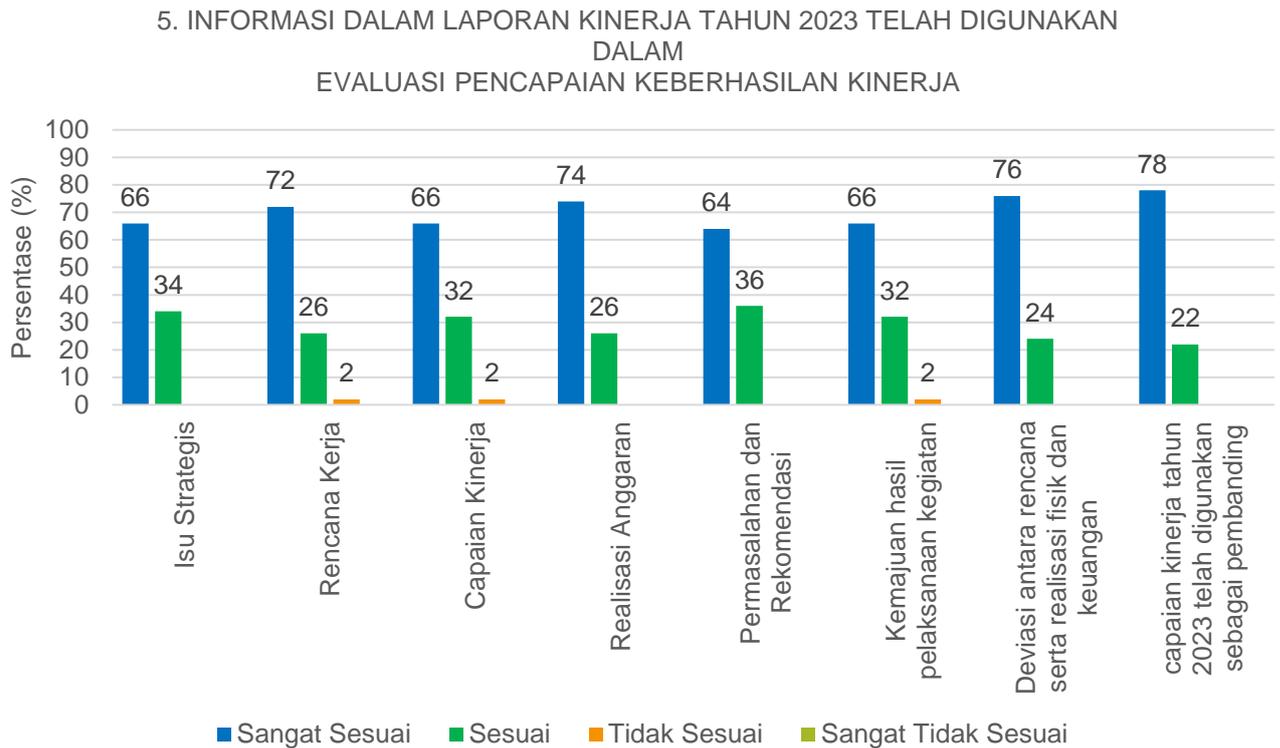
Gambar 3.11 Hasil Kuesioner Kriteria 4

- 5. Kriteria 5, informasi dalam laporan kinerja tahun 2024 telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, mencakup hal berikut:
 - a. Informasi isu strategis dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja tahun 2024 telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.
 - b. Informasi rencana kerja dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja tahun 2024 telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.
 - c. Informasi capaian kinerja dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja tahun 2024 telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.
 - d. Informasi realisasi anggaran dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja tahun 2024 telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.
 - e. Informasi realisasi anggaran dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja tahun 2024 telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.
 - f. Informasi kemajuan hasil pelaksanaan kegiatan dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.
 - g. Informasi deviasi antara rencana serta realisasi fisik dan keuangan dalam laporan kinerja tahun 2024 telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.



- h. Informasi capaian kinerja tahun 2023 telah digunakan sebagai pembandingan dalam mengevaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.

Hasil kuesioner (Gambar 3.12) menunjukkan rata-rata 70,25% responden menyatakan sangat sesuai, 29,00% responden menyatakan sesuai, dan 0,75% responden menyatakan tidak sesuai.



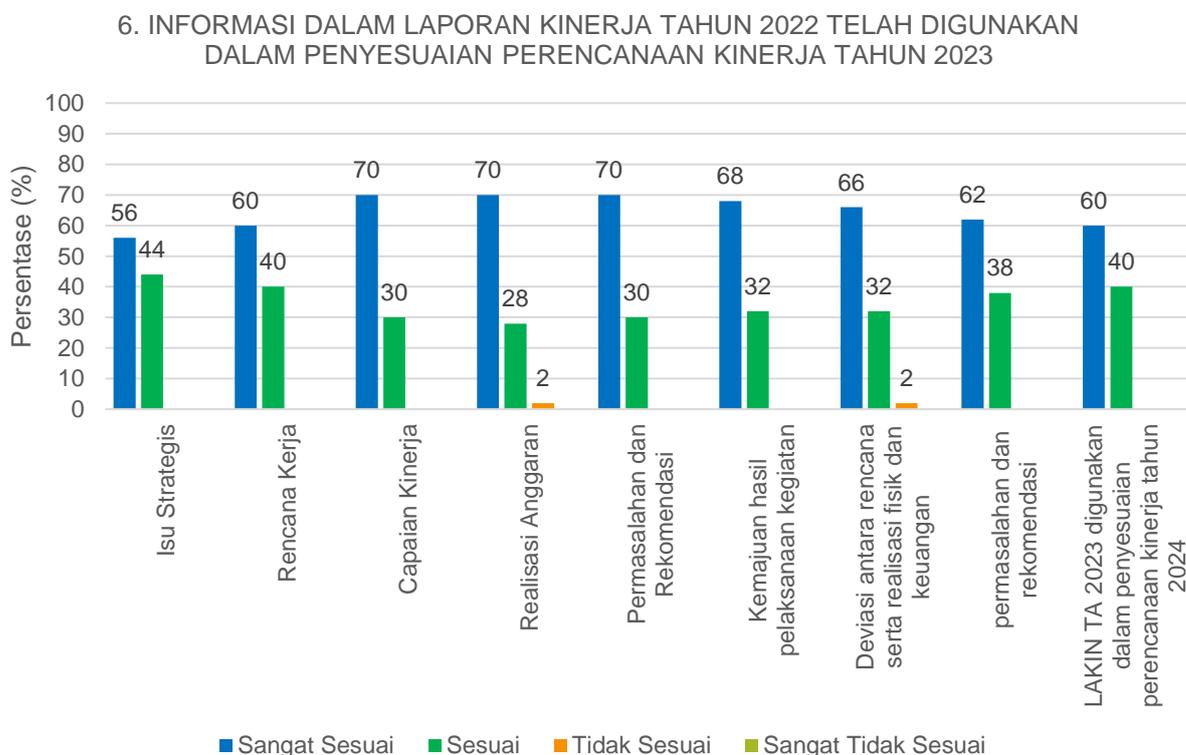
Gambar 3.12 Hasil Kuesioner Kriteria 5

6. Kriteria 6, informasi dalam laporan kinerja tahun 2023 telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja tahun 2024, yang mencakup hal berikut:
- Informasi isu strategis dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja tahun 2023 telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja tahun 2024.
 - Informasi rencana kerja dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja tahun 2023 telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja tahun 2024.
 - Informasi capaian kinerja dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja tahun 2023 telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja tahun 2024.
 - Informasi realisasi anggaran dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja tahun 2023 telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja tahun 2024.



- e. Informasi permasalahan dan rekomendasi dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja tahun 2023 telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja tahun 2024.
- f. Informasi kemajuan hasil pelaksanaan kegiatan dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja tahun 2024.
- g. Informasi deviasi antara rencana serta realisasi fisik dan keuangan dalam laporan kinerja tahun 2023 telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja tahun 2024.
- h. Informasi permasalahan dan rekomendasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja tahun 2024.
- i. Laporan kinerja tahun 2023 telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja tahun 2024.

Hasil kuesioner (Gambar 3.13) menunjukkan rata-rata 64,67% responden menyatakan sangat sesuai dan 34,89% responden menyatakan sesuai, dan 0,44% responden menyatakan tidak sesuai.



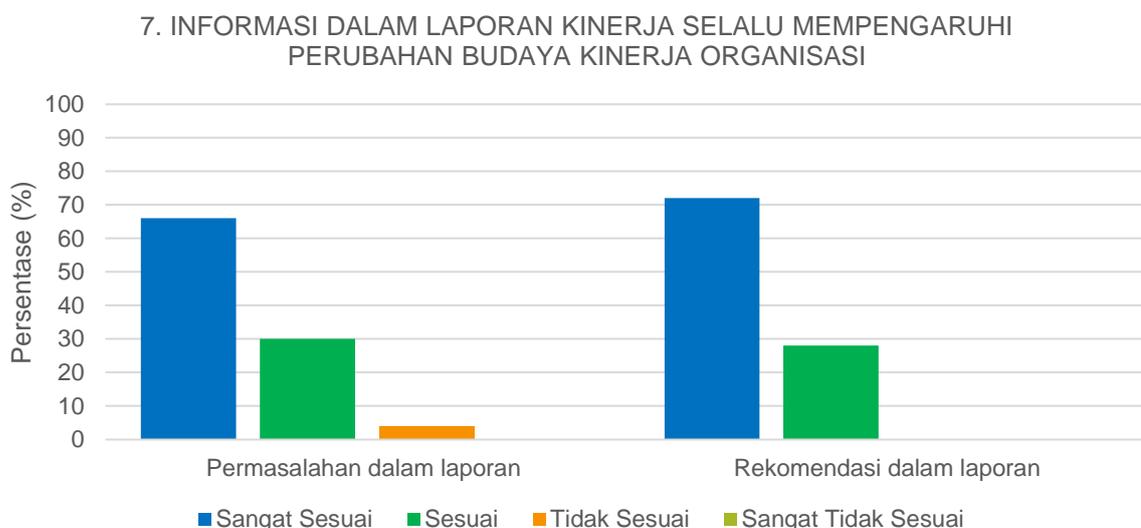
Gambar 3.13 Hasil Kuesioner Kriteria 6

7. Kriteria 7, informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi, yang mencakup hal berikut:



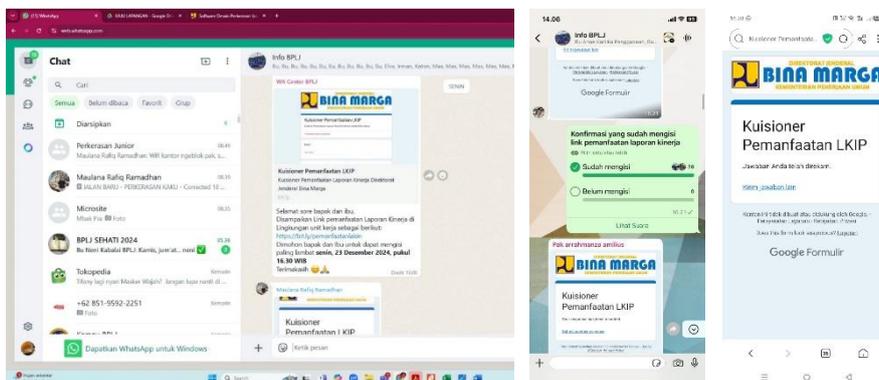
- a. Informasi permasalahan dalam laporan kinerja menjadi pertimbangan dalam meningkatkan budaya kinerja organisasi.
- b. Informasi rekomendasi dalam laporan kinerja menjadi pertimbangan dalam meningkatkan budaya kinerja organisasi.

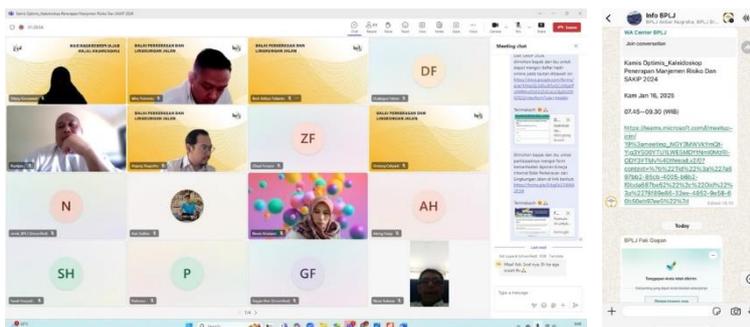
Hasil kuesioner (Gambar 3.14) menunjukkan rata-rata 69,00% responden menyatakan sangat sesuai, 29,00% responden menyatakan sesuai, dan 2,00% menyatakan tidak sesuai.



Gambar 3.14 Hasil Kuesioner Kriteria 7

Hasil kuesioner Pemanfaatan laporan kinerja di Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan memiliki persentase rata-rata nilai sangat sesuai yaitu 69,39%, sesuai 29,69%, dan tidak sesuai 1,29%. Dengan demikian dapat disimpulkan laporan kinerja Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan memiliki kebermanfaatan sangat baik. Berikut disampaikan bukti pengisian kuesioner di lingkungan Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan pada Gambar 3.15.





Gambar 3.15 Dokumentasi penyebaran Kuesioner

3.7 Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) atas Penggunaan Layanan Publik

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat ini pada prinsipnya mengacu pada Permen PANRB No. 14 tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat digunakan kuesioner sebagai alat bantu pengumpulan data kepuasan masyarakat penerima pelayanan. Kuesioner disusun berdasarkan tujuan survei yaitu untuk melihat tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh unit pelayan publik. Kuesioner yang diberikan kepada masyarakat terdiri dari 9 (sembilan) unsur pertanyaan berkaitan dengan pelayanan publik.

Bentuk jawaban pertanyaan dari setiap unsur pelayanan secara umum mencerminkan tingkat kualitas pelayanan, yaitu dari yang sangat baik sampai dengan tidak baik. Untuk kategori tidak baik diberi nilai persepsi 1, kurang baik diberi nilai persepsi 2, baik diberi nilai persepsi 3, sangat baik diberi nilai persepsi 4.

Dalam penghitungan indeks kepuasan masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata - rata tertimbang} = \frac{\text{jumlah bobot}}{\text{jumlah unsur}} = \frac{1}{9} = 0,111$$

Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 - 100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$IKM \text{ Unit Pelayanan} \times 25$$



Untuk melakukan analisa terhadap hasil perhitungan indeks dengan persepsi pelayananan, maka dapat dilihat dari Tabel 3.17.

Tabel 3.17 Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval Ikm	Nilai Interval Konversi Ikm	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,60	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,06	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,06 – 3,53	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,53 – 4,00	88,31 – 100,0	A	Sangat baik

Sumber: Permen PAN dan RB No 14 tahun 2017

Pada Tahun 2024 Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan telah melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat. dengan responden yang berasal dari Internal maupun Eksternal Kementerian PU. Pelaksanaan SKM ini dilakukan setiap triwulan. Tabel 3.18 berisi data hasil kuesioner yang telah dihimpun oleh BPLJ selama tahun 2024.

Tabel 3.18 Indeks Kepuasan Masyarakat BPLJ 2024

Unsur	Unsur Layanan	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Rata-Rata
U1	Persyaratan Pelayanan	95,24	98,21	100	94,17	96,91
U2	Prosedur Pelayanan	97,62	100	97,92	94,17	97,43
U3	Ketepatan Waktu Pelayanan	95,24	96,43	95,83	94,17	95,42
U4	Biaya / Tarif	91,67	92,86	91,67	91,67	91,97
U5	Mutu Hasil Pengujian	94,05	100	97,92	95,83	96,95
U6	Kompetensi pelaksana	97,62	98,21	95,83	95,83	96,87
U7	Perilaku Pelaksana	95,24	98,21	100	96,67	97,53
U8	Penangan Pengaduan, saran dan masukan	95,24	98,21	95,83	95,00	96,07
U9	Sarana dan Prasarana	96,43	100	95,83	94,17	96,61
	SKM BPLJ	95,37	98,01	96,76	94,63	96,12

Dari hasil survei kepuasan masyarakat Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan pada tahun 2024 mendapatkan nilai 96,12 dengan predikat Sangat Baik (A).



BAB 4

PENUTUP

4.1 Simpulan Umum

Laporan Kinerja Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan disusun sebagai bentuk akuntabilitas kinerja balai dalam penggunaan anggaran. Laporan ini terdiri dari 4 Bab yang berisi latar belakang, tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta isu strategis. Perencanaan Kinerja yang menguraikan renstra Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan yang mencangkup visi dan misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan. Perjanjian kinerja (PK) yang memuat target kinerja dengan membandingkan PK Awal dan PK Revisi serta metode pengukurannya. Kapasitas organisasi berisi profil sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) digunakan sebagai perangkat untuk mencapai capaian kinerja Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan. Upaya peningkatan akuntabilitas kinerja dengan melakukan perbaikan hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya, capaian kinerja terhadap seluruh indikator kinerja mencakup realisasi anggaran dan fisik, perbandingan kinerja organisasi, pemanfaatan laporan kinerja, paket diresmikan dan penghargaan, dan survei kepuasan masyarakat sebagai parameter sejauh mana tingkat pelayanan yang diberikan dalam melayani masyarakat.

4.1.1 Faktor Pendukung Keberhasilan

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan berdasarkan faktor internal meliputi:

1. Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan terus menerus meningkatkan komitmen dan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungannya. Penerapan SAKIP yang baik akan sangat berperan dalam meningkatkan perwujudan budaya akuntabilitas kinerja pada jajaran aparat Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan, Direktorat Jenderal Bina Marga guna mewujudkan *Good Governance*.
2. Peran serta pimpinan pada setiap kegiatan dalam mengarahkan dan membuat keputusan yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, serta kerjasama dari seluruh pegawai yang berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan untuk mewujudkan pencapaian kinerja Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan yang lebih baik.



3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dari setiap paket kegiatan dilakukan secara rutin.
4. Identifikasi dan mitigasi risiko awal yang dapat menghambat pencapaian target kinerja Balai, diperlukan dalam pengelolaan risiko lingkungan dan keselamatan kerja.

Selain faktor internal yang mendukung keberhasilan dalam pencapaian kinerja Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan juga didukung oleh faktor eksternal yaitu setiap pelanggan maupun mitra kerja dapat berkolaborasi dan memberikan masukan serta saran yang membangun guna mewujudkan kinerja layanan yang lebih baik.

4.1.2 Faktor Penyebab Kegagalan

Capaian kinerja kegiatan di Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan pada tahun 2024 mencapai 100% dengan penyerapan anggaran sebesar 99,29%. Secara keseluruhan Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan telah berhasil memenuhi target pada Perjanjian Kinerja. Dalam pelaksanaannya, terdapat hambatan dan kendala utama yang dihadapi Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan selama Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Terjadinya pagu blokir paket meeting menjelang akhir tahun menyebabkan penyerapan anggaran terkendala.
- b. Peningkatan permintaan advis teknis peninjauan lapangan menyebabkan penyerapan pada uang makan tidak sesuai rencana.
- c. Keterbatasan fasilitas dan peralatan survei yang telah melewati usia pakai mengakibatkan terlambatnya pelaksanaan kegiatan pengujian.

4.2 Rekomendasi dan Tindak

Beberapa langkah antisipatif yang akan dilakukan agar kendala yang dihadapi tahun ini tidak terulang pada tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Efisiensi penggunaan anggaran dengan melakukan rapat secara online/ daring.
- b. Melakukan pemeliharaan tambahan diluar rutin dan berkala terhadap peralatan survei, dengan konsekuensi penambahan anggaran pemeliharaan.

Diharapkan dengan tersusunnya Laporan Kinerja Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan, dapat menjadi masukan atau umpan balik bagi peningkatan kinerja Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan, Direktorat Jenderal Bina Marga di tahun yang akan datang. Satuan Kerja Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan diharapkan dapat menyusun rencana kinerja yang lebih baik dan dapat mengantisipasi permasalahan potensial yang mungkin terjadi.

Akhir kata, Laporan Kinerja Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan Tahun 2024 ini diharapkan menjadi laporan kinerja yang bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan,



baik di dalam lingkungan Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan maupun di luar lingkungan Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan, serta dapat menjadi pedoman penyusunan laporan kinerja ke depan.



LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Awal dan Revisi Tahun 2024;
2. Pengukuran Kinerja (Data Catatan Kaki Laporan Kinerja);
3. Penghargaan;
4. BA Kesepakatan Capaian Kinerja;
5. BA Target Kinerja dan;
6. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan.

PK AWAL 2024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : NENI KUSNIANTI
 Jabatan : KEPALA BALAI PERKERASAN DAN LINGKUNGAN JALAN

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : HEDY RAHADIAN
 Jabatan : DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

- PIHAK PERTAMA pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
- PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandung, 05 Januari 2024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 BALAI PERKERASAN DAN LINGKUNGAN JALAN DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Baseline 2023		Target 2024	
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	IKSP : Rating Keselamatan Jalan Nasional				
	IKK : Tingkat kualitas layanan keteknikan bidang jalan dan jembatan	100	%	100.00	%
	Parameter <i>Tingkat fasilitas pengujian laboratorium dan advis teknik</i>	100.00	%	100.00	%
	Parameter <i>Teknologi bidang jalan dan jembatan yang dikembangkan</i>	1.00		1.00	
	Rincian Output				
ABF 001	Layanan Keleknikan Bidang Jalan dan Jembatan	1.00	Rekomendasi Kebijakan	1.00	Rekomendasi Kebijakan
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	IKSP : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR				
	IKK : Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Jalan	100	%	100.00	%
	Parameter <i>Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR</i>	100.00	%	100.00	%
	Rincian Output				
	EBA 960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.00	Layanan	1.00
EBA 994	Layanan Perkantoran	1.00	Layanan	1.00	Layanan
EBB 951	Layanan Sarana Internal	1.00	Unit	1.00	Unit

- Kegiatan :
- Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional
 - Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga

Total Anggaran

Anggaran
 Rp 7,522,743,000
 Rp 4,649,383,000
 Rp 12,172,126,000



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PERKERASAN DAN LINGKUNGAN JALAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/RINCIAN OUTPUT	VOLUME	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN (Dalam Ribuan Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							12,172,126	Total Anggaran
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional						7,522,743	
		Rating Keselamatan Jalan Nasional					7,522,743	
		ABF Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan	1,00	Rekomendasi Kebijakan			7,522,743	
				102	Kajian Kebijakan		4,172,508	
			1	Dokumen	Kajian Rekomendasi Kebijakan PA Bidang Perkerasan dan Lingkungan Jalan	Bandung	4,172,508	
				404	Advis dan Layanan Teknis		3,350,235	
			1	Layanan	PE Layanan Teknis Bidang Perkerasan dan Lingkungan Jalan	Bandung	3,350,235	
2	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya						4,649,383	
		Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR					4,649,383	
		EBA Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1,00	Layanan			2,289,589	
				058	Pelayanan Umum dan Perencanaan		2,289,589	
			1	Laporan	PM Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perencanaan	Bandung	2,011,488	
			1	Laporan	PO Pembangunan Zona Integritas	Bandung	278,110	
		EBA Layanan Perkantoran	1,00	Layanan			2,226,104	
				001	Gaji dan Tunjangan		462,820	
			1	Tahun	PH Gaji dan Tunjangan	Bandung	462,820	
				002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		1,783,284	
			1	Tahun	PI Pemeliharaan Gedung Kantor, Sarana dan Prasarana	Bandung	895,500	
			1	Tahun	PJ Operasional Perkantoran	Bandung	1,067,784	
		EBB Layanan Sarana Internal	1,00	Unit			133,680	
				053	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran		133,680	
			1	Paket	PG Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Bandung	133,680	

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/RINCIAN OUTPUT	VOLUME	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN (Dalam Ribuan Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		EBA Layanan Perkantoran	1,00	Layanan			1.854.037	
				001	Gaji dan Tunjangan		61.000	
			1	Tahun	PH Gaji dan Tunjangan	Bandung	61.000	
				002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		1.593.037	
			1	Tahun	Pemeliharaan Gedung Kantor, Sarana dan Prasarana	Bandung	846.577	
			1	Tahun	PJ Operasional Perkantoran	Bandung	746.460	
		EBB Layanan Sarana Internal	1,00	Unit			492.032	
				053	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran		492.032	
			1	Paket	PG Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Bandung	492.032	

PK REVISI 2024

REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : NENI KUSNIANTI
 Jabatan : KEPALA BALAI PERKERASAN DAN LINGKUNGAN JALAN

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : RACHMAN ARIEF DIENAPUTRA
 Jabatan : DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

- PIHAK PERTAMA pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
- PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

BANDUNG, 11 DESEMBER 2024

RACHMAN ARIEF DIENAPUTRA

NENI KUSNIANTI

REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

BALAI PERKERASAN DAN LINGKUNGAN JALAN

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	BASELINE 2023	TARGET 2024
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	IKSP : Rating Keselamatan Jalan Nasional		
	IKK : Tingkat kualitas layanan keteknikan bidang jalan dan jembatan	100 %	100,00 %
	Parameter <i>Tingkat fasilitas pengujian laboratorium dan advis teknik</i>	100,00 %	100,00 %
	Parameter <i>Teknologi bidang jalan dan jembatan yang dikembangkan</i>	1,00	1,00
	Rincian Output		
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	ABF.001 Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan	1,00 Rekomendasi Kebijakan	1,00 Rekomendasi Kebijakan
	IKSP : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR		
	IKK : Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Jalan	100 %	100,00 %
	Parameter <i>Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR</i>	100,00 %	100,00 %
	Rincian Output		
	EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1,00 Layanan	1,00 Layanan
	EBA.994 Layanan Perkantoran	1,00 Layanan	1,00 Layanan
EBB.951 Layanan Sarana Internal	1,00 Unit	1,00 Unit	

Kegiatan :

- Pengaturan dan Pembinaan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
- Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga

Total Anggaran

Anggaran

Rp 7.282.690.000

Rp 4.899.041.000

Rp 12.181.731.000

RACHMAN ARIEF DIENAPUTRA

BANDUNG, 11 DESEMBER 2024

NENI KUSNIANTI

REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PERKERASAN DAN LINGKUNGAN JALAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA / RINCIAN OUTPUT	VOLUME	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN (Dalam Ribuan Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						12,181,731	Total Anggaran
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional						7,282,690	
Rating Keselamatan Jalan Nasional						7,282,690	
	ABF.001.Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan	1.00 Rekomendasi Kebijakan				7,282,690	
			102 Kajian Kebijakan			2,670,410	
		1.00 Laporan		PA Kajian Rekomendasi Kebijakan Bidang Perkerasan dan Lingkungan Jalan	KOTA BANDUNG	2,670,410	
			404 Advis dan Layanan Teknis			4,612,280	
		1.00 Laporan		PE Layanan Teknis Bidang Perkerasan dan Lingkungan Jalan	KOTA BANDUNG	4,612,280	
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya						4,899,041	
Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR						4,899,041	
	EBA.960.Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.00 Layanan				2,269,599	
			058 Pelayanan umum dan perlengkapan			2,269,599	
				PM Pelayanan Umum Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan	KOTA BANDUNG	2,011,489	
				PO Pembangunan Zona Intregitas	KOTA BANDUNG	278,110	

Lampiran Catatan Kaki, Hal. 1 dari 2

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA / RINCIAN OUTPUT	VOLUME	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN (Dalam Ribuan Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	EBA.994.Layanan Perkantoran	1.00 Layanan				2,475,864	
			001 Gaji dan Tunjangan			299,326	
				PH Gaji dan Tunjangan	KOTA BANDUNG	299,326	
			002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor			2,176,538	
				PI Pemeliharaan Gedung Kantor Sarana dan Prasarana	KOTA BANDUNG	905,161	
				PJ Operasional Perkantoran	KOTA BANDUNG	1,271,377	
	EBB.951.Layanan Sarana Internal	1.00 Unit				133,578	
			053 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas perkantoran			133,578	
				PG Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	KOTA BANDUNG	133,578	

Lampiran Catatan Kaki, Hal. 2 dari 2

CATATAN KAKI LAPORAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PERKERASAN DAN LINGKUNGAN JALAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/RINCIAN OUTPUT	VOLUME AWAL (PK REVISI)	VOLUME REVISI (REVISI AKHIR)	REALISASI	KINERJA THD AWAL (%)	KINERJA THD REVISI/EMON (%)	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN AWAL (Dalam Ribuan Rp)	ANGGARAN REVISI AKHIR (Dalam Ribuan Rp)	REALISASI ANGGARAN (Dalam Ribuan Rp)	REALISASI THD AWAL	REALISASI	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)*100	(7)=(6)/(4)*100	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)=(14)/(12)*100	(16)=(14)/(13)*100	(8)
											12.181,731	12.181,731	11.893,748	95,64	95,64	Total Anggaran
	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional										7.282,690	7.282,690	7.038,162	96,64	96,64	
		Rating Keselamatan Jalan Nasional									7.282,690	7.282,690	7.038,162	96,64	96,64	
		ABF Layanan Ketechnikan Bidang Jalan dan Jembatan	1,00 Rekomendasi Kebijakan	1,00 Rekomendasi Kebijakan	1,00	100,00	100,00				7.282,690	7.282,690	7.038,162	96,64	96,64	
								102 Kajian Kebijakan			2.670,410	2.586,204	2.463,821	92,25	96,01	
			1 Dokumen	1 Dokumen	1	100	100,00		Kajian Rekomendasi PA Kebijakan Bidang Perkerasan dan Lingkungan Jalan	Bandung	2.670,410	2.586,204	2.463,821	92,26	96,01	
								404 Advisi dan Layanan Teknis			4.612,280	4.716,426	4.574,281	99,18	96,99	
			1 Layanan	1 Layanan	1	100	100,00		Layanan Teknis Bidang Perkerasan dan Lingkungan Jalan	Bandung	4.612,280	4.716,426	4.574,281	99,18	96,99	
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya										4.899,041	4.899,041	4.612,844	94,15	94,15	
		Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR									4.899,041	4.899,041	4.612,844	94,15	94,15	
		EBA Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1,00 Layanan	1,00 Layanan							2.289,599	2.289,599	2.256,203	98,54	98,54	
								050 Pelayanan Umum dan Perengklapan			2.289,599	2.289,599	2.256,203	98,54	98,54	
			1 Laporan	1 Laporan	1	100	100,00		Pelayanan Umum, Pelayanan PM Rumah Tangga dan Perengklapan	Bandung	2.011,469	2.014,300	1.904,572	90,06	90,52	
			1 Laporan	1 Laporan	1	100	100,00		PO Pembangunan Zona Intregitas	Bandung	276,110	275,211	271,631	97,67	90,70	
		EBA Layanan Perkantoran	1,00 Layanan	1,00 Layanan							2.473,864	2.473,864	2.232,864	89,78	89,78	
								001 Gaji dan Tunjangan			299,326	299,326	296,046	89,55	89,55	
			1 Tahun	1 Tahun	1	100	100,00		PH Gaji dan Tunjangan	Bandung	299,326	299,326	296,046	89,55	89,55	
								002 Ierasional dan Pemeliharaan Kantor			2.176,538	2.176,538	1.936,818	89,81	89,81	
			1 Tahun	1 Tahun	1	100	100,00		Pemeliharaan Gedung Kantor, Sarana dan Peralatan	Bandung	905,161	919,041	712,211	70,06	77,43	
			1 Tahun	1 Tahun	1	100	100,00		PJ Operasional Perkantoran	Bandung	1.271,377	1.256,697	1.242,607	97,74	90,86	
		EBB Layanan Sarana Internal	1,00 Unit	1,00 Unit							133,578	133,578	133,577	100,00	100,00	
								053 aan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran			133,578	133,578	133,577	100,00	100,00	
			1 Paket	1 Paket	1	100	100,00		PG Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Bandung	133,578	133,578	133,577	100,00	100,00	

PENGHARGAAN

Predikat WBK di Satu Dekade Zona Integritas Tahun 2024



Gambar. Dokumentasi Predikat WBK Zona Integritas BPLJ Tahun 2024

Kementerian PANRB dalam acara Satu Dekade Zona Integritas dan Penganugerahan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2024 pada Rabu, 11 Desember 2024, bertempat di Assembly Hall Birawa, Hotel Bidakara Jakarta, menganugerahkan predikat WBK kepada Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan (BPLJ). Penghargaan ini diberikan kepada unit kerja yang menunjukkan komitmen tinggi terhadap reformasi birokrasi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Penghargaan ini menjadi bukti nyata komitmen BPLJ dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Predikat WBK ini menjadi simbol kepercayaan masyarakat yang akan terus memotivasi BPLJ untuk memberikan dampak positif yang lebih luas.

Penghargaan Unit Pelaksana Teknis yang Memiliki Komitmen dan Konsisten dalam Membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Berdasarkan Hasil Evaluasi Tim Penilai Internal Tahun 2024





Certificate of Conformity

SNI ISO 37001:2016



Gambar. Certificate of conformity SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan

Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan kini telah menerima sertifikat SNI ISO 37001:2016 terkait Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada tanggal 5 Agustus 2024.

Pencapaian ini menunjukkan komitmen kami untuk menjalankan setiap pekerjaan dengan integritas dan transparansi. Sertifikasi ini menjadi bukti bahwa kami berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan bebas dari praktik penyuapan. Kami percaya bahwa dengan menerapkan standar yang tinggi, kami dapat memberikan layanan terbaik bagi masyarakat dan membangun kepercayaan yang kuat.



Penghargaan Terbaik I dalam Pengelolaan Media Sosial Kementerian PUPR Kategori Balai Tahun 2024



Gambar. Dokumentasi Penghargaan Terbaik I dalam Pengelolaan Media Sosial Kementerian PUPR Kategori Balai Tahun 2024

Dalam ajang Temu Silaturahmi Admin Media Sosial (TERMOS) yang diselenggarakan oleh Kementerian PUPR di Auditorium Kementerian PUPR Jakarta pada 5 November 2024, Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan (BPLJ) diberikan kepercayaan sebagai Terbaik I dalam pengelolaan media sosial di tingkat Balai. Acara ini berlangsung di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, dan dihadiri oleh seluruh unit komunikasi publik tingkat organisasi dan balai dari Kementerian PU dan Kementerian PKP. Semoga apresiasi yang diberikan ini menjadi motivasi bagi para tim Komunikasi Publik untuk terus berinovasi dan memberikan yang terbaik dalam pengelolaan media sosialnya.

Penghargaan Terbaik I Unit Kerja Pengelola Data Kepegawaian Terbaik Tahun 2024 pada Kategori Jumlah Pegawai di Bawah 100



Gambar. Dokumentasi Penghargaan Terbaik I Unit Kerja Pengelola Data Kepegawaian Terbaik Tahun 2024 pada Kategori Jumlah Pegawai di Bawah 100

Direktorat Jenderal Bina Marga melaksanakan Evaluasi Pemutakhiran Data Kepegawaian pada Kamis-Jumat, 12-13 Desember 2024. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk peningkatan kualitas data kepegawaian.

Pada kesempatan inii, BPLJ mendapatkan penghargaan Pengelola Data Kepegawaian Terbaik Tahun 2024 pada kategori Jumlah Pegawai di Bawah 100. Capaian ini menjadi bukti nyata dedikasi BPLJ dalam memastikan tata kelola kepegawaian berjalan optimal. Penghargaan ini diharapkan menjadi motivasi bagi BPLJ untuk terus mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas pengelolaan kepegawaian di masa mendatang.

BA KESEPAKATAN CAPAIAN KINERJA

BERITA ACARA TARGET KINERJA REVISI UNIT KERJA /BALAI TA. 2024 DI LINGKUNGAN DITJEN BINA MARGA

NO	PARAMETER KEBERHASILAN	SATUAN	BASELINE 2023	TARGET PK AWAL	TARGET PK REVISI	KETERANGAN <i>*apabila terdapat perbedaan antara PK Awal dan PK Revisi</i>
14	BALAI PERKERASAN DAN LINGKUNGAN JALAN					
	Kegiatan : Pengaturan dan Pembinaan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan					
	IKK : Tingkat pelayanan keteknikan bidang jalan dan jembatan					
14.1	Teknologi bidang jalan dan jembatan yang dikembangkan	Dokumen	1	1	1	
14.2	Tingkat fasilitas pengujian laboratorium dan advis teknik	%	100	100	100	
	Kegiatan : Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga					
	IKK : Tingkat efektifitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan jalan					
14.3	Tingkat Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga	%	100	100	100	

Mengetahui :	
Nama :	ZIHAD FURQON
Jabatan :	KASUBAG UMUM PDD TU
Tanda tangan :	



BA TARGET KINERJA

BERITA ACARA TARGET KINERJA REVISI UNIT KERJA /BALAI TA. 2024 DI LINGKUNGAN DITJEN BINA MARGA

NO	PARAMETER KEBERHASILAN	SATUAN	BASELINE 2023	TARGET PK AWAL	TARGET PK REVISI	REALISASI	DEVIASI THD TARGET PK REVISI	KETERANGAN <i>*apabila terdapat perbedaan antara PK Awal dan PK Revisi</i>
14	BALAI PERKERASAN DAN LINGKUNGAN JALAN							
	Kegiatan : Pengaturan dan Pembinaan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan							
	IKK : Tingkat pelayanan keteknikan bidang jalan dan jembatan							
14.1	Teknologi bidang jalan dan jembatan yang dikembangkan	Dokumen	1	1	1	1	0%	
14.2	Tingkat fasilitas pengujian laboratorium dan advis teknik	%	100	100	100	106,80	6,8%	
	Kegiatan : Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga							
	IKK : Tingkat efektifitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan jalan							
14.3	Tingkat Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga	%	100	100	100	100	0%	

Mengetahui :	
Nama :	ZIHAD FURQON, SE. M.M.Pd.
Jabatan :	KASUBAG TU
Tanda tangan :	



DOKUMENTASI KEGIATAN

1. Dokumentasi Kegiatan Kelompok Bidang Keahlian Perkerasan

a. Penyusunan Naskah Akademik Ketidakrataan Sebagai Syarat Keberterimaan Konstruksi



Persiapan pengujian



Kalibrasi alat Hawkeye



Koordinasi Pengujian ketidakrataan



Pengujian Ketidakrataan Jalan



Diskusi dengan *Board of Director*



Penyampaian hasil naskah akademik IRI



b. Sosialisasi Manual Desain Perkerasan Jalan 2024



Kegiatan Sosialisasi MDP 2024 di Medan

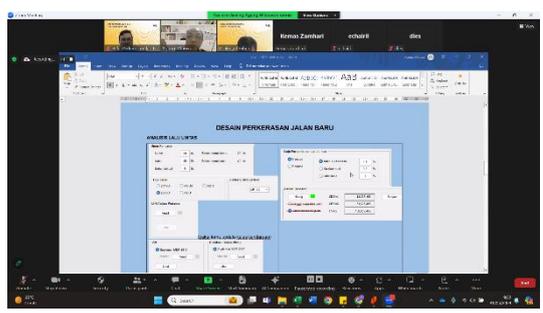
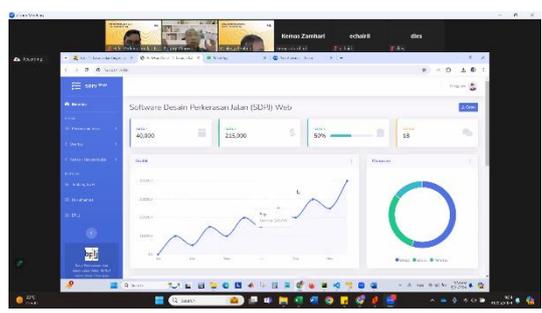


Kegiatan Sosialisasi MDP 2024 di Jambi



Kegiatan Sosialisasi Manual Desain Perkerasan 2024 di Palembang

c. Pengembangan SDPJ versi website



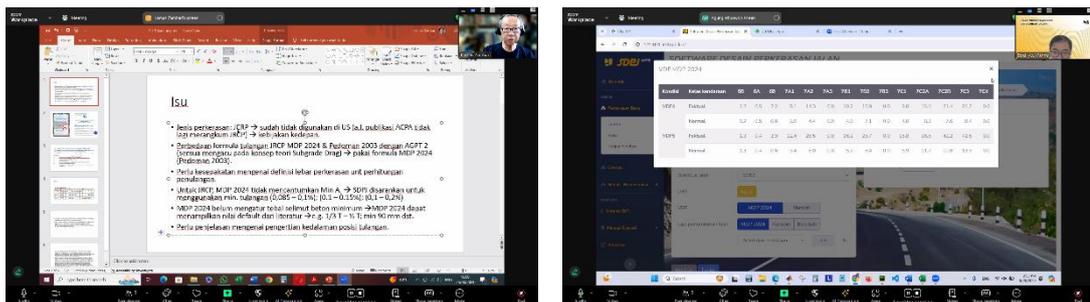
(a) Diskusi Progres ke-1



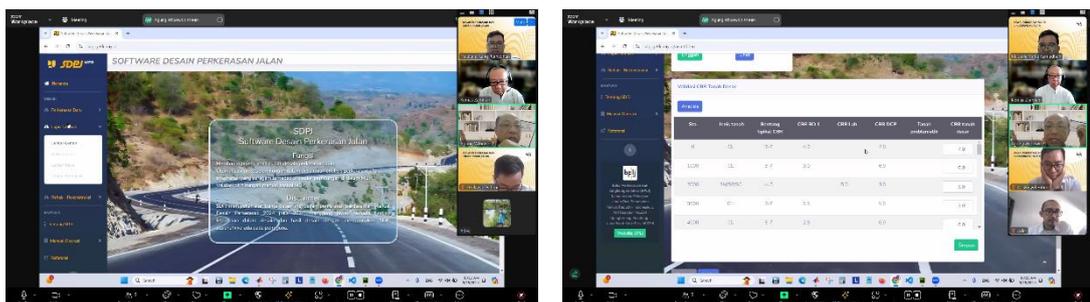
(b) Diskusi Progres ke-2



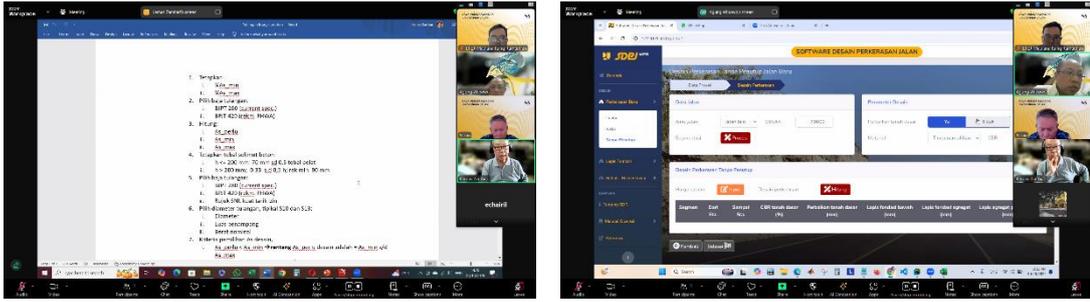
(c) Diskusi Progres ke-3



(d) Diskusi Progres ke-4



(e) Diskusi Progres ke-5



(f) Diskusi Progres ke-6



(g) Diskusi Progres ke-7

Diskusi Progres Pengembangan SDPJ Versi Website

d. Pengujian *Accelerated Pavement Test*



Pengukuran profil permukaan dengan Laser Profilometer



Pengukuran FWD pada Lokasi lintasan APT



Pengukuran RSD



Diskusi pengujian APT

2. Dokumentasi Kegiatan Kelompok Bidang Keahlian Lalu Lintas



Kajian Faktor Volume Lalu Lintas





Kajian Penerapan Purwarupa Jalur Penghentian Darurat (JPD) Sepeda Motor



Reviu Jalur Penghentian Darurat (JPD)

3. Dokumentasi Kegiatan Kelompok Bidang Keahlian Lingkungan



Validasi Aplikasi INDRAIN untuk Survei Cepat Drainase Jalan



Internalisasi Pedoman Konstruksi Berkelanjutan Bidang Jalan



Reviu Pedoman Penanaman Pohon pada Sistem Jaringan Jalan

4. Dokumentasi Kegiatan Layanan Teknis



Validasi Alat Uji IRI Kelas 1 Otomatis oleh Alat Kelas 1 Manual



Kalibrasi Alat Uji IRI Kelas 1 Otomatis



Bounce Test Alat Kelas 1 Otomatis



Kalibrasi Relatif Alat FWD BBPJK Kalsel



Pengujian Kekesatan Jalan Tol Padaleunyi



Pengujian Lentutan dengan FWD di Jalan Tol Kayu Agung -Palembang



Advis Teknis – Tinjauan Lapangan Kerusakan Jalan di Jawa Tengah



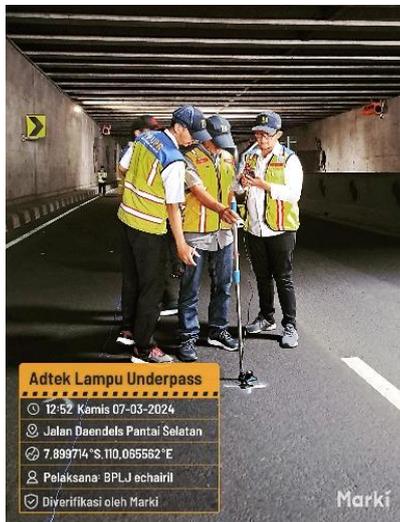
Pendampingan Teknis Paket Pekerjaan Jalan di KIPP IKN



Advis Teknis – Tinjauan Lapangan Kerusakan Jalan Akses Kariangau Balikpapan Kaltim



Uji IRI menggunakan Alat Kelas 1 Manual (Dipstick)



Advis Teknis – Tinjauan Lapangan Reviu Kualitas Pencahayaan pada Underpass Bandara YIA



Advis Teknis Reviu JPD Kertek - Wonosobo



Pengujian Beban Sumbu Kendaraan di Cipali



Advis Teknis Reviu Kemacetan Nataru di Bali